

INOVASI PENDIDIKAN

Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan

Salah satu kajian yang banyak dimanfaatkan untuk mencermati pembaharuan pendidikan adalah kajian inovasi pendidikan. Sejauh ini, disadari bahwa masih minim sekali buku yang membahas tentang inovasi pendidikan yang dapat dijadikan sumber belajar untuk kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Tarbiyah sebagai Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Buku ini memuat konsep, prinsip, strategi dan aplikasi inovasi pendidikan sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan baru dalam upaya membangun lembaga pendidikan yang efektif dalam sistem pendidikan nasional sehingga berfungsi efektif mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) bangsa Indonesia.

Kehadiran buku ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang berminat terhadap inovasi pendidikan. Lebih dari itu, kehadiran buku ini juga diperuntukkan bagi peminat isu-isu kontemporer pendidikan dan mahasiswa PTAI khususnya ilmu pendidikan dan semua program studi pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Untuk itu buku ini berusaha diketengahkan agar dapat memperkaya nuansa keilmuan inovasi pendidikan.



Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd
Drs. Asrul, M.Si
Mesiono, M.Pd

INOVASI PENDIDIKAN

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd
Drs. Asrul, M.Si
Mesiono, M.Pd



INOVASI PENDIDIKAN

Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan

Perdana
Publishing

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Jl. Sosro No.16A Medan 20224, Tel 061-77151020
Fax 071-7347756 Email. perdanapublishing@gmail.com

ISBN 968-602-8935-82-1



9 786028 935821

Perdana
Publishing

Perdana
Publishing

INOVASI PENDIDIKAN

(Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan)

INOVASI PENDIDIKAN

(Suatu Analisis Terhadap
Kebijakan Baru Pendidikan)

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.
Asrul, M.Si.
Mesiono, M.Pd.

Editor:
Chandra Wijaya, M.Pd. & Usiono, M.A.



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

INOVASI PENDIDIKAN
(Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan)

Penulis: Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.,
Asrul, M.Si., dan Mesiono, M.Pd.

Editor: Chandra Wijaya, M.Pd., dan Usiono, M.A.

Copyright © 2012, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

(Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana)
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: September 2012

ISBN 978-602-8935-82-1

*Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku yang berjudul: **INOVASI PENDIDIKAN** dengan analisis pendekatan sistem dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Di tengah sibuknya pelaksanaan desentralisasi pendidikan setelah era otonomi daerah tahun 2000, salah satu kajian yang banyak dimanfaatkan untuk mencermati pembaharuan pendidikan adalah kajian inovasi pendidikan. Sejauh ini, disadari bahwa masih minim sekali buku yang membahas tentang inovasi pendidikan yang dapat dijadikan sumber belajar untuk kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Tarbiyah sebagai Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada berbagai universitas dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menentukan masa depan umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat ditentukan oleh bagaimana sistem pendidikan bangsa tersebut dilaksanakan dan dikembangkan.

Dalam konteks tersebut, maka kemajuan peradaban yang dicapai umat manusia dewasa ini, sudah tentu tidak terlepas dari peran-peran pendidikannya. Diraihnya kemajuan ilmu dan teknologi yang dicapai bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi merupakan produk suatu pendidikan, sekalipun diketahui bahwa kemajuan yang dicapai dunia

pendidikan selalu di bawah kemajuan yang dicapai dunia industri yang memakai produk lembaga pendidikan.

Buku ini memuat konsep, prinsip, strategi dan aplikasi inovasi pendidikan sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan baru dalam upaya membangun lembaga pendidikan yang efektif dalam sistem pendidikan nasional sehingga berfungsi efektif mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) bangsa Indonesia.

Kehadiran buku ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang berminat terhadap inovasi pendidikan. Lebih dari itu, kehadiran buku ini juga diperuntukkan bagi peminat isu-isu kontemporer pendidikan dan mahasiswa PTAI khususnya ilmu pendidikan dan semua program studi pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Untuk itu buku ini berusaha diketengahkan agar dapat memperkaya nuansa keilmuan inovasi pendidikan.

Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada pimpinan dan redaksi penerbit Perdana Publishing yang berkenan menerbitkan buku ini. Demikian pula kepada teman sejawat yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini. Kepada para pembaca, diharapkan kritik dan saran bagi perbaikan buku ini masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan meridhoi amal usaha ini. Amin ya Robbal 'Alamin.

Medan, 16 April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Pendidikan dan Perubahan	1
B. Pendidikan Nasional Masa Kini	6
C. Keniscayaan dalam Membenahi Pendidikan	10
BAB II	
KONSEP DASAR INOVASI	22
A. Pengertian Inovasi	22
B. Antara Penemuan, Pengembangan, dan Penyebaran	29
1. <i>Invention</i> (Penemuan)	30
2. <i>Development</i> (Pengembangan)	31
3. <i>Diffusion</i> (Penyebaran)	32
C. Karakteristik Inovasi	33
D. Pentingnya Inovasi	38
E. Faktor Pendorong Inovasi	41
BAB III	
HAKIKAT INOVASI PENDIDIKAN	52
A. Pengertian Inovasi Pendidikan	52
B. Urgensi Inovasi dalam Pendidikan	55
C. Manfaat Inovasi Pendidikan	62
D. Sasaran Program Inovasi Pendidikan	71

BAB IV

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH ...	78
A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah	78
B. Eksisten Manajemen Berbasis Sekolah	80
C. Kebijakan MBS sebagai Inovasi Pendidikan	83
D. Implementasi MBS	86
E. Penerapan Model MBS di Sekolah	90
1. Pemberian Otonomi Daerah	90
2. Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat	91
3. Mendorong kepemimpinan Kepala Sekolah yang kuat	93
4. Proses Pengambilan Keputusan yang Demokratis	96
5. Bimbingan Proporsional dari Satuan Atasan	97
6. Diarahkan untuk Pencapaian Kinerja Sekolah	99
7. Sosialisasi Secara Terus Menerus	99
F. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah	101

BAB V

KEBIJAKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN

PENDIDIKAN	104
A. Pengertian Kurikulum	104
B. Komponen Kurikulum	106
C. Landasan legal KTSP	108
D. Landasan Filosofis dan Teoritis KTSP	109
E. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	111
1. Komponen dan Acuan Operasional Penyusunan KTSP	112
2. Struktur dan Muatan KTSP	114
F. SK/KD PAI di SD/MI	123

BAB VI

KEBIJAKAN STANDARISASI PENDIDIKAN

A. Standarisasi dan Pendidikan	128
B. Kualitas dan Standarisasi Pendidikan	134
C. Standarisasi Pendidikan: Suatu Keniscayaan	139

D. Pendidikan Nasional : Perlu Pembaharuan	143
E. Standarisasi dan Profesionalisme Guru	146

BAB VII

KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU	151
A. Dinamika Pendidikan Masa Kini	151
B. Standar Kompetensi Guru	155
1. Tanggungjawab Guru	156
2. Peran dan Fungsi Guru	157
C. Sertifikasi Guru	161

BAB VIII

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER	171
A. Fenomena Sosial Kontemporer	171
B. Pembangunan Karakter Bangsa	174
C. Pendidikan Karakter	177
1. Pengertian Karakter dan Pendidikan Karakter	177
2. Nilai-Nilai dan Pilar Karakter	180
3. Tujuan Pendidikan Karakter	182
D. Perspektif Pendidikan Islam	183
E. Strategi Pembelajaran untuk Pendidikan Karakter	191
1. Model Konsiderasi	193
2. Model Pengembangan Kognitif	194
3. Teknik Mengklarifikasi Nilai	197
4. <i>Living Values Education</i> (LVE)	197
 DAFTAR PUSTAKA	 201

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendidikan dan Perubahan

Pendidikan sebagai proses transformasi budaya sejatinya menjadi wahana bagi perubahan dan dinamika kebudayaan masyarakat dan bangsa. Karena itu, pendidikan yang diberikan melalui bimbingan, pengajaran dan latihan harus mampu memenuhi tuntutan pengembangan potensi peserta didik secara maksimal, baik potensi intelektual, spiritual, sosial, moral, maupun estetika sehingga terbentuk kedewasaan atau kepribadian seutuhnya. Dengan melalui kegiatan tersebut yang merupakan bentuk-bentuk utama dari proses pendidikan, maka kelangsungan hidup individu dan masyarakat akan terjamin. Dalam hal ini pendidikan sebenarnya berfungsi mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara utuh dan terintegrasi tetapi untuk memudahkan pengkajian dan pembahasan biasa diadakan pemilahan dalam aspek-aspek intelektual, sosial, emosi dan fisik-motorik (Sukmadinata, 2004:9).

Pendidikan merupakan proses pemindahan nilai budaya kepada individu dan masyarakat. Dijelaskan oleh Langgulung (1985:3) bahwa pendidikan merupakan pemindahan nilai, yaitu:

- 1) Pemindahan nilai-nilai budaya melalui pengajaran. Pengajaran berarti pemindahan pengetahuan atau *knowledge*. Pendidikan berarti seseorang yang mempunyai pengetahuan memindahkan pengetahuannya kepada orang lain yang belum mengetahui.
- 2) Termasuk dalam proses pendidikan adalah latihan. Sesungguhnya latihan bermakna seseorang membiasakan diri di dalam melakukan pekerjaan tertentu untuk memperoleh kemahiran di dalam pekerjaan tersebut.

- 3) Pendidikan ialah indoktrinasi yaitu proses yang melibatkan seseorang meniru atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang lain. Maka proses indoktrinasi ini banyak bergantung kepada orang yang mengeluarkan perintah yang patut ditiru oleh orang-orang yang menjalankan perintah tersebut.

Dapat dipastikan secara aksiologi, pendidikan memang menciptakan perubahan, karena berkenaan dengan penanaman nilai-nilai kebenaran, kesucian dan kebaikan hidup bagi manusia. Dalam perspektif individu, proses pendidikan menghasilkan perubahan tingkah laku anak didik melalui pembinaan atau bimbingan terhadap potensi. Sedangkan dalam tinjauan sosial, pendidikan merupakan transformasi budaya dari satu generasi tua (pendidik dan tenaga kependidikan) kepada anak didik sehingga terbentuk pribadi berbudaya sesuai dengan karakter bangsa dan mengembangkan kebudayaan baru dalam mengantisipasi perubahan. Pendidikan informal dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan di masyarakat memang harus sinergis dalam pelaksanaan peran dan fungsi kependidikannya.

Pendidikan dalam keluarga merupakan pilar pertama dan utama pengembangan potensi anak, khususnya dalam membentuk sikap dan keterampilan hidup. Sedangkan pendidikan formal di sekolah menyempurnakan dasar pengetahuan anak secara akademik, dan sikap serta keterampilan untuk mampu berperan dalam berbagai pilihan peran di masyarakat sebagai bagian dari struktur kebudayaan. Begitu pula pendidikan non formal membantu sekolah dan rumah tangga dalam meningkatkan dan memantapkan keterampilan hidup anak sebagai makhluk individu, sosial, ekonomi, dan religius yang memungkinkan generasi muda eksis dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Terbentuknya kepribadian yang cerdas intelektual, cerdas emosi, cerdas intelektual dan cerdas secara sosial. Inilah kecerdesan yang komprehensif dan sehingga memungkinkan anak-anak mampu memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi dalam berbagai kesempatan dan tempat kehidupan anak berlangsung.

Sekolah, keluarga dan masyarakat saling memperkuat tertanamnya nilai dalam diri setiap peserta didik. Proses saling memperkuat ini berlangsung berabad-abad. Nilai-nilai budaya modern baik dalam bidang

politik, sosial budaya, ekonomi maupun IPTEK yang telah berkembang dan memasyarakat dalam kurun waktu lebih dari empat abad bahkan konsepsi dasarnya telah dirintis dari sebelum masehi (ingat Plato dan Aristoteles) merupakan materi kurikulum yang menjadi bahan proses pembelajaran, baik dalam bidang studi Matematika, dan IPA maupun IPS (Soedijarto, 2000:38-39).

Analisis keilmuan tentang kegiatan pendidikan di sekolah secara makro menunjukkan bahwa penciptaan program-program pendidikan memerlukan landasan berbagai cabang ilmu pengetahuan secara interdisipliner. Analisis keilmuan interdisipliner tersebut memang diperlukan karena kegiatan pendidikan sebagai objek ilmiah merupakan: (1) gejala rohani dalam arti perkembangan rohani antara anak yang menjadi dewasa dalam konteks hubungan rohani antara anak didik dengan pendidiknya, (2) peristiwa sosial, dalam arti merupakan tindakan sosialisasi antara generasi tua ke generasi muda merupakan hubungan dan internasional, (3) hubungan nilai norma, sebab dalam kegiatan pendidikan memang terjadi transaksi nilai atau simbolik yang asimetris, dari kelompok pendidik kepada kelompok anak didik. Sementara itu muatan pendidikan yang diberikan di sekolah dapat diakumulasi dalam lima materi keilmuan, yaitu: (1) ide abstrak, (2) benda fisik, (3) jasad hidup, (4) gejala rohani, (5) peristiwa sosial, dan (6) dunia tanda, sebagai upaya pembentukan pembelajar menjadi manusia yang memiliki pribadi beromral, intelektual, serta berinteraksi sosial, baik dengan manusia lainnya maupun lingkungannya (Uno, 2007:33).

Dalam konteks ini pendidikan menjadi gejala kebudayaan yang dipengaruhi lingkungan sosialnya. Dengan begitu, pendidikan tidak boleh statis, akan tetapi pendidikan harus mampu mendisain tidak hanya perubahan individu namun sekaligus perubahan masyarakat dan bangsa secara komprehensif serta berkelanjutan. Untuk melakukan perubahan kepribadian warga negara yang berbudaya dan mengkonstruksi formulasi kebudayaan secara komprehensif, maka diperlukan upaya pembaharuan pendidikan yang benar-benar menyentuh esensi kebudayaan masyarakat dan bangsa. Dengan kata lain, pendidikan yang tercerahkan harus mampu mendorong perubahan manusia dan budaya, maka diperlukan manajemen dan kepemimpinan pendidikan yang efektif, tidak hanya pada tingkat makro (pemerintah pusat), dan meso (pemerintah daerah), namun

sekaligus juga mengarahkan perubahan atau inovasi pendidikan pada tingkat mikro (sekolah) di satuan pendidikan.

Dalam konteks inilah, peran manajemen dan kepemimpinan pendidikan yang menghasilkan kebijakan inovatif memang sangat signifikan bagi pendidikan nasional yang lebih bermakna. Untuk itu, upaya-upaya inovatif melalui kebijakan pendidikan berbasis kepada masyarakat di satu sisi, dan kebijakan pendidikan berfokus pada pelanggan dan mutu, akan dapat menciptakan daya saing anak bangsa dalam persaingan global. Dengan demikian inovasi pendidikan memang menjadi keniscayaan dalam merespon tuntutan lingkungan internal dan respon terhadap keperluan eksternal dunia pendidikan nasional, sehingga sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan mampu menciptakan tatanan budaya baru bangsa yang lebih cerdas dan mensejahterakan dan memajukan bangsa.

Sejalan dengan pendapat di atas, Tilaar (2002:25), menjelaskan bahwa kemampuan persaingan dengan pemanfaatan inteligensi serta informasi yang telah melahirkan ide-ide baru perlulah diterapkan di dalam kehidupan yang nyata. Inilah kemampuan inovasi suatu masyarakat atau bangsa. Bangsa yang tidak inovatif akan dilanda oleh gelombang globalisasi yang terus menerus berubah dengan adanya ide-ide yang baru. Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi informasi dan komunikasi akan melahirkan berbagai jenis inovasi. Bangsa yang inovatif akan menjadi bangsa yang unggul di dalam persaingan global.

Pendidikan memang harus menciptakan kemampuan daya saing bangsa. Dapat dipastikan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pengembangan karakter bangsa sangat signifikan, karena keluarga, sekolah dan berbagai lembaga sosial menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai, pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada anak bangsa sebagai tanggung jawab sosial, politik, psikologis dan budaya. Itu artinya, pendidikan merupakan proses sistematis, terencana dan terarah dalam menumbuhkan-kembangkan potensi anak sehingga tercapai kedewasaan yang maksimal sesuai tuntutan peran-peran sosial di masyarakat.

Saat ini para pengelola pendidikan harus mengubah paradigma pengelolaan tentang pendidikan. Pendidikan harus dilihat sebagai lembaga sosial yang berfungsi mengembangkan sumberdaya manusia (SDM)

yang dikelola secara profesional namun tetap berbasis kepada pendidikan itu sendiri. Di samping banyak aspek lainnya yang juga turut dalam membenahan namun peran guru/dosen menjadi sangat sentral dan penting untuk dikembangkan (Andriani, 2002:4).

Sejalan dengan penegasan di atas maka Trier (2001:270) menjelaskan bahwa kemampuan kita untuk menemukan cara-cara meningkatkan kondisi kehidupan dalam masyarakat dimulai dengan mengatasi atau mengeliminir kelemahan seseorang akan menjadi faktor krusial dalam dekade ke depan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pendidikan merupakan faktor penting, karena kenyataannya bahwa masyarakat menggerakkan pendidikan lebih daripada pendidikan yang menggerakkan masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil apabila ada kerjasama dan dukungan yang penuh dari masyarakat dan keluarga. Sekolah merupakan satu kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi. Pribadi-pribadi yang bertemu di sekolah tergabung dalam bagian-bagian yang melakukan hubungan organis yang bersistem. Sistem sekolah terwujud dengan munculnya cara interaksi sosial yang khas. Sekolah sebagai organisasi sosial dicirikan oleh: (a) memiliki suatu penghuni yang tetap, (b) memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah, (c) memiliki inti jaringan hubungan sosial, (d) mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah, dan (e) memiliki suatu jenis kebudayaan atau sub kebudayaan tersendiri demikian pendapat Ballantine (1985) dalam Uno (2007:34).

Peran lembaga pendidikan formal dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang diperlukan masyarakat dan bangsa adalah lebih fokus bagi tersedianya para perancang, pelaksana dan pendorong percepatan pembangunan. Sesungguhnya, sekolah dan perguruan tinggi yang mencetak atau menyediakan calon guru, hakim, jaksa, pegawai kantor pemerintah, ahli pertanian, teknik, arsitektur, ahli bahasa, ahli ekonomi, perbankan, dan lain sebagainya. Hanya dengan peran strategis SDM terdidik ini maka dinamika pembangunan dan perubahan masyarakat dapat diarahkan lebih sistematis, terarah, terencana dan berkesinambungan.

Dalam konteks inilah salah satu persoalan nasional dalam menghadapi masa depan bangsa secara bersama adalah masalah peningkatan kemampuan pembangunan (*development capability*) kita. Kemampuan pembangunan yang telah kita miliki sekarang ini perlu kita tingkatkan agar tetap dapat mengatasi masalah-masalah pembangunan yang akan datang (Buchori, 1994:51). Untuk meningkatkan kemampuan pembangunan nasional dalam berbagai bidang pembangunan, maka peran sumberdaya manusia yang dihasilkan sistem pendidikan sangat menentukan masa depan dan kemajuan bangsa sebagai bangsa yang cerdas, beradab dan bermartabat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Pada gilirannya, hanya dengan penataan sistem pendidikan yang baik, berkualitas dan akuntabel dapat diharapkan percepatan pembangunan dan kemajuan bangsa dengan daya saing global di tengah pergaulan dengan bangsa lain.

B. Pendidikan Nasional Masa Kini

Pendidikan nasional merupakan aspek kehidupan bangsa yang harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam pelaksanaan program pembangunan, maupun keberlanjutannya. Hal ini penting diprioritaskan karena efektivitas pembangunan bangsa berkenaan dengan nasib dan masa depan bangsa. Posisi strategis pendidikan nasional dalam keberlangsungan hidup dan kebudayaan bangsa benar-benar harus disadari bangsa ini sehingga salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan secara merata dan berkesinambungan.

Begitupun, setelah 67 tahun Indonesia merdeka, pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang mengemuka, yaitu: (1) masih rendahnya pemerataan untuk memperoleh pendidikan, (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis perkotaan dan pedesaan, serta antar kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan antar tingkat pendapatan penduduk dan antar gender (Uno, 2007:133).

Di sisi lain dilihat dari perspektif pembelajaran, maka kondisi fasilitas pendidikan dan keterbatasan waktu guru untuk berperan sebagai pendidik dalam arti yang sesungguhnya diperparah dengan sistem kurikulum yang meliputi banyak mata pelajaran dan masing-masing mata pelajaran sarat dengan bahan pelajaran. Sistem kurikulum yang demikian ini ditambah dengan sistem EBANAS/UN, menjadikan tugas guru dipersepsikan tidak lebih dari mengupayakan semua peserta didik dalam waktu yang sama, mempelajari materi pelajaran yang sama, dengan cara yang sama (Soedijarto, 2000:43).

Manajemen dan gaya kepemimpinan pendidikan merupakan *legacy* masih tetap digunakan sampai saat ini. Manajemen organisasi pendidikan berjalan apa adanya mengikuti jalur yang sudah digariskan, tidak berdaya, terbelenggu, dan kurang ada kemauan untuk berinisiatif, melakukan terobosan, perubahan dalam berbagai aspek. Munculnya sekolah unggulan, pada tingkat sekolah dasar dan menengah serta kelas-kelas internasional pada PT merupakan suatu refleksi dari ketidakpuasan dalam pengelolaan pendidikan nasional. Hal itu perlu disambut baik dan terus dikembangkan meskipun masih membutuhkan perjalanan panjang untuk terus mengembangkan manajemen dan kepemimpinan organisasi (Andriani, dkk, 2003:6).

Selain persoalan di atas, maka dalam rangka kesinambungan dan perbaikan pendidikan maka mencermati lebih jauh kekinian pendidikan nasional, maka ada lima aspek yang menjadi tantangan berat pembangunan pendidikan di Indonesia, sebagaimana dikemukakan Irianto (2011:94) yaitu:

1. Aspek peningkatan mutu, berkenaan dengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunya adalah untuk menghadapi persaingan global. Setidaknya ada kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global, yaitu: (1) kemampuan manajemen, (2) kemampuan teknologi, dan (3) kualitas manusianya sendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhi standar lembaga, atau standar nasional semata-mata tetapi harus memenuhi standar internasional.
2. Aspek pemerataan, berkenaan dengan peningkatan aspirasi

masyarakat diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan. Tetapi ini akan membutuhkan biaya yang tinggi, dengan semakin tingginya jarak antar daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan, sangat potensial memunculkan ketimpangan dalam memperoleh mutu pendidikan. Tanpa intervensi manajemen, maka anggota masyarakat dari daerah kabupaten atau ke kota yang kaya dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, akan dapat menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari anggota masyarakat pada daerah kabupaten atau kota yang miskin. Dan apabila kesempatan pendidikan ini juga mempengaruhi kesempatan untuk memperoleh penghasilan maka dalam jangka panjang akan berpotensi meningkatnya jurang kesenjangan ekonomi antar daerah.

3. Aspek efisiensi manajemen, berkenaan dengan keterbatasan sumber pendanaan dalam perencanaan pendidikan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan (*technical efficiency*) maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran (*economic efficiency*). Bukan sebaliknya, bahwa dengan melaksanakan otonomi daerah, pembiayaan justru meningkat karena bertambahnya struktur organisasi daerah yang menambah lebih banyak personil pemerintahan, tetapi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Aspek peran serta masyarakat, berkenaan dengan filosofi diberikannya otonomi kepada daerah peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan, kelompok, lembaga industri, atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun, perlu diantisipasi bahwa peranan masyarakat tersebut cenderung terbatas pada lingkungan kabupaten atau kota yang bersangkutan. Karena itu, perlu juga intervensi kebijakan nasional, yang dapat menerapkan subsidi silang supaya peran serta masyarakat dalam sistem desentralisasi tidak memperlebar jurang ketimpangan pemerataan fasilitas pendidikan antar daerah.
5. Akuntabilitas. Melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan jasa pendidikan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga akuntabilitas layanan

tersebut bergeser dari yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintahan pusat kepada akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini menuntut lebih besar partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pendidikan di daerah masing-masing.

Sayangnya, pendidikan nasional masih jauh dari hasil yang diharapkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena lulusan sistem pendidikan nasional kurang berdaya di tengah perubahan masyarakat yang semakin massif (besar-besaran) disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Pada saat bersamaan, meskipun berbagai kebijakan pembaharuan dan peningkatan mutu melalui regulasi pendidikan, peningkatan kualitas guru dan dosen, pembaharuan kurikulum, pembenahan sarana dan prasarana pendidikan, maupun peningkatan pembiayaan, nampaknya sejauh ini masih menyedihkan.

Sesuai dengan pemberitaan Kompas tanggal 3 maret 2011, menurunnya peringkat pendidikan Indonesia dari peringkat 65 pada tahun 2010, menjadi peringkat 69 pada tahun 2011, sementara Malaysia berada pada ranking 61. Padahal ranking pendidikan menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa, karena itu dengan menurunnya ranking pendidikan tersebut, maka itu artinya kualitas manusia Indonesia pada umumnya rendah.

Mungkin saja bangsa ini mengalami kemajuan dalam beberapa aspek, namun bangsa-bangsa lain juga mencapai kemajuan yang lebih tinggi dari bangsa Indonesia. Akhirnya, bangsa Indonesia masih saja tertinggal dari negara-negara tetangga di antaranya Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Jepang. Oleh sebab itu pembenahan atau pembaharuan pendidikan nasional menjadi keniscayaan, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai perancang dan pengambil kebijakan, tetapi juga para kepala sekolah bertanggung jawab dengan kemampuan inovatif yang dimiliki untuk membuat perubahan kepada yang lebih baik dalam kinerja sekolahnya. Memang manajemen dan kepemimpinan yang fokus pada perubahan terbaik memang harus dibumikan pada setiap sekolah.

C. Keniscayaan dalam Membenahi Pendidikan

Dewasa ini sedang terjadi perubahan yang massif dalam sistem kehidupan sosial. Karena itu kecenderungan perubahan paradigma tentang kecerdasan, pembelajaran dan cara menangani anak seirama dengan perkembangan aspek lain, seperti perkembangan informasi, transportasi, kesehatan dan lainnya.

Dijelaskan oleh Daft (2010:308) bahwa ada empat isu penting berkenaan dengan manajer dalam perkembangan kontemporer, yaitu:

- 1) Orang-orang yang benar menjadi lebih kompetitif atas perkembangan global,
- 2) Orang yang benar bagi peningkatan kualitas, inovasi dan pelayanan pelanggan,
- 3) Orang yang benar untuk mengisi usaha merger, dan akuisisi,
- 4) Orang yang benar untuk melaksanakan teknologi informasi baru bagi bisnis berbasis jaringan.

Keempat isu penting tersebut akan menentukan keperluan perusahaan, atau berbagai lembaga atas pengembangan keterampilan para pegawai. Itu artinya, sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional memang harus mampu mempersiapkan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik sebagai pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pendidikan yang baik hanya mungkin dikelola dengan cara yang baik, dan oleh orang-orang yang memiliki komitmen mutu pendidikan yang terbaik pula.

Kualitas pendidikan nasional perlu terus ditingkatkan yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari program pembangunan nasional sehingga dapat menghasilkan modal manusia yang berkualitas tinggi. Bagaimanapun, modal manusia (*human capital*) merupakan manusia yang bernilai ekonomi, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan para pegawai sebagai sumberdaya manusia bagi bangsa (Daft, 2010:309).

Perubahan lingkungan strategis yang luar biasa dahsyatnya itu akan menjadi tantangan baru, yang tidak bisa dijawab dengan cara-

cara manajemen yang lama. Manajemen dan organisasi lama hanya cocok untuk untuk zaman lama, sedangkan zaman baru menuntut manajemen dan organisasi yang lebih adaptif pada kebutuhan lingkungan yang baru. Oleh karena itu, diperlukan adanya cara pandang yang baru dalam melihat keseluruhan faktor yang bisa mendukung proses inovasi dalam sebuah organisasi (Ancok, 2012:58).

Sejarah jugalah yang telah menunjukkan bahwa pengelola pendidikan bangsa ini terlalu banyak berbuat kesalahan yang sebagian besar bersumber dari sikap ketidakpedulian, ketidakpahaman, dan sebagian lagi ketidakmampuan. Dalam banyak hal kesalahan itu timbul dari gabungan tiga sumber kesalahan tersebut, *indeference, ignorance, incompetence*. Itulah sebabnya dengan menghargai semua usaha yang telah dirintis para pengelola di masa lalu, kita tetap kembali lagi pada sebuah titik awal yang kritis, awal segala kegagalan, sebagai terekam di sepanjang sejarah, perubahan demi perubahan hanya menghasilkan kesemuan. Perubahan yang satu hanya mampu menyalahkan perubahan yang lain (Surachmad, 2009:148).

Kemudian Tilaar (2002:6) menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional sebagai satu organisasi haruslah bersifat dinamis, flkesibel sehingga dapat menyerap perubahan-perubahan yang cepat antara lain karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan masyarakat menuju masyarakat yang semakin demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Lebih jauh Surachmad (2009:134) menjelaskan dalam rangka pembaharuan pendidikan nasional, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Meletakkan seluruh visi dan konsep pendidikan di atas falsafah pendidikan dan landasan konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
- 2) Mengembangkan pendidikan nasional sebagai kekuatan moral yang menyangkut segenap aspek kehidupan seluruh komponen bangsa,
- 3) Memperkuat pola dan pengelolaan pendidikan nasional secara bersistem, di pusat maupun di semua daerah,

- 4) Menciptakan strategi dan praksis pendidikan yang memanusiakan manusia sepanjang masa,
- 5) Mengembangkan potensi pendidikan sebagai potensi kebudayaan dan peradaban bangsa yang berakhlak mulia,
- 6) Menciptakan pendidikan nasional sebagai kekuatan pendidikan yang mengindonesiakan bangsa dalam rangka mengembangkan kekuatan berkonteks setempat maupun kekuatan berdimensi kesejagatan.

Perubahan pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah di banyak negara berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa kasus, tapi tidak semua perubahan-perubahan ini dikaitkan dengan pengenalan manajemen diri (*self management*) terhadap organisasi-organisasi pendidikan. Di sebagian besar negara, terdapat suatu kecenderungan terhadap akuntabilitas yang berkaitan dengan inspeksi/bentuk evaluasi eksternal lainnya (Bush dan Coleman, 2012:237).

Lebih lanjut dijelaskan Bush dan Coleman (2012) perubahan juga bisa muncul dari inovasi internal yang didasarkan pada perspektif strategis. Perubahan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan dan memerlukan suatu periode tertentu agar stabil. Bahkan perubahan muncul dari sumber-sumber yang beranekaragam, semuanya bertujuan agar bertahan dalam lingkungan yang kompetitif yang terus meningkat.

Perubahan bisa berasal dari eksternal maupun internal. Oleh karena itu, untuk terjadi dan munculnya perubahan, maka diperlukan manajemen yang efektif sehingga dapat mengelola perubahan/inovasi. Pemimpin perlu menciptakan suasana, struktur dan proses yang memungkinkan adanya ide-ide baru yang bisa diterima dan diimplementasikan demi kepentingan pelajar dan siswa dalam dunia pendidikan. Pemimpin juga dituntut bisa menentukan prioritas serta memiliki ide tentang bagaimana memunculkan inisiatif baru.

Perubahan strategis bisa ditandai dengan skala waktu dan cakupan luasnya. Perubahan internal yang terjadi juga harus konsisten dengan prioritas yang teridentifikasi melalui perencanaan strategis meskipun asumsi-asumsi rasional semacam itu tidak selalu ada dalam organisasi-organisasi yang kompleks seperti sekolah maupun perguruan tinggi.

Tegasnya, kemampuan memecahkan masalah secara inter-disipliner sangat diperlukan untuk suatu pembaharuan bidang pendidikan. Karena itu kemampuan memecahkan masalah secara interdisipliner memberikan kemampuan nyata kepada setiap lembaga untuk mengembangkan program pendidikan yang secara teoritis dan empiris berorientasi kepada dinamika pembangunan yang sedang berlangsung dalam masyarakat, baik lokal, nasional, regional maupun global (Buchori, 1994:58).

Dalam konteks perubahan bidang pendidikan yang mencerminkan inovasi, ada beberapa isu penting yang perlu dikemukakan, yaitu:

- 1) Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak; “suatu realitas yang selalu ada”
- 2) Pengalaman perubahan sering kali membosankan.
- 3) Mendefinisikan kriteria sukses bagi perubahan adalah suatu hal yang sukar dipahami
- 4) Perubahan yang berhasil dalam dunia pendidikan memerlukan waktu
- 5) Perubahan sering ditentang oleh *network* internal dan eksternal melalui proses-proses politis
- 6) Proses-proses kebersamaan yang akrab diperlukan untuk mempromosikan “kepemilikan tapi ini dapat digantikan dengan mekanisme politis
- 7) Kesulitan-kesulitan implementasi kesuksesan parsial adalah sebuah persoalan kebangsaan

Hal yang tidak mungkin dispekulasi oleh penulis adalah tentang pengalaman perubahan anda, tapi setidaknya anda bisa menangani fenomena tersebut sebagaimana diidentifikasi banyak ahli. Sikap kelompok-kelompok kepentingan yang menolak perubahan, khususnya dalam organisasi besar, sangat familiar bagi beberapa pendidik.

Sesuatu yang baru adalah langkah perubahan yang makin bertambah. Pembaharuan yang dahulu, memerlukan usaha yang tiada putusya dilakukan oleh beberapa generasi sekarang dapat terlaksana oleh suatu generasi saja. Dari dasawarsa yang satu ke dasawarsa yang lain, manusia dihadapkan kepada alam fisik, intelektual dan moral yang mengalami

perubahan sedemikian besarnya sehingga penafsiran masa lampau tidak memenuhi kebutuhan (Lengrand, 1970:2).

Sejatinya, tindakan manajemen strategis sangat menentukan banyak perubahan kehidupan, apalagi perubahan organisasi dalam berbagai manifestasinya. Perubahan organisasi, tentu saja sangat terkait dengan masalah manajemen dan kepemimpinan yang merancang perubahan organisasi dalam wujud perubahan struktur, perubahan orang, maupun perubahan teknologi yang berimplikasi munculnya pembaharuan/inovasi dalam kehidupan manusia.

Walaupun setelah problematik dari manajemen strategis dan perubahan, penelitian tentang perspektif strategis merupakan hal yang sangat penting. Sifat reaktif terhadap berbagai peristiwa yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal berarti membiarkan organisasi tertinggal di belakang pesaing-pesaingnya. Dalam sebuah lingkungan kompetitif yang terus meningkat, berbagai organisasi termasuk bidang pendidikan bisa jadi akan mengalami stagnasi dan bahkan kemunduran. Perubahan bisa saja tidak enak dan manajemen strategis yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan menjadi sulit ditetapkan dan tidak menentu, tapi perubahan tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan memberikan harapan yang baik bagi siapa saja yang mau meresponnya.

Dijelaskan oleh Danim (2002:145) bahwa pakar pendidikan dan administrasi pendidikan cenderung sependapat bahwa kemajuan besar dalam bidang pendidikan hanya mungkin dicapai jika administrasi pendidikan itu sendiri dikelola secara inovatif. Dengan begitu, inovasi atau pembaharuan dalam bidang administrasi pendidikan mengalami keterlambatan. Keterlambatan itu berarti menunda proses pemaparan lembaga menuju efektivitas efisiensi kelembagaann pendidikan, baik pengelolaan sumberdaya manusianya, fasilitas maupun proses belajar-mengajar secara keseluruhan.

Sementara perubahan dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari: (1) pergeseran paradigma dari *teaching* kepada *learning*, atau dari pengajaran kepada pembelajaran, (2) perubahan dari pemahaman mono-kecerdasan kepada multi kecerdasan anak, (3) pergantian pusat pembelajaran dari berpusat kepada guru kepada berpusat kepada anak didik,

(4) pergantian pola mengajar deduktif kepada induktif, dan (5) perubahan dari verbal kepada tindakan (Suyatno, 2009:15).

Dalam pendapat lain dijelaskan Coombs (1978) dalam Danim (2002) dikemukakan bahwa revolusi dalam bidang pendidikan (*educational revolution*) harus diawali dengan revolusi dalam bidang administrasi pendidikan. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan harus dikelola dengan administrasi yang inovatif (*innovatve administration*), mengingat sekolah yang dikelola dengan administrasi yang inovatif akan mampu menampung dinamika perkembangan yang terjadi di luar sistem pendidikan, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat. Hal ini dikarenakan inovasi administrasi pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemapanan unsur-unsur yang terkait langsung dengan proses pendidikan dan aplikasi kurikulum yang berfokus pada pendidikan anak, seperti guru, fasilitas, keuangan, hubungan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat (*school public relation*), perencanaan pengembangan sekolah, dan lain-lain.

Bagaimanapun inovasi selalu memiliki fokus yang menjadi tantangan utama kepemimpinan di manapun tempat dan kapanpun masanya. Pada masa kini kita hidup dalam satu era dengan perubahan cepat dan evaluasi yang mengharuskan para pemimpin bekerja secara berkelanjutan untuk membangun kemampuan bagi perubahan yang juga bersifat berkelanjutan, adaptasi yang cepat dengan jaminan nilai yang mendorong perubahan baru terjadi. Para manajer harus mengakui kemampuan personil organisasi bahwa mereka mampu mengadaptasi dan melakukan inovasi.

Menurut Drucker *Foundations* (2001:11), kemampuan manusia untuk menemukan dan menciptakan adalah bersifat universal. Para ilmuan berusaha meneliti berbagai spesies dan fenomena alam yang menghasilkan ilmu dan mendorong penciptaan teknologi. Sesungguhnya inovasi teknologi selama ini sudah mampu memudahkan kehidupan manusia sepanjang sejarah peradaban.

Lebih lanjut Drucker mendefinisikan bahwa inovasi sebagai perubahan yang menciptakan satu dimensi baru dari kinerja. Karena itu, hambatan masa kini perubahan yang menjadi tantangan utama yang dihadapi para pemimpin.

Perubahan atau pembaharuan dalam bidang pendidikan, baik sistemik maupun parsial sering dipahami sebagai proses inovasi. Karena itu, inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu juga muncul tatkala orang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan.

Pembaharuan (inovasi) sangat diperlukan bukan saja dalam bidang teknologi, tetap juga dalam segala bidang termasuk bidang pendidikan. Pembaruan pendidikan diterapkan di dalam berbagai jenjang pendidikan juga dalam setiap komponen sistem pendidikan. Sebagai pendidik yang harus mengantisipasi perubahan melalui berbagai inovasi, maka para perencana harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi-inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal menuju perwujudan sumberdaya manusia yang berkualitas unggul.

Berbicara tentang revolusi pendidikan berarti berbicara tentang upaya mengantarkan anak manusia untuk dapat hidup layak dalam lingkungan masyarakatnya yang kondusif masa akan datang. Tetapi seringkali pendidikan justru menyebabkan manusia terasing dari lingkungannya, karena kurang tepatnya arah dan proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan. Seperti halnya terjadi dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dewasa ini. Kurikulum berorientasi pada isi (*content*) yang selama ini digunakan telah mengarahkan proses pendidikan pada pengembangan kemampuan kognitif yang tidak seimbang dengan pengembangan kemampuan pada aspek lain seperti afektif, psikomotorik, dan kreativitas serta terlepas dari lingkungan, sehingga manusia yang dihasilkan tidak mampu hidup layak dan tidak kreatif dalam lingkungan kehidupannya. Selain itu, pendidikan kurang mampu mengembangkan potensi (*human capacity*) yang dimiliki individu secara optimal, tetapi lebih pada pengembangan manusia sebagai suatu sumberdaya yang harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pada zaman globalisasi sekarang ini, mulailah suatu kebangkitan dan perubahan pemikiran manusia untuk memberikan suatu kontribusi yang sangat diperlukan oleh orang-orang modern dalam menjawab segala tantangan zaman dalam berbagai sektor, seperti dalam revolusi pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks ini kita dapat meng-

akses setiap perubahan di dalam dunia pendidikan yang ada sekarang ini merupakan bentuk ketidakpuasan orang-orang pra modern dalam mengembangkan pengetahuannya dan dalam memahami segala sesuatu objek kajian yang dibutuhkan oleh manusia sekarang ini. Tidak jarang perubahan baru dapat mempengaruhi pola dan tingkah laku manusia untuk menuju kepada suatu kesempurnaan yang terus digali secara berkelanjutan.

Pembaharuan dalam bidang pendidikan merupakan suatu karakter dunia modern. Hal tersebut pada dasarnya berkisar pada persepsi bahwa pendidikan merupakan menara gading dan pelopor pembaharuan. Segi kognitif pendidikan tetap mendapat prioritas yang tinggi dalam proses pendidikan, namun masalah integrasi proses dan hasil belajar dengan kehidupan yang nyata dengan masa depan semakin meminta penekanan-penekanan baru, khususnya kurikulum pendidikan, seyogyanya dirancang untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang merangsang peningkatan kreativitas, intelektualitas, dan daya analisis (Yusuf, 2009:54).

Menurut Suyatno (2009:21) dalam melakukan inovasi pendidikan di sekolah maka diperlukan tersedianya guru-guru inovatif. Sikap kreatif guru inovatif ditandai dari:

- 1) Keterbukaan terhadap pengalaman baru
- 2) Kelenturan dalam berpikir
- 3) Kebebasan dalam ungkapan diri
- 4) Menghargai fantasi
- 5) Minat terhadap kegiatan kreatif
- 6) Kepercayaan terhadap gagasan sendiri
- 7) Kemandirian dalam memberikan pertimbangan sendiri”.

Di sisi lain Irianto (2011:113) menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pendidikan mencakup:

- 1) Dapat tidaknya seseorang lulus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi
- 2) Dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan
- 3) Besarnya penghasilan/gaji yang diterima
- 4) Sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya dan politik.

Inovasi juga merembes dalam dunia pendidikan. Pemimpin yang mampu mengelola keanekaragaman karyawan dengan baik akan menumbuhkan inovasi dalam perusahaan, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Keanekaragaman latar belakang, budaya dan pengalaman yang berbeda dari para karyawan, akan menjadi sumber inovasi kalau bisa dikelola dengan baik. Masing-masing karyawan akan berlomba-lomba untuk memunculkan keunikan diri mereka masing-masing. Keunikan yang beraneka ragam itu dapat menjadi sumber inovasi yang tak ternilai harganya.

Sikap pemimpin yang peduli atas kebutuhan psikososial masing-masing karyawan, dan memperlakukan setiap karyawan sesuai dengan kebutuhan dan keunikan mereka masing-masing akan membuat karyawan termotivasi untuk memberikan hal yang terbaik yang ada pada diri mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh De Jong & Hartog (2007) menemukan adanya 13 jenis perilaku pemimpin yang memacu munculnya inovasi. Ketiga belas perilaku itu terkait dengan pemunculan (*idea generation*) dan penerapan ide (*application*) inovasi. Perilaku-perilaku tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberi contoh perilaku inovatif. Pemimpin memberikan contoh perilaku bagaimana mencari peluang, mengeluarkan gagasan, dan menjadi teladan dalam penerapan sebuah gagasan inovatif
2. Memberikan rangsangan intelektual. Mengundang bawahan untuk memberikan gagasan dan mengajak mereka untuk mengevaluasi cara kerja yang sekarang sedang berlaku untuk melihat kemungkinan untuk diperbaiki.
3. Mengundang karyawan berbagi pengetahuan. Pemimpin menunjukkan komunikasi yang terbuka dan transparan, mengajak karyawan berkomunikasi dalam suasana informal di lingkungan kerja
4. Memberikan arahan visi. Pemimpin secara jelas mengomunikasikan visi yang terkait dengan peran karyawan dalam berinovasi dan jenis inovasi yang diharapkan, serta memberikan arahan tentang kegiatan atau tindakan untuk mencapai visi tersebut.

5. Memberi konsultasi. Mendiskusikan bersama karyawan setiap perubahan yang akan berpengaruh kepada mereka, mengakomodasi gagasan dan saran karyawan dalam mengambil keputusan tentang sesuatu yang terkait dengan inovasi
6. Mendelegasikan. Pemimpin memberikan otonomi yang cukup pada karyawan agar mereka bisa mandiri dalam mengerjakan pekerjaannya.
7. Mendukung inovasi. Memberi perhatian, mendukung gagasan inovatif, bersifat sabar atas gagasan, selalu mencari jalan agar pemberi gagasan bisa mengatasi masalah yang timbul.
8. Memberikan umpan balik (*feedback*) yang positif pada gagasan tahapan awal implementasi inovasi, serta meminta opini konsumen untuk mengetahui mereka pada kegiatan inovasi.
9. Pengakuan. Pemimpin menunjukkan apresiasinya pada kinerja inovatif. Dengan memberikan pengakuan ini, karyawan secara intrinsik merasa menemukan sesuatu yang membahagakan dirinya.
10. Memberikan Hadiah (*reward*) untuk kegiatan inovatif, baik berupa uang maupun barang.
11. Memberikan dukungan fasilitas, berupa uang dan waktu serta peralatan yang diperlukan untuk berinovasi
12. Memonitor kegiatan inovatif. Pemimpin memonitor apakah tindakan inovasi itu efisien dan efektif, serta mengecek apakah karyawan merasa gembira atau lelah
13. Memberikan penugasan. Pemimpin memberikan tugas yang menantang dan kesempatan (waktu dan lain-lain) bagi karyawan untuk mewujudkan komitmennya pada tugas (Ancok, 2012).

Kini dunia pendidikan telah berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah, apalagi di dalam dunia yang terbuka luas. Begitu fenomena dunia modern dalam era globalisasi. Epistema ekonomi menguasai pemikiran pendidikan. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah sesuai dengan standar, terutama yang telah ditentukan oleh epistema ekonomi. Lahirlah epistema standarisasi pendidikan yang harus

dicapai oleh output lembaga-lembaga pendidikan berupa kompetensi-kompetensi (Tilaar, 2006:12).

Begitupun ada tiga tantangan utama dunia pendidikan di Indonesia, yaitu:

Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, maka dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai.

Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten agar dapat bersaing dalam pasar kerja global.

Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman kebutuhan/keadaan daerah peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat (Uno, 2009:133).

Berdasarkan tiga tantangan utama tersebut, maka sistem manajemen pendidikan nasional perlu menata ulang kebijakan pembaharuan pendidikan yang fokus pada pencerdasan, pemberdayaan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia bangsa Indonesia. Paling tidak ada lima fokus utama inovasi pendidikan nasional, yaitu: (1) Memantapkan visi, misi, dan tujuan strategis pendidikan nasional dengan evaluasi yang komprehensif atas kekuatan dan kelemahan pendidikan nasional dewasa ini, (2) Memperkuat komitmen para perancang, dan pelaksana kebijakan pembaharuan pendidikan dengan mempertinggi kolaborasi pada tingkat perancangan dan pelaksanaan program, sekaligus pada tataran evaluasi dan monitoring sehingga dapat dieliminasi segala macam penyimpangan, (3) Mengikis dominasi politik praktis atas program dan kebijakan desentralisasi pendidikan, sehingga pendidikan ditempatkan di atas semua program pembangunan nasional, (4) memperbaiki sistem rekrutmen dan memaksimalkan pengembangan sumberdaya manusia pendidik dan tenaga kependidikan dengan benar-benar memperhatikan profesionalisme, kredibilitas, kapabilitas dan akuntabilitas kependidikan, (5) meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah secara internal dan eksternal termasuk

implemntasi pembelajarana berbasis jaringan melalui penerapan MBS dengan fokus perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Hanya dengan pendidikan yang inovatif, maka diharapkan percepatan kemajuan bangsa dapat dicapai, dengan fokus pada perbaikan pendidikan berkelanjutan. Dengan demikian, para calon pendidik, dan pendidik dalam jabatan yang melaksanakan praktik kependidikan nasional perlu memahami dasar, tujuan, formulasi, dan pengembangan pendidikan sebagai wujud dari inovasi pendidikan yang antisipatif. Jangan sampai pendidikan nasional tertinggal dari bangsa lain, sebab jika hal ini terjadi, atau pendidikan yang tidak tercerahkan maka nasib anak bangsa akan terus tertinggal. Kemajuan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang maju pula dengan fokus kepada peserta didik sesuai dengan kemajuan zaman global dewasa ini.

Inovasi pendidikan nasional bukan hanya berkenaan dengan perubahan gedung sekolah, dan fasilitas daya dukung pembelajaran. Justru inovasi pendidikan yang akan dikaji berkenaan dengan inovasi kurikulum, manajemen dan kepemimpinan, serta kebijakan dalam pembelajaran dan profesionalisme guru. Fokus inovasi sebagaimana dikemukakan ini menjadi bagian penting dari kajian inovasi pendidikan bagi para guru, peminat dan pengkaji pentingnya pendidikan yang cerdas dan tercerahkan yang berpangkal pada guru-guru dan tenaga kependidikan yang inovatif.

BAB II

KONSEP DASAR INOVASI

A. Pengertian Inovasi

Istilah “inovasi” merupakan kata yang menarik dalam manajemen pada tiga dasawarsa belakangan. Para pimpinan bisnis dan politisi dalam memenangkan persaingan selalu menggunakan istilah inovasi atau perubahan radikal sebagai jargon kompetisi dan perjuang bisnis dalam kiprahnya.

Menurut para ahli sebagaimana diungkapkan dalam kamus dapat dialihbahasakan bahwa “*innovation*” dipahami sebagai “penggantian cara-cara yang lama dengan cara baru”, sedangkan *Innovator* adalah pembawa cara-cara baru” demikian pendapat Miraza Cs, (1972:183) yang dikemukakan oleh Asy’ari (tt:70) dalam Muhammad Rusli Karim. Tegasnya suatu “pembaharuan, perubahan baru”, berarti inovasi. Karena itu istilah “*Innovator* adalah dipahami sebagai “penemu cara baru, atau “pembaharu”.

Istilah inovasi, perubahan dan pembaharuan seringkali dipakai secara silih berganti untuk menjelaskan tentang inovasi. Berdasarkan studi *Center for Educational research and Innovation* tahun 1973 sudah didefinisikan bahwa menunjukkan sesuatu tindakan yang baru dalam organisasi dan kehidupan manusia. Dalam hal ini inovasi sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sengaja untuk meningkatkan praktik dalam mencapai tujuan dan selanjutnya dinyatakan suatu pembaharuan adalah suatu inovasi dari suatu sistem dalam skala yang luas (Junius Mauegha, 1982: 89).

Kemudian dijelaskan bahwa inovasi (*Innovation*) adalah upaya memperkenalkan berbagai hal yang baru dengan maksud memperbaiki

apa-apa yang sudah terbiasa demi timbulnya praktik yang baru baik dalam metode ataupun cara-cara bekerja untuk mencapai tujuan (Wijaya, 1992:9).

Secara singkat inovasi dimaksudkan sebagai “pembaharuan”, baik berupa idea atau gagasan, kelakuan atau benda, sebagaimana dinyatakan bahwa: *“An innovation is here defined as any thought, behavior, or thing that is new because it is qualitatively different from existing forces”* demikian pendapat Barnett, (1953:7) sebagaimana dikutip oleh Asy’ari (tt:70).

Pendapat lain dari Kluchnikov (1976) sebagaimana dikemukakan Mauegha (1982:90) membedakan antara perubahan, inovasi dan pembaharuan, yaitu:

1. Perubahan, adalah; mempunyai arti yang sangat luas dan tidak selalu harus berarti suatu peningkatan. Istilah ini mempunyai konotasi baik dengan kemajuan maupun dengan kemunduran.
2. Inovasi, berhubungan dengan pendidikan diinterpretasikan sebagai peningkatan dari teknik pendidikan yang relatif bersifat sebagian atau fragmentaris. Jadi secara umum hal ini terbatas pada perluasan dan peningkatan teknik pendidikan yang ada dan tidak mutlak harus bertentangan secara fundamental dengan praktik yang ada.
3. Pembaharuan, istilah ini juga berhubungan dengan peningkatan yang secara umum dapat meliputi beberapa aspek inovasi tetapi yang berkelanjutan.

Dapat tercapai. Para ahli mengungkapkan berbagai persepsi, pengertian, interpretasi tentang inovasi seperti Kennedy (1987), White (1987), Kouraogo (1987) memberikan berbagai macam definisi tentang inovasi yang berbeda-beda. Dalam hal ini, penulis mengutip definisi inovasi yang dikatakan oleh White (1987:211) yang berbunyi: *“Inovation ... more than change, although all innovations involve change.”* (inovasi itu ... lebih dari sekedar perubahan, walaupun semua inovasi melibatkan perubahan).

Untuk mengetahui dengan jelas perbedaan antara inovasi dengan perubahan, dapat diketahui dari definisi yang diungkapkan oleh Nichols

(1983:4), “*Change refers to “ continuous reapraisal and improvement of existing practice which can be regarded as part of the normal activity ...while innovation refers to ... Idea, subject or practice as new by an individual or individuals, which is intended to bring about improvement in relation to desired objectives, which is fundamental in nature and which is planned and deliberate.”*

Nichols menekankan perbedaan antara perubahan (*change*) dan inovasi (*innovation*) sebagaimana dikatakannya di atas, bahwa perubahan mengacu kepada kelangsungan penilaian, penafsiran dan pengharapan kembali dalam perbaikan pelaksanaan pendidikan yang ada yang dianggap sebagai bagian aktivitas yang biasa.

Sedangkan inovasi menurutnya adalah mengacu kepada ide, obyek atau praktik sesuatu yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang yang bermaksud untuk memperbaiki tujuan yang diharapkan.

Kemudian Drucker (1990:1 dan 11) berpendapat bahwa inovasi adalah sebagai perubahan yang menciptakan dimensi baru kinerja”. Sesungguhnya harus diakui bahwa manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menciptakan sesuatu untuk pembaharuan”. Selanjutnya menurut Rogers dan Shoemaker (1987:26) inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Tidak menjadi soal, sejauh dihubungkan dengan tingkah laku manusia, apakah ide itu betul-betul baru atau tidak jika diukur dengan selang waktu sejak digunakannya atau ditemukannya pertama kali.

Dalam konteks lain inovasi adalah pengenalan cara-cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasikan input menjadi output sehingga menghasilkan perubahan besar dalam perbandingan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan atau pengguna (Fontana, 2009: 22).

Dari beberapa pendapat di atas, jelaslah bahwa inovasi adalah memperkenalkan ide baru atau barang baru, pelayanan baru dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ini tentu saja inovasi biasanya berhubungan dengan kreativitas manusia. Bahkan hakikat inovasi atau *innovation* berasal dari kata *to innovate* yang mempunyai arti yaitu membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru.

Sa'ud (2011:4) menyimpulkan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat). Hal yang baru itu dapat berupa invensi atau *discovery*, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah.

Inovasi diartikan “penemuan” yang kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik berupa *discovery* maupun *invention* untuk mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam inovasi tercakup *discovery* dan *invention*.

Kata kunci lainnya dalam pengertian inovasi adalah yang baru. Hamijoyo dalam Wijaya dkk (1992:6) menjabarkan bahwa kata “baru” diartikan sebagai apa saja yang belum dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh si penerima pembaharuan, meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi, yang lebih penting dari sifatnya yang baru adalah sifat kualitatif yang berbeda dari sebelumnya. Makna kualitatif berarti bahwa inovasi itu memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali dalam bidang yang mendapat inovasi.

Saat ini manusia berada di tengah-tengah samudera hasil inovasi. Ada inovasi: pengetahuan, teknologi, *ICT*, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Inovasi dapat dikelompokkan pula atas inovasi besar dan inovasi kecil-kecil, namun sangat banyak wujudnya. Begitu pula, inovasi itu tidak harus mahal. Proses pencapaian hasil inovasi itu dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kalau leluhur manusia ini tidak inovatif, maka manusia semuanya akan tetap tinggal di gua-gua, dalam kegelapan dan tanpa busana, apalagi memiliki kendaraan yang super canggih, seperti pesawat terbang dan mobil-mobil terkini.

Bagaimanapun, setiap inovasi adalah satu ide atau konstelasi ide, yang menurut kodratnya hanya dalam organisasi sentral, dalam tata pikir yang bersifat rohaniah. Inovasi akan tampak nyata jika telah menjadi kelakuan, tindakan atau sesuatu barang yang dihasilkan sebagai konsekuensi inovasi yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam organisasi dan atau masyarakat tertentu.

Inovasi adalah perubahan yang direncanakan, yang bertujuan untuk memperbaiki praktik menuju keadaan yang lebih baik. Tegasnya inovasi adalah sesuatu yang baru, yang membuat terciptanya suasana baru karena adanya cara baru untuk memenuhi kebutuhan manusia (Ancok, 2011:3).

Lebih jauh dijelaskan Ancok (2011) pemilihan istilah inovasi bukan suatu kebetulan. Kita dapat saja memilih istilah untuk menunjukkan inovasi dengan menggunakan kata-kata seperti pekerjaan pengembangan, pengembangan sekolah, perubahan pendidikan atau reformasi. Demi menghindari makna konotatif yang sudah melembaga dalam bidang pendidikan tradisional, maka dapat dipilih istilah inovasi. Dengan demikian kita dapat berada pada posisi yang lebih bebas untuk memberikan isi dan makna yang mandiri kepada istilah tersebut. Lebih jauh, inovasi adalah kata menginternasional yang telah merambah ke bahasa Norwegia dengan sangat cepat dalam berbagai bidang profesional dan keorganisasian. Tentu saja penting untuk ditekankan di sini bahwa perubahan pada praktik yang ada harus didasarkan atas fondasi profesionalisme dan tingkat keahlian yang tinggi dalam bidang yang bersangkutan.

Sesungguhnya kata kunci dalam inovasi adalah “perubahan”. Ide, gagasan, pemikiran untuk perubahan yang dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan semua bidang kehidupan untuk menjadi lebih baik sebagai makna utama inovasi. Perubahan dapat terjadi secara kebetulan dan tidak sistematis, tetapi agar perubahan dapat disebut sebagai inovasi, perubahan tersebut harus mengandung unsur kesadaran dan perenungan yang kuat. Di sinilah kata “perencanaan” digunakan. Ini berarti bahwa para perancang perubahan harus tahu apa yang ingin diubah, mengapa dan bagaimana cara mengubahnya. Dengan kata lain para pembaharu juga harus tahu ke mana arah yang akan dituju atau dengan kata lain: pembaharu harus memiliki sasaran yang sudah ditetapkan secara jelas. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa manusia dituntut secara mutlak untuk merencanakan setiap langkah dalam perubahan itu sebelumnya. Tuntutan semacam ini akan sulit untuk dipenuhi.

Inovasi dalam bidang arsitektur yang khas Indonesia juga bisa ditemui dalam wujud berbagai candi yang sudah dibangun oleh nenek moyang bangsa di tahun 700-900-an tanpa ada bantuan teknologi canggih

seperti derek pengangkut, alat potong dan semen perekat seperti di zaman modern. Sangat menarik bahwa candi-candi tersebut relatif masih tetap utuh sampai sekarang. Hal tersebut bisa disaksikan pada berbagai tempat seperti kompleks candi Pandawa di dataran tinggi Dieng, candi Brobudur, Prambanan dan Kalasan dan beberapa candi lain seperti candi Muara Takus, Gedong Songo, serta candi-candi di berbagai tempat lainnya. Sesungguhnya nenek moyang bangsa Indonesia memang jenius karena mampu menghasilkan produk yang merupakan salah satu keajaiban dunia, yaitu candi Brobudur (Ancok, 2011:7).

Dalam konteks ini maka dapat saja kajian tentang hakikat inovasi berhenti di sini dan dapat diajukan definisi inovasi sebagai suatu “perubahan yang direncanakan”. Namun, agar perubahan itu mempunyai tujuan, penting untuk mengaitkannya pada sesuatu hal, dan haruslah sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Inovasi adalah mengenai suatu “perubahan yang direncanakan”, yang bertujuan untuk “memperbaiki”. Unsur lain yang tercakup dalam definisi ini adalah praktik. Alasan untuk memberi penekanan pada tindakan praktik adalah bahwa hal ini merupakan bagian yang sangat penting dari proses perubahan. Transisi dari ide atau rencana menjadi realitas, dari solusi yang terpersepsi menjadi solusi yang diimplementasikan sering kali merupakan bagian yang tersulit. Setiap orang dapat memikirkan dan menggambarkan suatu perbaikan, tetapi mengubah ide menjadi realitas itu lebih sulit dan memerlukan kemampuan lebih banyak.

Ketua Mao menyatakannya seperti ini “Sebuah revolusi memerlukan pekerjaan tindak lanjut selama 500 tahun”. Dengan kata lain, mengubah ide-ide menjadi kenyataan merupakan tugas yang rumit dan perlu waktu. Banyak upaya untuk inovasi dihentikan sebelum mencapai realitasnya. Oleh karena itu, harus juga menjadi tujuan bahwa inovasi harus memiliki konsekuensi praktis yang bertahan lama. Baiknya sebuah ide tidak cukup untuk menjamin bahwa perubahan akan terjadi.

Pribadi kreatif sering mengetahui hal yang original, pemikiran terbuka, rasa ingin tahu, fokus pada pemecahan masalah, sabar, bersikap rilek dan bekerja sepenuhnya, dan penerimaan terhadap gagasan baru. Kreativitas juga dirancang dalam organisasi. Perusahaan dan departemen, yang ada dalam perusahaan dapat diatur untuk menjadi kreatif, dan

memiliki gagasan untuk perubahan. Banyak perusahaan ingin pegawainya lebih kreatif dan sering memelihara mendengarkan kreativitas individu. Sementara individu hanya bagian dari cerita, dan setiap orang dari kita memiliki sejumlah potensi dan kreativitas. Para manajer bertanggung jawab bagi menciptakan satu lingkungan kerja yang membolehkan kreativitas tumbuh subur (Daft, 2011:280).

Istilah inovasi sangat umum digunakan dalam literatur untuk menggambarkan perubahan dan perbaikan dalam organisasi dan atau sistem. Kata tersebut jarang dipergunakan dalam kaitannya dengan individu. Definisi inovasi sebagai suatu perubahan yang direncanakan, yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik atau cara kerja, memunculkan hubungan tertentu yang problematik. Pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah: perbaikan dilakukan itu untuk siapa? Ini merupakan hal yang penting dalam semua pekerjaan pengembangan dan perbaikan.

Inovasi bermula dari seseorang dengan kecerdasan yang cukup untuk memahami kebutuhan baru dan menghasilkan metode baru, produk, atau pelayanan untuk mencapai kebutuhan tersebut (Canter dan Drucker, 1990:74). Keberadaan inovasi akan dapat membawa perubahan kebudayaan dan peradaban umat manusia (Asy'ari dalam M. Rusli karim, tt:73). Dalam banyak inovasi, perubahan akan mengarah pada perbaikan bagi sebagian orang, sedangkan untuk sebagian lain mungkin tidak relevan, dan untuk pihak ketiga perubahan itu justru dapat mengarah pada memburuknya situasi. Mereka yang menjalankan bisnis inovasi (para inovator) harus menyadari hal ini dan mempertimbangkan fenomena tersebut.

Inovasi yang berhasil adalah mengandung arti tidak saja keberhasilan keberhasilan ekonomi melainkan juga keberhasilan sosial. Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang menciptakan nilai lebih besar untuk konsumen, untuk komunitas dan untuk lingkungan pada saat yang sama (Fontana, 2009:18).

Perusahaan berinovasi untuk menciptakan relasi antara nilai guna dan harga (nilai moneter) yang lebih tinggi atas produk yang dihasilkannya bagi konsumen (*consumers*) dan atau pengguna (*users*) yang ditargetkan yang pada akhirnya produk tersebut tidak hanya akan bermanfaat bagi

konsumen dan atau pengguna tetapi juga bagi produsen (Fontana, 2009: 21).

Dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah pembaharuan dalam ide, gagasan dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Karena itu, inovasi yang dilakukan individu dan kelompok masyarakat atau bangsa berkenaan dengan perubahan kualitatif dalam perwujudan kebudayaan manusia yang termanifestasikan pada berbagai bidang dan aspek kehidupan.

B. Antara Penemuan, Pengembangan, dan Penyebaran

Berbicara mengenai inovasi (pembaharuan) mengingatkan semua orang pada istilah *invention* dan *discovery*. Untuk melakukan inovasi diperlukan kekuatan manajemen dan kepemimpinan yang inovatif, karena memang napas manajemen dan kepemimpinan menciptakan situasi yang baru dan lebih baik dari keadaan sebelumnya dalam organisasi.

Berinovasi memerlukan manajemen. Maka manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengevaluasi tujuan dan pencapaian tujuan perusahaan secara efisien, efektif termasuk di sini adalah melakukannya dengan cara etis dan melihat inovasi dalam perspektif sistem bahwa setiap bagian dan elemen inovasi baik yang ada di dalam maupun di luar organisasi saling bergantung (Fontana, 2009:21).

Sesungguhnya *Invention* adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Itu artinya berasal dari hasil karya manusia. Dalam hal ini *Discovery* adalah penemuan sesuatu (benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan sebagai usaha menemukan karya baru atau benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan (usaha) yang disebut *invention* dan *discovery*. Dalam kaitan inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode atau hasil karya yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Tegasnya, bahwa inovasi dapat berupa hasil dari *invention* atau *discovery*.

1. *Invention* (Penemuan)

Sesungguhnya kata *Invention* meliputi penemuan-penemuan/penciptaan tentang suatu hal yang baru. Seperti kata pepatah “tak ada yang baru di muka bumi ini”, *invention* biasanya merupakan adaptasi dari apa yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan kadang-kadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya (Wijaya, dkk, 1992:10). Sebagai contoh penemuan terhadap abjad pelajaran yang pertama oleh seorang *inventor* James Pitman.

Sedangkan *invention* (invensi) yang dalam kamus didefinisikan sebagai menciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Contoh *invention* adalah penemuan Thomas Alva Edison (1847-1931), yaitu penemuan perekam suara elektronik, penyempurnaan mesin telegram yang secara otomatis mencetak huruf mesin, mesin piringan hitam, dan pengembangan bola lampu pijar.

Dalam banyak penjelasan bahwa *Discovery* mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu telah ada sebelumnya, tetapi belum diketahui. Sedangkan “invensi” adalah penemuan yang benar-benar baru sebagai hasil kegiatan manusia. Secara harfiah *to discover* berarti membuka tutup. Artinya sebelum dibuka tutupnya, sesuatu yang ada di dalamnya belum diketahui orang. Sebagai contoh perubahan pandangan dari *geosentrisme* menjadi *heliocentrisme* dalam astronomi. *Nicolaus Copernicus* memerlukan waktu bertahun-tahun guna melakukan pengamatan dan perhitungan untuk menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya. Bulan berputar mengelilingi matahari dan bumi. Kemudian planet-planet lain juga berputar mengelilingi matahari. Kesalahan besar yang dilakukannya adalah bahwa keyakinannya bahwa semua planet (termasuk bumi dan bulan) mengelilingi matahari dalam bentuk lingkaran. Penemuan ini menggugah *Tycho Brahe* melakukan pengamatan lebih teliti terhadap gerakan planet. Data pengamatan kemudian membuat Johannes Kepler akhirnya mampu merumuskan hukum-hukum gerak planet yang tepat. Penemuan ketiga tokoh tersebut merupakan “*discovery*”.

Sesungguhnya sebagian pengamat lebih cenderung menganggap beberapa perangkat keras (*hardware*) seperti belajar terprogram dan

mesin mengajar sebagai *invention* ketimbang ide-ide atau praktik-praktik pengajaran kependidikan yang baru. Pada gilirannya, inovasi tidak hanya dalam bidang manajemen dan ekonomi, akan tetapi menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia.

Tempat terjadinya *invention* bisa saja di dalam maupun di luar sekolah. Kebanyakan pembaharuan dari tipe *hardware* berasal dari luar sekolah. Sebaliknya, banyak *invention* yang terjadi di dalam sekolah ketika para guru berupaya untuk mengubah situasi atau menciptakan cara-cara baru untuk memecahkan cara-cara lama. Pembaharuan pada tingkat ruang kelas semacam ini biasanya berskala kecil dan tidak tinggi atau, dengan kata lain, sangat sederhana, namun pada waktunya sesuatu yang baru akan disistematisasikan dan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Pembaharuan yang merupakan bahan pelajaran akan dipraktikkan, dan yang merupakan prinsip pengajaran akan disistematisasikan. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda seperti penerbit, biro pengembangan kurikulum, atau *in-service training* (Wijaya, 1992:10).

Dengan bertolak dari pendapat di atas, maka ditegaskan bahwa berbagai inovasi yang dikembangkan dalam satu organisasi atau kehidupan manusia didasarkan atas dorongan pemecahan masalah, dan kreativitas manusia sebagai makhluk berbudaya sehingga menghasilkan keuntungan dan kemajuan. Itu artinya, implementasi ide, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dari kreativitasnya merupakan sesuatu hal yang manusiawi, dan khas masalah kehidupan manusia sehinggalah mendatangkan keuntungan dan kemajuan kebudayaan.

2. Development (Pengembangan)

Dalam konteks kebudayaan, dan kegiatan pengembangan Wijaya (1992:11) menjelaskan bahwa pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk kedalam dimensi skala besar. *Development* sering sekali bergandengan dengan riset sehingga produser “*research dan development*” (R dan D) adalah yang biasanya digunakan dalam pendidikan. *Research dan development* meliputi berbagai aktivitas, antara lain riset dasar, seperti pencarian dan pengujian teori-teori belajar. Riset ini mengetengahkan proses pengembangan bahan-bahan kurikulum yang baru. Beberapa elemen pengembangan kurikulum ialah tim ahli

penulis program kurikulum, sekolah-sekolah percobaan tempat bahan-bahan disiapkan untuk diujicobakan, dan desain riset evaluatif dibuat untuk menilai keefektifan berbagai pembaharuan kurikulum.

3. Diffusion (Penyebaran)

Konsep *diffusion* sering kali digunakan secara sinonim dengan konsep *dissemination*, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda satu dengan lain. Definisi *diffusion* menurut Roger (1962) adalah “penyebaran suatu ide baru dari sumber *invention*-nya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir”. Kalau istilah *diffusion* adalah netral dan betul-betul memaksudkan penyebaran suatu pembaharuan, *dissemination* digunakan di sini untuk menunjukkan suatu pola difusi yang terencana, yang di dalamnya beberapa biro (*agency*) mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin agar suatu pembaharuan akan mencapai jumlah pengadopsi (penyerapan pembaharuan) paling banyak (Wijaya, 1992:12).

Menurut Roger (1962) ada beberapa ciri suatu pembaharuan yang relevan untuk diterima, yaitu:

- 1) Secara relatif lebih menguntungkan daripada praktik atau kebiasaan yang sudah ada.
- 2) Sepadan dengan nilai-nilai yang ada dan pengalaman potensi adopsi masa lalu.
- 3) Tidak terlalu rumit.
- 4) Disesuaikan dengan daya serap adopter, atau dapat didemonstrasikan pada suatu basis tertentu.
- 5) *Adopter-adopter* awal (*early adopter*), bila dibandingkan dengan adopter-adopter yang mengikuti kemudian (*late adoption*), tampaknya lebih muda usia, menampilkan fungsi yang lebih terspesialisasi, merespons terhadap sumber-sumber informasi yang lebih impersonal, berani dalam mengemukakan opini.
- 6) Secara relatif pengaruh personal diri orang-orang terkemuka lebih kuat bagi yang mengikuti kemudian.

C. Karakteristik Inovasi

Hakikat inovas adalah sebagai suatu gagasan dan praktik yang baru dalam kehidupan manusia. King dan Anderson (1995) menjelaskan ciri inovasi, mencakup: (1) suatu inovasi adalah hasil yang dapat dilihat, proses atau hasil dalam suatu organisasi. Suatu gagasan baru yang memiliki titik permulaan bagi suatu inovasi, (2) suatu inovasi harus merupakan suatu latar sosial baru yang diperkenalkan terhadap kelompok kerja, bidang atau seluruh organisasi, (3) suatu inovasi harus bertujuan bukan sekedar bersifat sesaat. Jika suatu pabrik mengurangi produksinya hal itu karena akan mempengaruhi terhadap peralatan, staf dan bukan merupakan suatu inovasi, (4) suatu inovasi bukan merupakan perubahan rutin. Perjanjian dengan anggota staf baru yang berpindah atau diberhentikan, tidak berkenaan dengan perubahan atau inovasi.

Bagaimanapun keberadaan inovasi merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, produksi barang-barang, yang dapat diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Dengan kata lain inovasi adalah pembaruan sebagai penemuan yang diadakan untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan mencapai keuntungan atau kemajuan. Contoh paling gampang “alat berhitung” yang dahulunya dipakai kerikil, atau lidi kelapa, kemudian berubah menjadi sempoa selanjutnya berkembang pula kalkulator.

Inovasi dapat menjadi positif atau negatif. Inovasi positif didefinisikan sebagai proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan mencapai keuntungan. Inovasi negatif sesuatu kreativitas dan penemuan baru yang menyebabkan pelanggan enggan untuk memakai produk tersebut karena tidak memiliki nilai tambah, merusak cita rasa dan mengakibatkan kepercayaan pelanggan hilang.

Menurut Rogers dan Shoemaker (1987:26) kebaruan dalam inovasi itu diukur secara subjektif, menurut pandangan individu yang menangkapnya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi (bagi orang itu). Dalam hal ini “baru” dalam ide yang inovatif tidak berarti harus baru sama sekali.

Dari contoh di atas, tampak bahwa inovasi memiliki beberapa ciri. Adapun ciri-ciri suatu inovasi yang dikemukakan oleh Rogers adalah sebagai berikut:

- 1) *Adanya keuntungan relatif*, yaitu sejauh mana satu inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau dari faktor sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Dengan semakin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya inovasi. Dalam hal ini penggunaan kompor gas yang lebih hemat telah memberikan keuntungan pada banyak pihak.
- 2) *Bersifat “kompatibel”*, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Misalnya penyebaran penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut maka tentu saja penyebaran inovasi akan lambat, bahkan terhambat.
- 3) *Bersifat “kompleksitas”*, yaitu suatu inovasi memiliki tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Misalnya, penyuluh kesehatan memberitahu masyarakat pedesaan untuk membiasakan memasak air yang akan diminum. Sedangkan masyarakat tidak mengetahui tentang teori penyebaran penyakit melalui kuman yang terdapat pada air minum, tentu saja penyuluhan, ajakan atau imbauan tersebut sukar untuk diterima, sebelum penyuluh kesehatan memberikan pengarahan tentang penyebaran berbagai penyakit yang berasal dari air minum dan sanitasi yang tidak sehat.
- 4) *Bersifat “triabilitas”*, yaitu suatu inovasi yang ada apakah dapat dicoba atau tidak dalam kehidupan penerima. Suatu inovasi harus benar-benar dapat dicobakan oleh penerima. Misalnya, penyebaran secara luas penggunaan bibit unggul padi “gogo” akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat dapat mencoba dulu untuk menanam dan dapat melihat hasilnya.

- 5) Bersifat “*observabilitas*”, yaitu suatu inovasi benar-benar dapat diamati hasilnya atau keuntungannya. Karena itu inovasi harus mudah diamati hasil yang ditimbulkannya. Misalnya, untuk mengajak para petani yang tidak dapat membaca dan menulis dalam belajar membaca dan menulis. Namun tindakan tersebut tidak segera diikuti oleh para petani karena mereka tidak cepat melihat hasilnya secara nyata.

Dalam konteks ini muncul pertanyaan, bagaimana hubungan antara inovasi, modernisasi, dan teknologi? Inovasi berawal dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan dapat diterima oleh masyarakat. Penciptaan inovasi harus memiliki persepsi terhadap kebutuhan masyarakat yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang dan hidup pada satu wilayah. Istilah modern mempunyai berbagai macam arti. Pada umumnya kata modern untuk menunjukkan ke arah yang lebih baik, lebih maju dalam arti lebih menyenangkan dan lebih meningkatkan kesejahteraan hidup.

Ada banyak pendapat dari para pakar tentang pengertian modernisasi akan tetapi dapat disimpulkan bahwa modernisasi adalah perubahan sosial dari masyarakat tradisional (belum modern) ke masyarakat yang lebih maju.

Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial, perbedaannya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat, sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari yang belum maju ke arah yang lebih maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi sebagai tanda adanya modernisasi.

Untuk membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera perlu dilaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Program tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat maka program KB adalah suatu inovasi masyarakat yang sudah mau menerima ide program KB dan melaksanakannya berarti telah memenuhi ciri masyarakat modern yaitu siap menghadapi perubahan dan meninggalkan pola pikir tradisional “banyak anak banyak rejeki”.

Adanya inovasi dan modernisasi tidak terlepas dari adanya teknologi. Teknologi sering kali diartikan sebagai peralatan yang serba elektronik, seperti mesin komputer. Namun sebenarnya teknologi juga merupakan aplikasi ilmu pengetahuan yang sistematis (Salisbury, 1996:7). Dalam uraian berikut ini dapat disimak beberapa pendapat para ahli tentang teknologi: Simon yang dikutip oleh Salisbury mengemukakan, teknologi sebagai disiplin rasional yang dirancang untuk meyakinkan manusia akan keahliannya menghadapi alam fisik atau lingkungan melalui penerapan hukum atau aturan ilmiah yang telah ditentukan (Salisbury, 1996:7).

Dalam hal ini selain diartikan sebagai mesin, teknologi bisa mencakup proses, sistem manajemen dan mekanisme pemantauan; baik manusia itu sendiri atau bukan,... secara luas, cara pandang terhadap masalah berikut lingkungannya, tingkat kesukaran, studi kelayakan serta cara mengatasi masalah secara teknis dan ekonomis (Finn, 1998).

Seattler mengutip asal katanya – *techne* (bahasa Yunani), sedang makna seni, kerajinan tangan atau keahlian. Kemudian, Seattler menerangkan bahwa teknologi bagi bangsa Yunani kuno diakui sebagai suatu kegiatan khusus, dan sebagai suatu pengetahuan (Salisbury, 1996: 7).

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi:

- 1) Dapat diterjemahkan sebagai teknik atau cara pelaksanaan suatu kegiatan atau sebagai suatu proses;
- 2) Mengacu pada penggunaan mesin dan perangkat keras; Terkait dengan sifat rasional dan ilmiah;
- 3) Menunjuk suatu keahlian, baik itu seni atau kerajinan tangan dan merupakan aplikasi dan ilmu pengetahuan.

Adanya keinginan untuk menciptakan sesuatu disebut inovasi. Mewujudkan keinginan dengan menerapkan ilmu pengetahuan sehingga tercipta sebuah alat yang lebih canggih misalkan dinamakan teknologi. Masyarakat yang menerima dan menggunakan teknologi mengalami modernisasi. Dengan demikian, inovasi, teknologi, dan modernisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain bila telah melekat kepada sesuatu yang baru, dan sesuatu itu kemudian dimanfaatkan dan diterapkan pemakai.

Ukuran “baru” suatu ide atau gagasan, kelakuan atau benda yang dihasilkan adalah relatif, artinya bersifat subyektif menurut pandangan seseorang yang menangkapnya. Jika seseorang menganggap “suatu gagasan baru” artinya secara kualitatif berbeda dari kebiasaan yang ada. Dengan demikian baru dalam ide yang inovatif tidak berarti harus baru sama sekali. Setiap ide/gagasan pernah menjadi inovasi. Setiap inovasi pasti berubah seiring dengan berlakunya waktu. Komputer, pencangkokan jantung (pacu jantung) dan sebagainya mungkin dipandang sebagai inovasi di negara-negara yang berkembang atau negara yang terbelakang, tetapi suatu hal yang sudah usang menurut pandangan negara yang maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dewasa ini (Hanafi, 1981:26). Ada inovasi yang perlu disebarluaskan dan diadopsi, inovasi yang tidak cocok dengan seseorang maupun sosial, bisa mendatangkan bahaya dan tidak ekonomis. Ada inovasi yang tidak berwujud, hanya berupa ide saja, seperti ideologi, dan ada pula yang disamping ide juga mempunyai obyek fisik, misalnya traktor.

Daft (2011) mencatat ada beberapa perusahaan Inovatif Yang Terkenal di Dunia, dengan terus melakukan inovasi dalam perusahaan dan industrinya dalam perkembangan pada tahun 2008.

Ranking	Perusahaan	Negara	Bidang yang Terkenal
1	Apple	USA	Produk Baru
2	Geogle	USA	Pengalaman Pelanggan
3	Toyota Motor	Jepang	Proses Kerja
4	General Elektrik	USA	Proses Kerja
5	Microsoft	USA	Produk Baru
6	Tata Group	India	Produk Baru
7	Nintendo	Jepang	Produk Baru
8	Procter & Gamble	USA	Proses Kerja
9	Sony	Jepang	Produkl Baru
10	Nokia	Finlandia	Produk Baru

Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Karena itu, suatu inovasi dapat dimulai dengan tersedianya

peluang-peluang untuk berinovasi. Peluang-peluang ini datang dari inovasi-inovasi yang dapat ditiru ataupun dibeli dari organisasi-organisasi lainnya. Kalau saja kita mau memperhatikan dengan seksama hakikat hubungan-hubungan antar organisasi itu, maka justru adanya hubungan-hubungan ini memang dimaksudkan untuk memungkinkan membagi bersama di antara mereka ide-ide yang inovatif. Peluang-peluang untuk berinovasi pun tumbuh dari adanya pengembangan yang terencana dari organisasi yang bersangkutan, yang berusaha untuk menerapkan pengetahuan baru serta berantisipasi akan adanya inovasi-inovasi dan kebijakan-kebijakan teknologis. Selain itu ada kemajuan dalam bidang ilmiah juga merupakan peluang bagi upaya inovasi (Trimo, 1986:18).

Tegasnya inovasi adalah proses pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan yang menciptakan hal-hal baru dan berbeda dengan keadaan dan bentuk sebelumnya dalam mencapai kemajuan, kesejahteraan dan kebaikan bersama manusia sebagai formulasi kebudayaannya.

D. Pentingnya Inovasi

Dalam perspektif yang luas, inovasi muncul dalam kehidupan organisasi dengan spektrum yang luas. Organisasi harus memiliki kapasitas untuk melakukan inovasi. Kemampuan untuk berinovasi ini ditentukan oleh beberapa faktor, sebagaimana dikemukakan Trimo (1986:19), yaitu:

1. Faktor yang paling kritis adalah sumber-sumber dana; tanpa tersedianya sumber-sumber ini baik yang telah ada maupun yang dapat disediakan tidak mungkin menjalankan inovasi'
2. Faktor yang kedua ialah kesiapan kapasitas para anggota dalam organisasi tadi; dan
3. Karakteristik-karakteristik organisasi yang bersangkutan; seperti pendistribusian wewenang dalam pengambilan keputusan serta kekuatan (*regidity*) cara-cara beroperasinya organisasi yang bersangkutan.

Selain faktor di atas, keadaan organisasi yang berada dalam tekanan-tekanan juga dapat memunculkan inovasi. Tekanan-tekanan dapat berasal dari lingkungan internal organisasinya (adanya motivasi tertentu di

kalangan para anggota organisasi atau unit-unit dalam organisasi tadi) maupun dari pihak eksternal (dari kalangan *competitors*, misalnya ada produk-produk ataupun kualitas produk baru) (Trimo, 1986:19).

Inovasi jelas, penting bagi setiap kehidupan manusia dan masyarakat. Lebih-lebih di negara yang sedang membangun, sangat berkepentingan dengan inovasi. Penemuan-penemuan baru yang lebih baik bagi peningkatan mutu hidup dan kesejahteraan ummat manusia dimanapun sangat diperlukan. Bukan saja di negara-negara yang terbelakang dan sedang berkembang, di negara-negara yang sudah maju pun selalu memerlukan adanya inovasi. Ada 5 tipe inovasi menurut para ahli, yaitu:

1. Inovasi produk; yang melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat. Melibatkan peningkatan karakteristik fungsi juga, kemampuan teknis, mudah menggunakannya. Contohnya: telepon genggam, komputer, kendaraan bermotor, dsb;
2. Inovasi proses; melibatkan implementasi peningkatan kualitas produk yang baru atau pengiriman barangnya;
3. Inovasi pemasaran; mengembangkan metoda mencari pangsa pasar baru dengan meningkatkan kualitas desain, pengemasan, promosi;
4. Inovasi organisasi; kreasi organisasi baru, praktek bisnis, cara menjalankan organisasi atau perilaku berorganisasi;
5. Inovasi model bisnis; mengubah cara berbisnis berdasarkan nilai yang dianut.

Karakteristik inovasi ditentukan oleh pasar dan bisnis. Inovasi yang mengikuti kondisi, memungkinkan pasar dapat dijalankan seperti biasanya. Inovasi yang terpisah, dapat mengubah pasar atau produk. Sebagai contoh dalam penemuan barang murah, dan tiket pesawat murah. Inovasi inkrementasi (penambah) muncul karena berlangsungnya evolusi dalam berpikir inovasi, penggunaan teknologi yang memperbesar peluang keberhasilan dan mengurangi produk yang tidak sempurna. Inovasi radikal, mengubah proses manual menjadi proses berbasis teknologi keseluruhannya. Terdapat dua sumber utama inovasi, yaitu:

Secara tradisional, sumbernya adalah inovasi pabrikasi. Hal ter-

sebut karena agen (orang atau bisnis) berinovasi untuk menjual hasil inovasinya. Inovasi pengguna; hal tersebut nampak pada agen (orang atau bisnis) yang mengembangkan inovasi sendiri (pribadi atau di rumahnya sendiri). Hal itu dilakukan karena produk yang dipakainya tidak memenuhi apa yang dibutuhkan sebelumnya. Tujuan utama inovasi mencakup perbaikan kualitas kehidupan manusia supaya mencapai kehidupan lebih baik. Secara rinci tujuan inovasi, yaitu: (1) meningkatkan kualitas; (2) menciptakan pasar baru; (3) memperluas jangkauan produk; (4) mengurangi biaya tenaga kerja; (5) meningkatkan proses produksi; (6) mengurangi bahan baku; (7) mengurangi kerusakan lingkungan; (8) mengganti produk atau pelayanan; (9) mengurangi konsumsi energi; (10) menyesuaikan diri dengan undang-undang.

Dalam konteks penemuan bibit unggul padi, alat pengering gabah (biji padi), ide keluarga berencana dan lain-lain, merupakan inovasi dan mempunyai arti penting bagi kehidupan umat manusia. Demikian juga misalnya, di suatu tempat ada seseorang yang menemukan alat pengolah pohon sagu. Orang itu dengan usahanya berhasil membuat mesin cukur khusus untuk memarut pohon sagu. Kemudian ia memanfaatkan mesin (motor) yang bisa dipakai oleh para pelayan untuk menjalankan perahunya, dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menggerakkan alat cukur tadi. Dengan alat tersebut, ia gunakan untuk memarut sagu, sehingga tidak perlu lagi bersusah payah menokok pohon sagu untuk memperoleh tepungnya yang dijadikan bahan makanan seperti cara tradisional. Dengan penemuannya itu banyak tenaga dan waktu yang bisa dihemat, dan produksi dapat ditingkatkan. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut lama kelamaan diikuti oleh tetangganya dan bahkan orang-orang dari tempat atau desa lain. Penemuan tersebut dapat menghemat tenaga dan meringankan beban petani. Sebab dengan cara lama, sebatang pohon sagu yang ditokok oleh tiga orang, baru selesai dalam dua hari dengan kerja hampir 12 jam sehari. Tetapi dengan mesin cukur tersebut sebatang pohon sagu dapat dicukur dalam waktu delapan jam saja oleh tenaga seorang diri. Tampaklah betapa besar manfaat dan arti pentingnya inovasi bagi kehidupan umat manusia.

Di dunia ini sudah sangat banyak penemuan-penemuan baru yang sangat berharga bagi kehidupan umat manusia. Tetapi penemuan-

penemuan tersebut, betapa baiknya, tidak akan berarti jika tidak tersebar dan dimanfaatkan oleh sebagian besar warga masyarakat.

Orang yang terus berusaha menggali agar penemuan inovasi-inovasi yang lain yang lebih baru, yang lebih baik dan mengembangkannya, serta berusaha terus untuk menemukan yang lebih baik lagi. Tujuan penggalian dan penemuan inovasi tersebut tentunya dengan harapan agar dapat merubah dunia ini, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, lebih menyenangkan dan mengenakan bagi kehidupan umat manusia. Tentu saja disamping adanya inovasi dan penemuan-penemuan baru yang lebih baik lagi, penyebaran dan pemanfaatan yang seluas-luasnya bagi ummat manusia mutlak diperlukan.

Penyebaran ide-ide baru ditengah-tengah masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi sebaliknya sering merupakan persoalan yang rumit. Masalah bagaimana mengkomunikasikan ide baru agar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat pun dapat menghasilkan inovasi pula. Dengan demikian suatu inovasi akan jalin menjalin menjadi suatu mata rantai yang panjang hingga sampai dimanfaatkan oleh anggota masyarakat.

Inovasi akan membawa kepada perubahan sosial. Baik perubahan yang bersifat positif dalam arti membawa kepada hal-hal yang lebih baik, maupun sebaliknya dapat membawa pengaruh yang bersifat negatif, yang mungkin dapat merugikan anggota masyarakat sendiri. Lebih jauh lagi akan dapat membawa perubahan kebudayaan dan peradaban ummat manusia.

E. Faktor Pendorong Inovasi

Inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik atau obyek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Oleh sebab itu, inovasi pada dasarnya merupakan pemikiran cemerlang yang bercirikan hal baru ataupun berupa praktik-praktik tertentu ataupun berupa produk dari suatu hasil olah-pikir dan olah-teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang timbul dan mem-

perbaiki suatu keadaan tertentu ataupun proses tertentu yang terjadi di masyarakat.

Setiap orang dapat berperan sebagai innovator, bahkan juga sebagai inventor. Ada anggapan umum yang dipercayai, bahwa pada dasarnya manusia itu kreatif. Orang umumnya akan menangkis atau membantah dan melawan pernyataan bahwa manusia itu berwatak pemalas, makhluk yang puas, yang harus dipaksa ke dalam pemikiran ide baru (Barnett, 1953:17). Karena hasrat mencipta (kreatif) itulah menyebabkan orang berusaha, dan kemudian menemukan sesuatu yang baru sama sekali dan ada juga yang berupa, pembaharuan atas sesuatu yang telah ada. Hal semacam ini terdapat dimana-mana. Baik di masyarakat yang masih sederhana (primitif) maupun yang modern, di desa, kota ataupun di negara besar.

Banyak penemuan pada masa lampau yang hilang tidak kita warisi lagi, tetapi kemudian kita menemukan hal-hal seperti narkotika, minuman keras, obat-obatan dari ramuan tumbuh-tumbuhan, zat-zat perekat alamiah yang sebenarnya telah ada pada dunia primitif.

Ancok (2012:58) mengemukakan bahwa kajian yang dilakukan oleh para pakar tentang faktor yang merupakan pendorong inovasi telah banyak dilakukan. Amabile (1998) dan Mumford dan Gustafson (1998) menemukan bahwa kepemimpinan adalah salah satu faktor utama pengungkit inovasi. Selain itu, faktor struktur dan proses organisasi berupa jejaring kerja sama dalam organisasi (*intraorganizational network*) dan kemampuan belajar organisasi (*organizational learning*) juga menentukan terjadinya inovasi (Tsai, 2001). Ada beberapa faktor lain yang juga berpengaruh pada inovasi, yakni: lingkungan kerja yang kondusif dan kreatif (Amabile, 1998); kompleksitas pekerjaan dan tipe pengawasan yang diterapkan dalam perusahaan (Oldham & Cumming, 1996), budaya dan iklim organisasi (Mumford & Gustafson, 1998). Tentu saja ada ciri penting lainnya yang harus dimiliki sebuah organisasi inovatif yang berkinerja hebat, yakni adanya orang yang hebat sebagai perencana dan pelaksana kegiatan organisasi (Collins, 2002).

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa banyak pakar yang membicarakan masalah inovasi yang beberapa perangkat pendukung munculnya inovasi. Pada umumnya, para pakar sependapat bahwa proses inovasi

itu memerlukan akumulasi pengetahuan. Sebuah organisasi yang berbasis pada pengetahuan memerlukan adanya modal yang mendukung kinerja organisasi. Kehadiran modal dan akhirnya memunculkan berbagai inovasi yang mendukung kinerja keuangan perusahaan (*financial performance*). Kinerja keuangan ini disebabkan oleh kemampuan organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang inovatif yang disertai oleh pelayanan prima terhadap pelanggan sehingga mau membeli produk dan jasa dan memiliki loyalitas pada produk dan jasa.

Pendorong lainnya untuk inovasi disamping sifat kreatif yang ada secara kodrati, oleh Barnett disebutkan secara terperinci, dapat digolongkan dalam tiga hal penting, yaitu: (1) Keinginan-keinginan yang dari dalam sendiri, (2) Keinginan atau kebutuhan yang bergantung dengan pihak lain, dan (4) Kehendak untuk berubah.

Seperti telah disebutkan, inovasi akan berarti jika menyebar dan diadopsi (dimanfaatkan) oleh sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. Pada dasarnya inovasi baru dapat diketahui oleh pihak lain, jika ide atau gagasan baru tersebut dikomunikasikan dengan pihak lain sehingga tersebar di masyarakat.

Penyebaran inovasi akan melibatkan beberapa unsur penting sebagaimana menjadi unsur pokok dalam komunikasi, yaitu: (1) adanya inovasi itu sendiri, (2) adanya pihak (orang atau lembaga) yang tahu tentang inovasi tersebut, (3) adanya pihak lain yang belum tahu tentang adanya inovasi tersebut, (4) Ada media komunikasi (Hanafi, 1980:24).

Di samping unsur pokok di atas perlu dipertimbangkan pula, diperlukannya tenggang waktu dalam proses difusi, serta kondisi masyarakat atau system sosial setempat yang akan menerima dan memerlukan inovasi tersebut. Sasaran yang akan dikenalkan dengan inovasi bisa berupa individu, kelompok atau masyarakat secara luas. Dengan diketahuinya sistem sosial setempat, seperti bagaimana sistem pemerintahannya, organisasi kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan serta tokoh-tokoh yang berperan, akan menunjang keberhasilan penyampaian inovasi sehingga masyarakat dapat menerima atau tidak. Melalui pimpinan masyarakat baik pimpinan format maupun informal, inovasi dapat disalurkan dan diharapkan dapat cepat diterima sehingga akhirnya disebarluaskan kepada anggota masyarakat untuk diadopsi.

Media komunikasi bisa berupa media massa dan menggunakan saluran interpersonal, tergantung kepada tujuan penyampaian inovasinya. Jika tujuannya sekedar diketahui oleh khalayak, maka media massa sangat tepat, tetapi jika tujuannya agar sasaran menyetujui adanya inovasi dan kemudian mengadopsinya, maka *interpersonal contact* mungkin akan lebih tepat.

Kemudian Ancok (2012:59-62), berpendapat bahwa secara garis besar ada tiga komponen modal organisasi yang mendukung inovasi, yakni: (a) Modal Manusia (*uman Capital*), (b) Modal Kepemimpinan (*leadership Capital*), (c) Modal Struktural (*Structural Capital*).

a. Modal Manusia

Penggerak keunggulan perusahaan adalah manusia menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Teknologi tidak berarti apa-apa tanpa adanya manusia yang berkualitas yang mengoperasionalkannya. Peningkatan nilai perusahaan (*market value*) bisa sampai 20 kali lipat nilai asset perusahaan (*book value*) karena kehadiran para pekerja yang sangat kompeten mengelola perusahaan. Hasil survei di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terjadi kenaikan peran manusia yang luar biasa terhadap perusahaan dibandingkan dengan peran aset perusahaan yang bersifat fisik terhadap kinerja perusahaan. Pada tahun 1982, hanya 38% kontribusi faktor manusia terhadap kinerja perusahaan, sedangkan pada tahun 2000 terjadi kenaikan drastis menjadi 85% untuk kontribusi manusia pada kinerja perusahaan (Kaplan & Norton, 2000).

Pribadi kreatif sering mengetahui hal yang orijinal, pemikiran terbuka, rasa ingin tahu, fokus pada pemecahan masalah, sabar, bersikap rileks dan bekerja sepenuhnya, dan penerimaan terhadap gagasan baru. Kreativitas juga dirancang dalam organisasi. Perusahaan dan departemen, yang ada dalam perusahaan dapat diatur untuk menjadi kreatif, dan memiliki gagasan untuk perubahan. Banyak perusahaan ingin pegawainya lebih kreatif dan sering memelihara mendengarkan kreativitas individu. Sementara individu hanya bagian dari cerita, dan setiap orang dari kita memiliki sejumlah potensi dan kreativitas. Para manajer bertanggung jawab bagi menciptakan satu lingkungan kerja yang membolehkan kreativitas tumbuh subur (Daft, 2011:280).

Organisasi yang inovatif harus memiliki manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sejak awal perusahaan sudah harus selektif dalam memilih pekerja, agar perusahaan dapat menghasilkan banyak inovasi. Ada berbagai komponen modal manusia yang akan menjadi penunjang inovasi, yakni modal kreativitas, modal intelektual, modal emosional, modal sosial modal ketabahan, modal moral, dan modal kesehatan.

Menurut pendapat Collin (2002) dalam buku “*Fom Good to Great*”, salah satu persyaratan utama untuk menjadi perusahaan yang hebat (*great company*) adalah rekrutmen pekerja yang baik yang menjadi *human capital* bagi organisasi. Dalam pandangan penulis, ada tujuh aspek moral manusia yang mendukung inovasi. *Pertama* adalah modal kreativitas yang melekat pada diri individu yang menghasilkan banyak gagasan baru. *Kedua* adalah modal intelektual yang diwujudkan dalam luasnya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan proses belajar terus menerus. Selain kreativitas individu pekerja, sumber inovasi juga dapat diperoleh dari akumulasi pengetahuan yang dimiliki pekerja. Modal yang *ketiga* adalah modal emosional yang ditandai oleh kemampuan pekerja untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Modal emosional membuat suasana kerja menjadi sangat enak karena emosi yang selalu positif dapat memicu munculnya gagasan inovatif yang akan dihargai oleh rekan sekerja maupun atasan. Yang *keempat* adalah modal yang sosial yang berupa *network* kerja sama pekerja yang didasari oleh rasa saling percaya. Modal sosial yang baik akan memungkinkan peningkatan pengetahuan (*knowledge ecquisition*) melalui proses berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*). Modal sosial menjadi pengungkit berkembangnya modal intelektual. Yang *kelima* adalah modal keuletan (*adversity*) yang wujudnya adalah ketabahan pekerja dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Inovasi menuntut kerja keras dan ketabahan pekerja dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Inovasi menuntut kerja keras dan ketabahan dalam menghadapi hambatan dalam proses berinovasi. Tidak ada inovasi yang datangnyatiba-tiba. Inovasi menuntut kerja keras dan kecerdasan. Yang *keenam* adalah modal moral dan integritas. Inovasi menuntut adanya orisinalitas. Oleh karena itu, kejujuran harus dimiliki agar pekerja tidak mencuri gagasan orang lain secara mentah-mentah, tanpa diolah dengan kemurnian gagasan sendiri. Yang *ketujuh* adalah modal kesehatan. Kesehatan fisik adalah wadah yang mendukung

semua modal lainnya. Di kala badan manusia sakit, maka proses berfikir dan bekerja seseorang juga menjadi terganggu. Dalam badan yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Ini pepatah lama yang sering diperdengarkan dalam kehidupan manusia.

b. Modal Kepemimpinan

Pekerja yang memiliki modal manusia yang baik, hanya akan memunculkan kemampuannya secara maksimal kalau dipimpin oleh pemimpin yang baik. Pemimpin yang bisa memacu tumbuhnya inovasi dalam perusahaan adalah pemimpin yang berpandangan jauh ke depan (*visioner*), maupun untuk mensinergikan berbagi unit, divisi, an sumber daya yang ada dalam organisasi (*sinergistik*) serta menggerakkan orang-orang dalam organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai semua (*transformasional*).

Karakteristik Orang dan Organisasi Yang Kreatif

Individu Yang Kreatif	Organisasi Yang Kretaif
1. Kemahiran Konseptual; pemikiran terbuka	a. Jaringan Komunikasi yang Terbuka; memiliki hubungan dengan sumber luar; b. Teritori yang luas, gagasan lintas disiplin, sistem pemberian saran, curah pendapat, penyegaran, diskusi
2. Bersifat Orijinal/ kemurnian	a. Penugasan orang-orang yang tidak spesialis untuk memungkinkan mengatasi masalah; mendengarkan sumber luar tentang zona menyenangkan
3. Kurang Kewenangan; independen; dan percaya diri	a. Desentralisasi; kehilangan posisi; kehilangan kontrol
4. Peran sepenuhnya; penjakakan yang tidak disiplin dan rasa ingin tahu	a. Kebebasan untuk memilih dan mengejar pemecahan masalah; kuatnya budaya; bekerja nyata; kebebasan mendiskusikan gagasan; horizon waktu yang lama
5. Kesabaran; keteguhan tekad/komitmen; dan pendekatan terfokus/ terpusat	a. Alokasi sumberdaya kepada personil kreatif dan proyek tanpa sistem pembayaran, imbalan segera untuk mendorong inovasi dan tanggung jawab penuh

Karakteristik di atas menjelaskan peluang munculnya inovasi dari kreativitas individu dan organisasi. Dijelaskan Daft (2010) bahwa seorang manajer baru dapat memberikan inspirasi orang-orang yang dikelolanya menjadi lebih kreatif dengan memberikan peluang untuk menjajaki gagasan dari luar tugas pokok mereka serta menguatkan mereka pelaksanaan pekerjaan dan menerima risiko. Dengan memiliki pemikiran terbuka dan keinginan mendengarkan terhadap berbagai pemikiran gila dan membiarkan orang-orang mengetahui hal tersebut dibolehkan membuat kesalahan.

Seorang pemimpin dapat menjadi pembunuh berdarah dingin untuk sebuah gagasan inovatif. Pemimpin yang otoriter seringkali tidak mau menjadi pendengar yang baik bagi gagasan pekerja. Kalaupun dia mau mendengar gagasan bawahannya, nuansanya sangat negatif yakni selalu mencari kelemahan gagasan bukan melihat sisi positifnya. Perilaku inovatif dalam perusahaan akan berkembang pesat kalau pemimpin bersifat apresiatif terhadap setiap gagasan. Betapapun anehnya gagasan yang dimunculkan pekerja, pemimpin perlu menghargainya. Sifat apresiatif pemimpin ini akan memotivasi orang untuk berinovasi. Berdasarkan teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bass & Avolia (2007), diyakini bahwa seorang pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk menginspirasi pekerja (*inspirational motivation*).

Pemimpin yang inspirasional mengajak orang untuk memajukan perusahaan melalui gagasan inovatif agar perusahaan menjadi perusahaan terbaik yang memberi manfaat pada semua lapisan yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, pemimpin transformasional selalu merangsang orang untuk berpikir (*intellectual stimulation*) dan mencoba gagasan baru. Sifat seperti ini akan membuat pekerja rajin mencari inovasi baru. Ciri lain dari pemimpin transformasional adalah dia menjadi suri teladan dalam perilaku inovasi (*idealized influence*), sehingga pekerja tergerak untuk berinovasi karena telah diberi contoh pimpinannya. Dalam budaya masyarakat Indonesia, keteladanan sang pemimpin sangat penting bagi karyawan. Jika pimpinannya inovatif, lebih besar kemungkinan pekerjanya juga akan menjadi inovatif. Ciri keempat dari pimpinan transformasional adalah peduli pada pekerja secara personal (*individual consideration*). Berinovasi menuntut tersedianya sumber daya (*resources*) seperti waktu,

fasilitas kerja, dan dunia. Pemimpin yang peduli dengan kebutuhan sumber daya ini akan memacu pekerja untuk berinovasi.

Menurut Hersey & Blanchard (1988), seorang pemimpin harus memperlakukan pengikutnya sesuai kematangan si pengikut (*follower maturity*). Kematangan si pengikut ditentukan oleh tingkat kompetensi dan motivasi yang dimilikinya. Faktor motivasi dalam diri si pengikut menjadi faktor penentu apakah pekerjaan akan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Walaupun seseorang karyawan memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas, tetapi apabila dia tidak punya motivasi untuk melakukan pekerjaan, maka pekerjaan tersebut tidak akan dilakukannya. Pemimpin harus dapat memastikan apakah memiliki kompetensi dan kemauan/motivasi untuk melakukan pekerjaan. Ada empat tipe kepemimpinan yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan kematangan karyawannya, yakni: *Couching/Selling*, *Participating*, *Delegating*, dan *Telling*. Gaya *Couching/Selling* dilakukan bila karyawan yang dipimpin belum memiliki kompetensi untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Seorang pemimpin bertindak sebagai pelatih. Gaya kepemimpinan *participating* diterapkan pada karyawan yang memiliki kompetensi dan bisa melakukan pekerjaan, tetapi dia tidak memiliki kemauan melaksanakan pekerjaan karena kurang yakin. Gaya kepemimpinan *delegating* diterapkan bila karyawan memiliki kompetensi dan motivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan hasil baik. Pemimpin mendelegasikan tugas pada karyawan karena karyawan bisa melaksanakan sendirian. Gaya kepemimpinan *telling* dilakukan pada karyawan yang tidak punya kompeten dan tidak punya motivasi. Pemimpin harus memberi perintah secara rinci tentang bagaimana pekerjaan harus dilakukan.

Konsep kepemimpinan situasional yang dikemukakan oleh Hersey dan Blandchard ini sebenarnya sudah ada dalam budaya Indonesia. Seorang pemimpin yang baik menurut pandangan Ki hadjar Dewantara adalah pemimpin melakukan tiga hal, yakni: *ing ngarso sung tulodo*, *ing madyo mangun karso*, *tut wuri handayani*. Seorang pemimpin harus menjadi pelatih/guru yang mengajari pengikutnya bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan (*ing ngarso sung tulodo*). Seorang karyawan belum memiliki kompetensi untuk menghasilkan sebuah produk inovatif, sang pemimpin harus menjadi guru yang mengajarkan bagaimana cara menghasilkan produk inovatif. Peran guru menjadi seorang pelatih (*coach*)

bagi pengikutnya. Kalau pengikut sudah memiliki kompetensi dan dia tahu bagaimana melakukan pekerjaan, tetapi tidak mempunyai rasa percaya diri bahwa dia bisa melaksanakan pekerjaan tersebut, maka pemimpin harus memotivasi pengikutnya dengan cara memberikan konseling agar timbul kompeten dalam dirinya untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Peran pemimpin dalam konteks ini adalah melakukan peran *ing madyo mangun karso*. Kalau pengikut sudah memiliki kompetensi, sudah memiliki motivasi dan percaya diri bahwa dia bisa mengerjakan pekerjaan, maka tugas pemimpin adalah mendelegasikan tugas dan memberdayakan karyawannya (*empowerment*). Peran ketiga inilah yang disebut *tut wuri handayani*. Konsep *coaching*, *counseling*, dan *empowerment* untuk membangun insan pekerja yang mandiri ternyata sudah lama dan dalam khasanah budaya Indonesia, yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1939, jauh sebelum konsep Barat muncul, yakni pada tahun 1980-an.

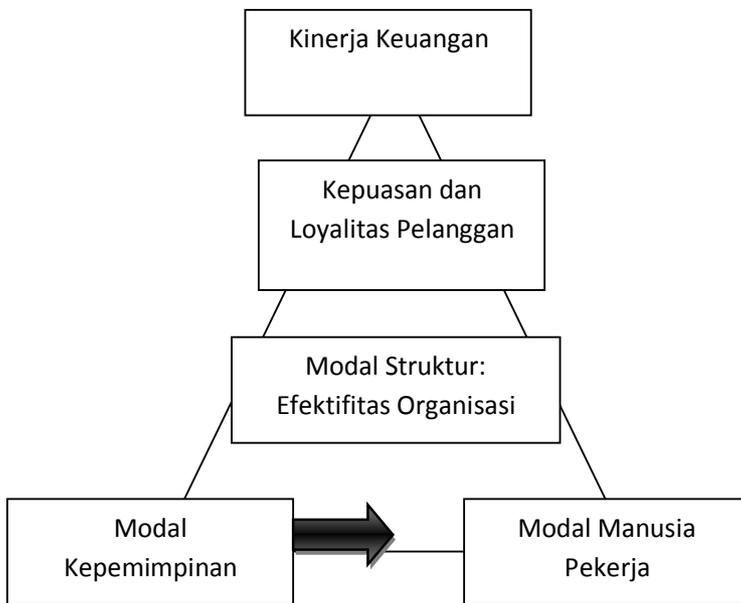
c. Modal Struktur Organisasi

Organisasi adalah wadah tempat pekerja bekerja. Organisasi berfungsi sebagai wahana yang menumbuhkan inovasi. Ibarat tumbuh-tumbuhan, bibit tanaman yang unggul baru akan maksimal hasilnya bila ditanam di lahan yang subur. Maka tanaman akan tumbuh subur dan produksi tanaman akan bagus. Namun apabila lahannya tidak subur, maka rendahlah produksi tanaman.

Cara merancang organisasi dari segi struktur dan proses bisnisnya akan menentukan apakah perusahaan akan kaya dengan inovasi. Organisasi yang kaku, terkotak-kotak, dan hierarkis akan menghambat proses inovasi sehingga tidak berjalan lancar karena harus selalu meminta persetujuan kepada atasan untuk setiap usaha inovatif. Persetujuan tidak hanya dari atasan langsung tetapi juga sering kali terjadi dari atasan beberapa level di atasnya. Struktur biasanya sangat terkait dengan sistem mengambil keputusan. Sulitnya mendapatkan persetujuan untuk memperoleh dukungan sumber daya untuk merealisasikan inovasi membuat pekerja yang inovatif frustrasi dan menghentikan inovasi yang dilakukan. Selain itu organisasi yang berkotak-kotak akan menghambat terjadinya proses penambahan pengetahuan. Selain itu, peraturan perusahaan

lebih memberikan kebebasan untuk berinovasi dengan kelenturan untuk mengeluarkan sumber daya pendukung inovasi. Desain organisasi yang tidak relevan dengan tugas yang harus dikerjakan akan menghambat proses inovasi.

Kinerja organisasi ibarat sebuah gunung es. Yang muncul dipermukaan adalah kinerja keuangan perusahaan, sedangkan pendukung munculnya kinerja keuangan tersebut berada di bawah air. Ketiga pendukung yang berada di bawah air tersebut adalah modal manusia, modal kepemimpinan, dan modal organisasi. Secara skematik hubungan antara ketiga modal ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kinerja Keuangan

Interaksi yang harmonis antara ketiga modal itu selanjutnya akan menghasilkan produk dan pelayanan yang inovatif yang memuaskan para pemangku kepentingan (*stake holders*) organisasi. Ujung dari sinergi ketiga komponen itu adalah kinerja keuangan perusahaan yang tinggi.

Karena inovasi melibatkan proses yang bermula dari kegiatan mengeluarkan gagasan, dilanjutkan dengan evaluasi terhadap gagasan,

pengembangan gagasan dan implementasi gagasan, maka diperlukan sebuah struktur organisasi yang bagus agar proses tersebut berjalan mulus. Sebab, struktur organisasi menentukan hubungan antar manusia dalam organisasi. Siapa melapor pada siapa, dan siapa berinteraksi dengan siapa. Dalam sebuah struktur organisasi, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Kehadiran pemimpin sangat diperlukan dalam proses inovasi karena pemimpin akan menentukan strategi organisasi dan membawa karyawan untuk merealisasikan strategi tersebut.

BAB III

HAKIKAT INOVASI

PENDIDIKAN

A. Pengertian Inovasi Pendidikan

Para pakar pendidikan telah banyak mengajukan definisi inovasi pendidikan. Namun disini dipaparkan beberapa pendapat tentang desfinisi inovasi pendidikan sebagai upaya dalam memahami konsep dasar inovasi pendidikan yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan.

Pada dasarnya inovasi pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya Inovasi pendidikan Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada sebelumnya), serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan (Sa'ud: 2011, 5).

Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari keadaan yang ada sebelumnya dengan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dalam pendidikan.

Tegasnya inovasi pendidikan adalah inovasi (pembaruan) dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil invensi (yang baru) atau *discovery* (mengubah yg lama) yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan.

Dari beberapa pendapat pakar di atas mengenai inovasi pendidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan.

Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek, yaitu tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses (Wijaya, 1998: 28).

Sedangkan pembaharuan pendidikan dapat merupakan perubahan yang mendasar di dalam pendidikan yang akan menyangkut baik sasaran maupun kebijakan di dalam pendidikan. Karena itu suatu pembaharuan pendidikan selalu merupakan tindakan yang bersifat politis, berdasarkan suatu landasan ideologis. Meskipun pembaharuan tidak selalu harus merupakan suatu perubahan yang besar. Jadi pembaharuan umumnya akan mempengaruhi banyak disiplin antara lain: sistem tenaga kerja, pemeliharaan kesehatan, penggunaan waktu terluang dan kemungkinan sistem perekonomian (Mauegha, 1982:91).

Inovasi pendidikan bagaimanapun harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk berubah. Apabila suatu masyarakat belum menghendaki suatu sistem pendidikan yang diinginkan maka tidak akan mungkin suatu perubahan atau inovasi pendidikan terjadi.

Dalam konteks keilmuan, inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu juga muncul tatkala orang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, karena berkenaan dengan penentuan masa depan suatu bangsa, sehingga benar-benar sangat futuristik (orientasi masa depan).

Dari pengertian inovasi pendidikan, ada beberapa istilah kunci, yaitu:

1. "Baru" dalam inovasi dapat diartikan apa saja yang belum dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh penerima inovasi, meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi, yang lebih penting dari sifatnya yang baru ialah sifat kualitatif berbeda dari sebelumnya.

2. “Kualitatif”, berarti inovasi itu memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur di dalam pendidikan. Jadi, bukan semata-mata penjumlahan atau penambahan unsur-unsur setiap komponen. Tindakan menambah anggaran belanja supaya lebih banyak mengadakan murid, guru, kelas, dan sebagainya, meskipun perlu dan penting bukan merupakan tindakan inovasi. Akan tetapi, tindakan mengatur kembali, jenis dan pengelompokan pelajaran, waktu, ruang kelas, cara-cara menyampaikan pelajaran sehingga dengan tenaga, alat, uang, dan waktu yang sama dapat menjangkau sasaran siswa yang lebih banyak dan dicapai kualitas yang lebih tinggi adalah tindakan inovasi.
3. “Hal” yang dimaksud dalam definisi terdahulu adalah meliputi semua komponen dan aspek dalam subsistem pendidikan. Hal-hal yang diperbaharui pada hakikatnya adalah ide atau rangkaian ide. Sementara inovasi karena sifatnya tetap bercorak mental, sedangkan yang lain memperoleh bentuk nyata, baik buah pikiran, metode, teknik bekerja, mengatur mendidik, perbuatan, peraturan, norma, barang dan alat.
4. “Kesengajaan” merupakan unsur perkembangan baru dalam pemikiran para pendidik dewasa ini. Pembatasan arti secara fungsional ini lebih banyak mengutarakan harapan kalangan pendidik agar kita kembali pada pembelajaran (*learning*), dan pengajaran (*teaching*) dan menghindarkan diri dari pembaharuan perkakas (*gadgeteering*).
5. “Meningkatkan Kemampuan”, mengandung arti bahwa tujuan utama inovasi pendidikan adalah kemampuan sumber-sumber tenaga, uang dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Pendeknya keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengans sebaik-baiknya.
6. “Tujuan”, yang direncanakan harus dirinci dengan jelas tentang sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai, yang sedapat mungkin dapat diukur untuk mengetahui perbedaan antara keadaan sesudah dan sebelum inovasi pendidikan dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari inovasi itu sendiri adalah efisiensi dan efektivitas mengenai

sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya (menurut kriteria kebutuhan anak didik, masyarakat dan pembangunan), dengan menggunakan sumberdaya tenaga, uang, alat dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya (Saud, 2011:6-8).

Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang baru yaitu: *Pertama “top-down model”* yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu berbagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan; seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Pendidikan dan kebudayaan selama ini. *Kedua “bottom-up model”* yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu proses penyelenggaraan dan hasil pendidikan.

B. Urgensi Inovasi dalam Pendidikan

Kemajuan teknologi dewasa ini dan di masa-masa yang akan datang terutama di bidang informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia ini menjadi sempit cakupannya. Interaksi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja menjadi semakin intensif. Demikian juga yang terjadi di Indonesia dan negara-negara di dunia globalisasi sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Pada era globalisasi, ada kecenderungan yang kuat terjadinya proses universalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu implikasi penyeragaman terlihat dengan munculnya gaya hidup global seperti: makanan, pakaian dan musik. Anak-anak kecil yang telah mengenal film-film kartun dari berbagai negara, kita yang sudah mengenal berbagai jenis makanan dari berbagai bangsa, demam mode dunia yang melanda semua negara adalah contoh nyata bahwa pengaruh global mengalir tanpa terbendung di negara kita.

Banyak hal yang perlu dicermati agar sebagai bangsa kita tidak tertinggal oleh hal-hal baru yang terjadi secara global sehingga kita

bisa beradaptasi dengan negara-negara di dunia. Di sisi lain kita juga harus punya filter yang kuat agar pengaruh globalisasi yang negatif tidak mengganggu kehidupan bangsa kita yang menjunjung tinggi budi pekerti dan memiliki budaya yang luhur. Hal ini penting agar kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat tanpa harus ketinggalan dengan negara-negara lain.

Di bidang pendidikan, peran guru untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya sangat penting dalam menentukan perjalanan generasi bangsa ini. Guru dituntut menjadi pendidik yang bisa menjembatani kepentingan-kepentingan itu. Tentu saja melalui usaha-usaha nyata yang bisa diterapkan dalam mendidik peserta didiknya. Dalam perkembangan kontemporer, dunia sedang berubah dengan sangat cepat dan bersifat global. Hal itu diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat, terutama dalam bidang komunikasi dan elektronika. Perkembangan dalam bidang ini telah mengakibatkan revolusi informasi. Sejumlah besar informasi, hampir mengenai semua bidang kehidupan dari semua tempat. Semua aspek dan kegiatan telah terhimpun, terolah, tersimpan, dan tersebar. Secara terbuka, setiap saat informasi tersebut dapat diakses, dibaca, serta disaksikan oleh setiap orang, terutama melalui internet, media cetak dan televisi (Sukmadinata, 2006:5).

Dengan begitu, perubahan adalah suatu bentuk yang wajar terjadi sepanjang sejarah peradaban. Bahkan para filosof berpendapat bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang abadi kecuali perubahan. Faktanya, direncanakan atau tidak, nampak wujud perubahan berjalan terus. Tampaknya perubahan ini merupakan sesuatu yang harus terjadi meskipun kadang-kala manusia mencoba menghindarinya. Semua perubahan akan membawa risiko, seperti halnya strategi mempertahankan struktur suatu kurikulum tanpa perubahan akan membawa bencana dan malapetaka bagi generasi muda, karena tertinggal dengan perubahan yang berjalan begitu sangat cepat. Bagaimanapun dengan mengkondisikan kurikulum dalam posisi status quo menyebabkan pendidikan tertinggal dan generasi bangsa tersebut tidak dapat mengejar kemajuan yang diperoleh melalui perubahan.

Mencermati pendapat Uno (2007:1) pendidikan sebagai suatu sistem pencerdasan anak bangsa, dewasa ini dihadapkan pada beberapa

persoalan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Pada arus global, kita sementara berhadapan dengan tantangan politik, peniadaan sekat-sekat ideologis politik, budaya, dan sebagainya. Selain itu, kita menyaksikan pesona peradaban yang disatukan oleh corak budaya yang sama, ekonomi yang sama, bahkan substansi kehidupan yang nyaris sama dengan formulasi dan fenomena globalisasi.

Revolusi informasi telah mengakibatkan dunia menjadi semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis, administratif-yuridis, politis dan sosial budaya. Masyarakat global, masyarakat teknologis, ataupun masyarakat informasi yang bersifat terbuka, berubah sangat cepat dalam memberikan tuntutan, tantangan, bahkan ancaman-ancaman baru. Pada abad sekarang ini, manusia-manusia dituntut berusaha tahu banyak (*knowing much*), berbuat banyak (*doing much*), mencapai keunggulan (*being excellence*), menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang lain (*being sociable*) serta berusaha memegang teguh nilai-nilai moral (*being morally*). Manusia-manusia unggul, bermoral dan pekerja keras, inilah yang menjadi tuntutan dari masyarakat global. Manusia-manusia seperti ini akan mampu berkompetisi, bukan saja dengan sesama warga dalam suatu daerah, wilayah, ataupun negara, melainkan juga dengan warga negara dan bangsa lain (Sukmadinata, 2006:6).

Menurut Wijaya, Dkk (1992:7) pendidikan dewasa ini menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, di antaranya:

1. Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapat pendidikan, yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai;
2. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan terus-menerus, dan dengan demikian menuntut pendidikan yang lebih lama sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup (*life long education*);
3. Berkembangnya teknologi yang mempermudah manusia dalam menguasai dan memanfaatkan alam dan lingkungannya, tetapi sering kali ditangani sebagai suatu ancaman terhadap kelestarian peranan manusiawi.

Tantangan-tantangan tersebut, lebih berat lagi dirasakan karena berbagai persoalan datang, baik di luar maupun dari dalam sistem pendidikan itu sendiri, di antaranya:

1. Sumber-sumber yang makin terbatas dan belum dimanfaatkan sumber yang ada secara efektif dan efisien;
2. Sistem pendidikan yang masih lemah dengan tujuan yang masih kabur, kurikulumnya belum serasi, relevan, suasana belum menarik, dan sebagainya;
3. Pengelolaan pendidikan yang mekar dan mantap, serta belum peka terhadap perubahan dan tuntutan keadaan, baik masa kini maupun masa akan datang;
4. Masih kabur dan belum mantapnya konsepsi tentang pendidikan dan interpretasinya dalam praktik.

Sa'ud (2011) menjelaskan keseluruhan tantangan dan persoalan tersebut memerlukan pemikiran kembali yang dalam dan pendekatan baru yang progresif. Pendekatan ini harus selalu dilalui dengan penjelajahan yang mendahului percobaan, dan tidak boleh semata-mata atas dasar coba-coba. Gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan persoalan yang tidak terpecahkan hanya dengan cara yang tradisional atau komersial. Gagasan dan pendekatan baru yang memenuhi ketentuan inilah yang dinamakan inovasi pendidikan.

Inovasi selalu dibutuhkan manusia. Begitupun yang melakukan inovasi juga manusia dengan kreativitas tinggi. Terutama dalam bidang pendidikan maka inovasi diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak hanya terbatas masalah pendidikan tetapi juga masalah-masalah yang mempengaruhi kelancaran proses pendidikan. Rosenblum & Louis (1981:1) mengemukakan alasan perlunya inovasi dalam pendidikan:

Declining enrollments, rapid changes in the existing technology and knowledge about teaching and learning processes, a continual expansion of the role of the school into new areas, and changes in the prevailing cultural preferences of both local communities and the larger society continually impel schools to inovate.

Keberadaan para pendaftar, perubahan yang cepat dalam teknologi dan pengetahuan tentang proses pengajaran dan pembelajaran, keberlangsungan ekspansi dari peranan sekolah ke dalam era baru, serta perubahan dalam kebudayaan masyarakat tentang komunitas lokal dan komunitas lebih luas secara berkelanjutan merasuki sekolah untuk melakukan inovasi.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa kata inovasi seringkali dikaitkan dengan perubahan, tetapi tidak setiap perubahan dapat dikategorikan sebagai inovasi. Rogers (1983:11) memberikan batasan yang dimaksud dengan inovasi adalah suatu gagasan, praktik, atau objek benda yang dipandang baru oleh seseorang atau kelompok adopter lain. Kata “baru” bersifat sangat relatif, bisa karena seseorang baru mengetahui, atau bisa juga karena baru mau menerima meskipun sudah lama tahu.

Lebih lanjut Rogers (1983:12-16) mengemukakan karakteristik yang dikandung oleh suatu inovasi mencakup :

- a. Adanya keunggulan relatif; sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dari gagasan sebelumnya. Biasanya tolok ukurnya adalah faktor ekonomi, sosial, kepuasan, dan kenyamanan.
- b. Kesesuaian; merujuk kepada bagaimana suatu inovasi dipandang konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman yang lalu, dan sejauh mana dapat mengatasi kebutuhan calon penerima (*adopter*)
- c. Kompleksitas; hal kompleksitas ini berkenaan dengan tingkat kesulitan suatu inovasi untuk dilaksanakan dibandingkan dengan kegunaannya. Apakah inovasi tersebut gagasannya sederhana atau sulit untuk dipahami, dan apakah tingkat kesulitan tersebut seimbang dengan kegunaannya.
- d. Trialabilitas; aspek ini berkaitan dengan bagaimana tingkat ketercobaannya. Apakah inovasi tersebut mudah untuk diuji-cobakan.
- e. Observabilitas; merujuk kepada bagaimana manfaat (hasil) inovasi dapat dilihat oleh masyarakat terutama masyarakat sasaran.

Berdasarkan batasan dan penjelasan Rogers tersebut, dapat dikatakan bahwa munculnya inovasi karena ada permasalahan yang harus diatasi, dan upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui inovasi (seringkali disebut dengan istilah “pembaharuan” meskipun istilah ini tidak identik dengan inovasi). Inovasi ini harus merupakan hasil pemikiran yang original, kreatif, dan tidak konvensional. Penerapannya harus praktis yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kenyamanan dan kemudahan. Semua ini dimunculkan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki situasi/keadaan yang berhadapan dengan permasalahan.

Uno (2006:3) menjelaskan bahwa sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma dalam menata manajemen pemerintahan, termasuk di dalamnya menata manajemen pendidikan. Dalam manajemen pemerintahan, salah satu aspek yang amat menonjol yang dapat dijadikan indikator apakah manajemen pemerintahan itu dijalankan secara otoriter atau demokratis adalah dilihat sampai seberapa jauh lokus dan fokus kekuasaan itu diaplikasikan. Di sisi lain, indikator peran rakyat atau masyarakat juga ikut menentukan tentang demokratisasi manajemen pemerintahan. Kekuasaan dan peran masyarakat amat menentukan corak dan demokrasi atau pelaksanaan sistem desentralisasi.

Sementara di dalam manajemen pendidikan, menurut Uno (2006) perlu dilihat seberapa jauh pembuatan kebijakan pendidikan itu terdesentralisasi atau terdesentralisasi. Demikian juga kita harus mengamati seberapa jauh masyarakat terlibat dan ikut berperan dalam proses pengelolaan pendidikan. Berperannya masyarakat dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan pendidikan. Dengan pengontrolan ini, pendidikan tidak akan dikesampingkan prosesnya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Menurut Danim (2006:78) pendidikan nasional harus mampu menghasilkan tiga kemampuan sekaligus, yaitu:

Pertama; kemampuan melahirkan manusia yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan nasional. *Kedua*; kemampuan untuk menghasilkan kemampuan yang dapat mengapresiasi, menikmati dan memelihara hasil-hasil pembangunan itu. *Ketiga*; kemampuan melahirkan proses pemanusiaan dan kemanusiaan secara terus menerus, menuju bangsa yang adil dan bijak, lagi cerdas dalam makna pertum-

bahan dan perkembangan, pembangunan mansyaratkan kemampuan SDM untuk membangun, memlihara, dan menyikapi secara positif hasil pembangunan. Termasuk di dalamnya adalah rasa memiliki inventaris publik dan private serta sumber-sumber lingkungan hidup, ligkungan pisik dan non pisik.

Dasar-dasar pengembangan manusia “unggul”, bermoral, dan pekerja keras” diberikan di sekolah. Selanjutnya, pengembangan berlangsung di masyarakat dan lingkungan-lingkungan pekerjaan. Sekolah tidak mampu mencetak menjadi manusia-manusia tersebut, tetapi memberikan landasan, dasar-dasar dan embrionya untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan manusia-manusia “unggul, bermoral, dan pekerja keras” berlangsung dalam proses yang lama, hampir sepanjang hayat, tetapi dasar-dasarnya diberikan dan dikembangkan dalam proses pendidikan terutama di sekolah. Itu artinya, diperlukan manusia-manusia dengan pribadi inovatif untuk perubahan sosial dalam masyarakat modern. Karena pribadi yang inovatif pula yang akan menghasilkan berbagai tindakan inovasi baik secara individual, maupun secara organisasi sehingga menghasilkan keuntungan dan kemajuan bersama dalam bangsa yang kuat. Menurut Hagen, sebagaimana dikemukakan Tilaar (2012:390), pribadi inovatif memiliki ciri sebagai berikut:

Tabel 1
Pribadi Inovatif untuk perubahan Sosial Masyarakat Modern

Sikap	Masyarakat tradisional: pribadi otoriter	Masyarakat modern: pribadi inovatif
Terhadap realitas	Menyesuaikan diri kepada pola kehidupan yang telah ditentukan oleh tradisi dan kekuasaan yang dilegitimasi-kan oleh sifatnya yang abadi dari sumber yang super-natural	Sikap menyelidiki dan manipulatif terhadap realitas, ngotot mencari sebab-sebab yang reguler yang mendasari gejala sosial dalam rangka untuk mempengaruhi dan mengontrol gejala tersebut
Persepsi terhadap peranan dalam masyarakat	Kepatuhan tanpa syarat dan penyerahan diri secara toral, sikap konformitas dan mengelak dari tanggung jawab dan tuntutan kemandirian	Mengambil tanggung jawab pribadi terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi dan sejalan dengan itu mencari solusi terbaik dan berusaha mengintrudusir perubahan

Gaya kepemimpinan	Kaku dan otoriter menuntut ekspektasi tinggi dari bawahan dan memberi sanksi yang berat	Keterbukaan dan toleransi terhadap bawahan dalam rangka menganjurkan orisinalitas dan sikap serta tindakan inovatif
Tingkat kreativitas dan inovasi	Ketiadaan kreativitas dan kehampaan inovasi	Memberi penghargaan pada keaslian dan kebaruan (<i>novelty</i>) serta memotivasi rasa ingin tahu yang terus menerus

Untuk menciptakan pribadi-pribadi yang kreatif dan inovatif, maka diperlukan pendidikan yang berbasis pada pedagogik transformatif. Karena hanya dengan pendidikan yang fokus pada transformasi sosial, dapat dipaharapkan muncul sumberdaya manusia yang menjadi pemimpin dan anggota masyarakat yang kreatif dan inovatif pula. Untuk itu, pendidikan juga memiliki alasan yang kuat untuk dikelola dengan berbagai inovasi sehingga menghasilkan tindakan yang inovatif untuk memajukan kebudayaan sehingga mendatangkan keuntungan bagi semua pihak dan bangsa.

Dapat disimpulkan bahwa urgensi inovasi pendidikan paling tidak berakar kepada empat alasan, yaitu: pertama; upaya memecahkan masalah-masalah praktik pendidikan supaya dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan; kedua; memberikan kepuasan kepada stakeholders pendidikan, sehingga mendatangkan keuntungan dan kemajuan; ketiga; pentingnya menyediakan pendidikan yang bermutu dan penyelenggaraan yang akuntabel. Keempat; pentingnya pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal sehingga memberikan daya saing dan keunggulan bangsa di tengah pergaulan dunia global.

C. Manfaat Inovasi Pendidikan

Seperti telah dikemukakan bahwa munculnya suatu inovasi adalah sebagai alternatif pemecahan masalah, maka langkah pertama pengembangan suatu inovasi didahului dengan pengenalan terhadap masalah (Rogers, 1983; Lehman, 1981). Identifikasi terhadap masalah inilah yang kemudian mendorong dilakukannya penelitian dan pengembangan

(R&D) atau evaluasi kurikulum, yang dirancang untuk menciptakan suatu inovasi.

Dalam hal ini perlu untuk diperhatikan bahwa inovasi akan mempunyai makna jika inovasi tersebut diterapkan atau diadopsi, sebab jika inovasi tersebut tidak diterapkan/diadopsi/disebarluaskan maka inovasi tersebut hanya akan menjadi inovasi yang tidak terpakai. Terhadap pengadopsian ini dikenal strategi sentralisasi dan strategi desentralisasi. (disebut penyebaran/difusi inovasi jika ditinjau dari sisi pengembang inovasi, sedangkan adopsi inovasi merupakan prosedur yang dilihat dari sisi calon pemakai/adopter). Baik strategi sentralisasi maupun desentralisasi akan memunculkan permasalahan baru pada saat adopsi/difusinya.

Dalam bidang pendidikan, misalnya, untuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi, telah banyak dilontarkan model-model inovasi dalam berbagai bidang antara lain: usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, dan relevansi pendidikan. Kesemuanya dimaksudkan agar difusi inovasi yang dilakukan bisa diadopsi dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan pemecahan persoalan pendidikan di Tanah Air. Beberapa contoh inovasi antara lain: program belajar jarak jauh, manajemen berbasis sekolah, pengajaran kelas rangkap, pembelajaran kontekstual (*contextual learning*), pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (Pakem).

Sejauh ini dalam bidang pendidikan, banyak usaha yang dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya pembaruan atau inovasi pendidikan. Inovasi yang terjadi dalam bidang pendidikan tersebut, antara lain dalam hal manajemen pendidikan, metodologi pengajaran, media, sumber belajar, pelatihan guru, implementasi kurikulum.

Salah satu aspek penting dalam konteks pendidikan di manapun adalah dengan memperhatikan kurikulum yang diusung oleh pendidikan tersebut. Seringkali kurikulum dijadikan objek penderita, dalam pengertian bahwa ketidak-berhasilan suatu pendidikan diakibatkan terlalu seringnya kurikulum tersebut diubah. Padahal, seharusnya dipahami bahwa kurikulum seyogyanya dinamis, harus berubah mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya. Cuban (1991:216) mengemukakan bahwa untuk memahami perubahan kurikulum maka perlu dicermati tiga pokok pemikiran

tentang perubahan tersebut yakni (a) rencana perubahan itu selalu baik, (b) harus dipisahkan antara perubahan (*change*) dengan kemantapan (*stability*), dan (c) apabila rencana perubahan sudah diadopsi maka perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap rencana tersebut (*improvement*).

Mencermati masalah yang dijelaskan di atas, maka masalah yang dikaji dalam konteks ini: (a) aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP (b) tantangan dalam KTSP sebagai upaya mempercepat pembangunan bangsa, dan (c) kemungkinan permasalahan yang akan muncul pada saat kurikulum tersebut diadopsi. Dengan pembahasan tentang KTSP akan dihasilkan gambaran bagaimana suatu proses adopsi akan berhadapan dengan sejumlah masalah yang harus diatasi.

Proses dan tahapan perubahan itu ada kaitannya dengan masalah pengembangan (*development*), penyebaran (*diffusion*), diseminasi (*dissemination*), perencanaan (*planning*), adopsi (*adoption*), penerapan (*implementation*) dan evaluasi (*evaluation*) (Subandiyah, 1992:77).

Pelaksanaan inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari inovator dan pelaksana inovasi itu sendiri. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan di Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan “*Top-Down Innovation*”.

Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan *sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan* atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas/unggul, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan dan bahkan memaksakan apa yang menurut pencipta pembaharuan itu baik untuk kepentingan bawahannya. Dan bawahan tidak punya otoritas untuk menolak pelaksanaan hal-hal yang baru bagi kepentingan lembaga dan masyarakatnya.

Banyak contoh inovasi yang dilakukan oleh Depdiknas selama beberapa dekade terakhir ini, seperti Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Guru Pamong, Sistem Pengajaran Modul, Sistem Belajar jarak jauh, pendidikan berbasis jaringan/*e-learning*, dan lain-lain. Namun inovasi yang diciptakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan lembaga-lembaga asing seperti *British Council*. Begitu pula USAID dan lain-lain banyak

yang tidak bertahan lama dan hilang, tenggelam begitu saja. Model inovasi yang demikian hanya berjalan dengan baik pada waktu berstatus sebagai proyek.

Tidak sedikit model inovasi seperti itu, pada saat diperkenalkan atau bahkan selama pelaksanaannya banyak mendapat penolakan (*resistance*) bukan hanya dari pelaksana inovasi itu sendiri (di sekolah), tetapi juga para pemerhati dan administrator di Kanwil dan Kandep. Model inovasi seperti yang diuraikan di atas, lazimnya disebut dengan model "*Top - Down Innovation*". Model itu kebalikan dari model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru atau masyarakat yang umumnya disebut model "*Bottom-Up Innovation*".

Ada inovasi yang juga dilakukan oleh guru-guru, yang disebut dengan "*Bottom-Up Innovation*". Model yang kedua ini jarang dilakukan di Indonesia selama ini karena sistem pendidikan yang sentralistik. Pembahasan tentang model inovasi seperti model "*Top-Down*" dan "*Bottom-Up*" telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan para ahli pendidikan. Sudah banyak pembahasan tentang inovasi pendidikan yang dilakukan misalnya perubahan kurikulum dan proses belajar mengajar. White (1988: 136-156) misalnya menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan inovasi seperti tahapan-tahapan dalam inovasi, karakteristik inovasi, manajemen inovasi dan sistem pendekatannya. Kennedy (1987: 163) juga membicarakan tentang strategi inovasi yang dikutip dari Chin dan Benne (1970) menyarankan tiga jenis strategi inovasi, yaitu: *Power Coercive* (strategi pemaksaan), *Rational Empirical* (empirik rasional), dan *Normative - Re-Educative* (Pendidikan yang berulang secara normatif), (Wijaya, Dkk, 1992:18).

Strategi inovasi yang pertama adalah strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi itu sendiri. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya dimana inovasi itu akan dilaksanakan. Kekuasaan memegang peranan yang sangat kuat pengaruhnya dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan kehendak dan pikiran-pikiran dari pencipta inovasinya. Pihak pelaksana yang sebenarnya merupakan obyek utama dari inovasi itu

sendiri sama sekali tidak dilibatkan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Para inovator hanya menganggap pelaksana sebagai obyek semata dan bukan sebagai subyek yang juga harus diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengimplementasiannya.

Strategi inovasi yang kedua adalah empirik Rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalunya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam kaitan dengan ini keberadaan *inovator* bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik valid untuk memberikan anfaat bagi penggunaanya. Di samping itu, startegi ini didasarkan atas pandangan yang optimistik seperti apa yang dikatakan oleh Bennis, Benne, dan Chin yang dikutip dari Wijaya dkk (1991).

Di sekolah, para guru menciptakan strategi atau metode mengajar yang menurutnya sesuai dengan akal yang sehat, berkaitan dengan situasi dan kondisi bukan berdasarkan pengalaman guru tersebut. Di berbagai bidang, para pencipta inovasi melakukan perubahan dan inovasi untuk bidang yang ditekuninya berdasarkan pemikiran, ide dan pengalaman dalam bidangnya itu yang telah digeluti berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Inovasi yang demikian memberi dampak yang lebih baik dari pada model inovasi yang pertama. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian dengan kondisi nyata di tempat pelaksanaan inovasi tersebut. Jenis strategi inovasi yang ketiga adalah normatif re-edukatif (pendidikan yang berulang) adalah suatu strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewis dan beberapa pakar lainnya (Wijaya (1991), yang menekankan bagaimana klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, skill dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia.

Dalam pendidikan, sebuah strategi bila menekankan pada pemahaman pelaksana dan penerima inovasi, maka pelaksanaan inovasi dapat dilakukan berulang kali. Misalnya dalam pelaksanaan perbaikan sistem belajar mengajar di sekolah, para guru sebagai pelaksana inovasi berulang kali melaksanakan perubahan-perubahan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kecenderungan pelaksanaan model yang demikian agaknya lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan engan hasil dari

perubahan itu sendiri. Pendidikan yang dilaksanakan lebih mendapat porsi yang dominan sesuai dengan tujuan menurut pikiran dan rasionalitas yang dilakukan berkali-kali agar semua tujuan yang sesuai dengan pikiran dan kehendak pencipta dan pelaksanaannya dapat tercapai.

Secara keseluruhan ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam komponen sistem sosial untuk melakukan inovasi pendidikan, yaitu:

- 1) Pembinaan personalia; inovasi ditentukan personil pendidikan, karena itu perlu peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, aturan tata tertib siswa dan sebagainya,
- 2) Banyaknya personil dan wilayah kerja; inovasi pendidikan harus memperhatikan keseimbangan personil pendidik, tenaga administrasi dengan siswa yang ditangi untuk dididik dengan baik;
- 3) Fasilitas Fisik; inovasi pendidikan harus memperhatikan kesesuaian fasilitas fisik dengan jumlah siswa dan perkembangan teknologi;
- 4) Penggunaan waktu; inovasi pendidikan perlu memperhatikan ketepatan perencanaan penggunaan waktu dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- 5) Perumusan Tujuan; inovasi pendidikan harus memperhatikan semua hirarki tujuan pendidikan dengan perubahan zaman yang terjadi.
- 6) Prosedur; inovasi pendidikan perlu memperhatikan penggunaan kurikulum baru, cara membuat persiapan mengajar, pengajaran individu dan kelompok dan sebagainya.
- 7) Peran yang diperlukan; inovasi pendidikan perlu memperhatikan kejelasan peran dari setiap orang dalam melaksanakan pendidikan yang diharapkan.
- 8) Wawasan dan perasaan; inovasi pendidikan yang relevan harus memperhatikan kesamaan wawasan dan perasaan dalam melakukan inovasi pendidikan yang diharapkan efektif.
- 9) Bentuk hubungan antar bagian (mekanisme kerja); inovasi pendidikan yang relevan harus memperhatikan mekanisme kerja

yang baik jangan sampai program inovasi menjadi terhambat hanya karena tidak memahami mekanisme kerja.

- 10) Hubungan dengan sistem yang lain; inovasi yang relevan adalah harus memperhatikan hubungan antara satu sistem dengan sistem lain; atau hubungan antar sub sistem dalam satu sistem. Karena masing-masing sistem memiliki fungsi, dan berhubungan dengan sistem lain untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan.
- 11) Strategi; sebagai instrumen atau alat (biasanya meliputi rangkaian aktivitas yang bersifat spesifik) yang dapat mengantarkan inovasi mencapai tujuannya. Karena inovasi menyangkut unsur-unsur atau elemen yang kompleks dan variatif, maka strategi implementasinya pun berbeda-beda sesuai dengan kompleksitas dan variasi dalam paket inovasi tersebut. karenanya, harus diakui bahwa pola strategi inovasi pendidikan memang sulit untuk diklasifikasikan (Miles: 1993, 18-19).

Demikian pula, secara kronologis, seorang inovator bisa mempertimbangkan serangkaian tahapan atau langkah-langkah sebelum sebuah inovasi diadopsi. Sa'ud mengemukakan pendapat Miles (2011:11), tentang tahapan atau langkah-langkah strategi inovasi pendidikan adalah:

1. Disain-inovasi, baik merupakan hasil invensi maupun diskoveri, penyebarannya harus berdasarkan penelitian dan pengembangan (*research and development*). Karena itu, disain inovasi pendidikan yang tidak didasarkan atas hasil *research and development* akan cenderung mengalami kegagalan dalam implementasi.
2. Kesadaran dan perhatian-sasaran inovasi, para anggota target sistem perlu memiliki perhatian dan kesadaran akan pentingnya inovasi dan mencari berbagai informasi yang dibutuhkan untuk itu. dalam konteks ini, para inovator atau *innovator agent's* perlu memunculkan dan membangkitakan kesadaran pada diri sasaran atau anggota target sistem bahwa inovasi yang dirancang dan yang akan dilaksanakan sangat mereka butuhkan untuk mengantarkan mereka pada kondisi atau keadaan yang lebih baik.

3. Evaluasi-para sasaran inovasi harus diberi peluang dan kesempatan yang luas untuk memberikan penilaian tentang inovasi dan memberikan pandangannya, baik pro maupun kontra, tentang kemampuan inovasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan sistem, sesuai dengan kondisi, upaya yang telah dilakukan, pembiayaan, dan sebagainya.
4. Uji Coba-inovasi yang akan dilaksanakan perlu diuji coba dalam skala kecil untuk membuktikan hasil dan berbagai konsekuensinya. Jika hasil uji coba tersebut positif, maka inovasi dapat diadopsi lengkap dengan berbagai strateginya dalam skala yang lebih luas sesuai dengan tujuan, objek, dan sasaran paket inovasi tersebut (Miles: 1993, 19-20).

Pendapat lain mengemukakan ada beberapa petunjuk bagi pelopor inovasi atau inovator dalam melaksanakan perubahan. Menurutnya ada 7 (tujuh) tahapan yang bisa dilalui oleh para inovator untuk mengimplementasikan gagasan dan program inovasinya, yaitu:

1. *Care*-memperhatikan apa masalah yang akan diinovasi, siapa yang menetapkan masalah tersebut, betapa banyak yang memperhatikannya, dan seberapa banyak mereka harus memperhatikan.
2. *Relate*-membangun berbagai hubungan yang baik dan harmonis dengan klien dan anggota target sistem.
3. *Examine*-mendefinisikan masalah yang dihadapi dalam tema-tema atau istilah-istilah yang bisa dipahami dan dipecahkan.
4. *Acquire*-meneliti dan mencari berbagai sumber yang relevan untuk menggulirkan paket inovasi yang telah dirancang. Seorang atau sekelompok inovator harus mendapatkan jawaban yang konkrit terhadap pertanyaan bagaimana kita mendapatkan bantuan dan dari sumber-sumber mana saja kita akan memperoleh bantuan untuk pemecahan masalah.
5. *Try*-melakukan percobaan dalam mencari solusi masalah yang paling baik. Sejumlah pertanyaan kunci yang harus bisa dijawab para inovator antara lain bagaimana kita melakukan percobaan, bagaimana mengambil pemecahan yang terbaik, dan bagaimana

menyatukan berbagai unsure yang ada sehingga seluruhnya terintegrasi dan mendukung paket inovasi yang akan dilaksanakan.

6. *Extend*-menerjemahkan dan mengembangkan solusi dalam bentuk tindakan dalam rangka mencari consensus dari para penerima innovator atau objek dan sasaran inovasi.
7. *Renew*-membangun kapasitas untuk terus mengembangkan komitmen terhadap inovasi agar proses inovasi bisa diselenggarakan secara kontinu dalam upaya mencapai tujuan. (Havelock dan Zlotolow,1995:1)

Pada akhirnya, tujuan yang akan dicapai dari suatu strategi inovasi adalah untuk meletakkan inovasi pendidikan dalam kerangka sebuah sistem target. Perlu dicermati keberadaan sistem persekolahan dan kedekatannya dengan lingkungan masyarakat, kampus atau universitas dan lain-lain, sehingga pada gilirannya inovasi akan menjadi bagian yang inheren dalam sebuah sistem pendidikan. Strategi bisa dimulai dari sistem target itu sendiri atau sistem-sistem lain dalam lingkungan sistem target, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Sekolah/ Madrasah, mass media, berbagai yayasan sosial dan pendidikan dan badan-badan pemerintah. Lebih lanjut, strategi inovasi juga bisa menggunakan berbagai struktur yang telah ada atau melalui penciptaan berbagai struktur baru yang diperhitungkan lebih efektif dan menguntungkan. Baik struktur yang telah ada maupun struktur baru harus didefenisikan sesuai dengan kondisi dan waktu dimana inovasi itu akan dilakukan.

Pada dasarnya , keberhasilan sebuah paket inovasi pendidikan tidak hanya terletak pada desain atau perencanaan, strategi, dan agen/pelopor inovasi. Masih banyak lagi variabel terkait seperti sejauh mana dukungan masyarakat dalam menerima inovasi tersebut? adakah jaminan atau komitmen bahwa proses inovasi pendidikan yang dilakukan akan didukung oleh masyarakat dan para penerima inovasi? Sejauh mana kemampuan pelopor perubahan dalam menyediakan sarana fasilitas, dan sumber-sumber finansial guna meluncurkan proses inovasi pendidikan juga merupakan pertanyaan yang patut dijawab dalam konteks ini.

D. Sasaran Program Inovasi Pendidikan

Masyarakat dan kebudayaan umat manusia kini menapak era informasi. Apakah makna era informasi bagi kehidupan dan kebudayaan umat manusia? Era informasi yang didukung oleh teknologi informasi telah mengubah budaya umat manusia. Teknologi informasi telah memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Kini menjadi populernya apa yang disebut *e-life*. Sesungguhnya *e-life* (*electronic Life*) telah merupakan gaya hidup (*life style*). Kini mulai dikenalkan – *commers*, *e-bussiner*, *e-learning*, *internet home*, dan berbagai bentuk kehidupan teknologi canggih kini sedang melanda dunia (Tilaar, 2002:107).

Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek, yaitu aspek pertama adalah aspek tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran serta perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses (Cece Wijaya, 1998, .28).

Inovasi dalam aspek tujuan pendidikan dimulai pada tahun 1970 dan kini dikenal sebagai Tujuan Intruksional Khusus (TIK). Inovasi ini berlangsung lambat karena umumnya guru belum dapat membiasakan diri menjabarkan TIK.

Aspek kedua adalah inovasi pada aspek struktur pendidikan melibatkan cara penyusunan sekolah dan kelompok serta ruangan kelas agar menjadi lebih bergengsi.

Sasaran yang dimaksud di sini adalah komponen-komponen apa saja dalam bidang pendidikan yang dapat menciptakan inovasi. Pendidikan adalah suatu sistem maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas, misalnya sistem pendidikan nasional.

Inovasi dalam aspek tujuan pendidikan dimulai pada tahun 1970 dan kini dikenal sebagai Tujuan Intruksional Khusus (TIK). Bahkan saat ini dalam Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) sejak tahun 2006, dengan berbagai standar nasional pendidikan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 merupakan inovasi pendidikan yang terus bergerak untuk memajukan pendidikan. Semula

inovasi tentang TIK berlangsung lambat karena umumnya guru belum dapat membiasakan diri menjabarkan TIK. Inovasi pada aspek struktur pendidikan melibatkan cara penyusunan sekolah dan kelompok serta ruangan kelas agar menjadi lebih bergensi dan memudahkan pembelajaran siswa.

Sesungguhnya inovasi pendidikan meliputi pembaruan dalam materi dan isi kurikulum dan pengajaran. Inovasi materi atau isi kurikulum, yaitu meliputi inovasi pendidikan yang disajikan. Contohnya, bagaimana meningkatkan mutu proses belajar dan mengajar dan bagaimana menerapkan muatan lokal dari kurikulum nasional.

Demikian pula dalam inovasi pendidikan adalah perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses yang meliputi penggunaan multimode dan multimedia dalam kegiatan belajar. Penggunaan kombinasi metode atau media dilakukan oleh guru pada saat proses berlangsung, dan diharapkan dapat memberikan hasil yang efektif. Perubahan dalam proses ini juga meliputi pendekatan inkuriri artinya, penyelidikan yang dilakukan oleh siswa apabila siswa masih memiliki pertanyaan dalam belajarnya. Pendekatan CBSA yaitu siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan belajar, namun masih dalam bimbingan guru. Dibandingkan dengan cara belajar sebelumnya, di mana guru lebih dominan dalam proses pembelajaran dan sumber informasi hanya datang dari guru (verbalisme).

Selain yang diuraikan di atas, upaya pembaruan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan adanya Teknologi Pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan, dan evaluasi atan sistem, teknik serta alat bantu untuk meningkatkan proses belajar manusia (Ellington, 1984:20). Perkembangan suatu inovasi didorong oleh motivasi untuk melakukan inovasi pendidikan itu sendiri. Motivasi itu bersumber pada dua hal, yaitu kemauan sekolah atau lembaga untuk mengadakan respons terhadap tantangan perubahan masyarakat dan adanya usaha untuk mneggunakan sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Perkembangan inovasi dalam pendidikan di Indonesia di antaranya adalah berikut ini:

1. *Pemerataan kesempatan belajar*, untuk menanggulangi jumlah usia sekolah yang cukup banyak di Indonesia. Pemerintah men-

ciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak usia sekolah, salah satunya adalah didirikannya SD Pamong, SMP Terbuka, Universitas Terbuka.

2. *Kualitas pendidikan untuk menaggulangi kurangnya jumlah guru*, dengan diiringi merosotnya mutu pendidikan pemerintah dalam hal ini meningkatkan mutu pendidikan, misalnya penataran guru melalui radio, modul.
3. *Penggunaan multi media dalam pembelajaran*. Pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan dana dan waktu yang sedikit. Ini berari harus dicari sistem pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien. Di antaranya dengan memanfaatkan lembar kerja siswa dan media KIT IPA.

Berikut ini contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan atau komponen sistem sosial dengan pola yang dikemukakan oleh B. Milles, seperti yang dikutip oleh Ibrahim (1988), yaitu:

1. Pembinaan Personalia

Pendidikan yang merupakan bagian dari sistem sosial menempatkan personal (orang) sebagai bagian/komponen dari sistem. Adapun inovasi yang sesuai dengan pembinaan personal, yaitu peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, peningkatan disiplin siswa melalui tata tertib dan sebagainya.

2. Banyaknya Personal dan Wilayah Kerja

Inovasi pendidikan yang relevan dengan aspek ini, misalnya rasio guru dan siswa dalam satu sekolah.

3. Fasilitas Fisik

Sistem pendidikan untuk mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan. Inovasi yang sesuai dengan komponen ini, misalnya pengaturan tempat duduk siswa, pengaturan papan tulis, pengaturan peralatan laboratorium bahasa, penggunaan kamera video.

4. Penggunaan Waktu

Dalam sistem pendidikan tentu memiliki perencanaan penggunaan waktu. Inovasi yang sesuai dengan aspek ini, misalnya pengaturan waktu belajar (pagi atau siang), pengaturan jadwal pelajaran.

5. Perumusan Tujuan

Sistem pendidikan tentu memiliki rumusan tujuan yang jelas. Inovasi yang sesuai dengan aspek ini, misalnya perubahan rumusan tujuan pendidikan nasional, perubahan rumusan tujuan kurikuler, perubahan rumusan tujuan institusional, perubahan rumusan tujuan instruksional.

6. Prosedur

Dalam sistem pendidikan tentu saja memiliki prosedur untuk mencapai tujuan. Adapun inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini adalah penggunaan kurikulum baru, cara membuat rencana pengajaran, pengajaran secara kelompok dan sebagainya.

7. Peran yang Diperlukan

Dalam sistem pendidikan perlu adanya kejelasan peran yang diperlukan guna menunjang pencapaian tujuan. Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini, misalnya peran guru sebagai pemakai media, peran guru sebagai pengelola kegiatan kelompok, guru sebagai *team teaching*.

8. Wawasan dan Perasaan

Dalam interaksi sosial termasuk sistem pendidikan biasanya berkembang suatu wawasan dan perasaan tertentu yang menunjang kelancaran pencapaian tujuan. Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini misalnya wawasan pendidikan seumur hidup, pendekatan keterampilan proses, perasaan cinta akan pekerjaan (profesionalisme), kesediaan berkorban, dan kesabaran.

9. Bentuk Hubungan Antarbagian (Mekanisme Kerja)

Dalam sistem pendidikan perlu adanya kejelasan hubungan antarbagian dalam pelaksanaan kegiatan. Inovasi yang relevan dengan komponen ini, antara lain perubahan pembagian tugas antarguru, perubahan hubungan kerja antarkelas.

10 Hubungan dengan Sistem yang lain

Pendidikan sebagai sebuah sistem dalam pelaksanaan kegiatannya akan berhubungan atau bekerja sama dengan sistem yang lain. Inovasi yang relevan dengan komponen ini, misalnya dalam pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah bekerja sama dengan Puskesmas, dalam pelaksanaan Bakti Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat, dan sebagainya.

11. Strategi

Strategi ialah tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola strategi yang biasanya digunakan, yaitu:

a) Desain

Suatu inovasi ditemukan berdasarkan hasil observasi atau hasil penelitian. Dari hasil penelitian itu maka dibuat desain suatu inovasi dengan perencanaan penyebarannya.

b) Kesadaran dan perhatian

Berhasil atau tidaknya suatu inovasi sangat ditentukan oleh adanya kesadaran dan perhatian penerima/sasaran inovasi baik individu maupun kelompok akan perlunya inovasi tersebut. Berdasarkan kesadaran itu maka mereka akan mencari informasi tentang inovasi.

c) Evaluasi

Para penerima/sasaran inovasi mengadakan penilaian tentang kemungkinan akan dapat terlaksananya inovasi tersebut, tentang kemampuan untuk mencapai tujuan, tentang pembiayaan dan sebagainya.

d) Percobaan

Para penerima/sasaran inovasi mencoba menerapkan inovasi untuk membuktikan apakah memang benar inovasi dapat diterapkan, seperti yang diharapkan. Jika ternyata berhasil maka inovasi akan diterima.

Beberapa contoh perkembangan inovasi di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Perkembangan inovasi pendidikan pada tingkat pendidikan dasar khususnya sekolah dasar sudah banyak dilakukan oleh para guru. Misalnya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran terpadu; penulisan tujuan pembelajaran dengan perumusan yang benar yaitu mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Condition*, dan *Degree*, serta pendekatan pembelajaran melalui cara belajar siswa aktif dan lain-lain.

Universitas Terbuka menyelenggarakan Program Penyetaraan

D.II Guru SD yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi guru kelas dan guru penjaskes. untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui program pendidikan jarak jauh dengan bahan belajar utama yaitu bahan cetak (modul) ditunjang dengan program kaset audio, radio, dan televisi. Mahasiswa dapat belajar tanpa meninggalkan tugas, dan mahasiswa dapat berinteraksi dengan pengajar melalui media interaktif.

Hingga saat ini para guru SD membuat perencanaan pembelajaran (desain pembelajaran) masih menggunakan model Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sedangkan pada saat ini dengan masuknya, teknologi pembelajaran *Quantum Teaching*, dapat digunakan perencanaan pengajaran yang dikenal dengan istilah TANDUR. Di bawah ini adalah tinjauan sekitar dan maknanya.

T : Tumbuhkan

Tumbuhkan minat dengan memuaskan “Apakah Manfaatnya Bagi-Ku “(AMBAK), dan manfaatkan kehidupan pelajar.

A : Alami

Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua pelajar.

N : Namai

Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, sebuah masukan.

D : Demonstrasikan

Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu.

U : Ulangi

Tunjukkan pelajar cara-cara lain untuk mendemonstrasikan bahwa mereka paham.

R : Rayakan

Akui setiap Usaha. Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi dan pemerolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan.

Di dalam metode belajar terdapat inovasi yang dikenal dengan *Accelerated Learning*, yaitu belajar dengan menggunakan relaksasi dan

perasaan atau emosi yang positif (mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadar untuk mencapai tujuan). Metode ini akan menyempurnakan cara belajar siswa aktif yang telah dikenal selama ini.

Inovasi dalam bidang pendidikan yang juga berhubungan dengan masalah reinkarnasi adalah penggunaan alat hitung *sempoa* bagi siswa usia 7 – 12 tahun di bidang Aritmatika dan telah mengenal bilangan 1-100. Alat ini digunakan untuk membantu keterampilan kognitif siswa dalam menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu, dengan adanya jasa telekomunikasi (Warnet), guru-guru dapat mengakses materi-materi pelajaran aktual melalui internet.

Dalam perkembangan terkini banyak contoh lain tentang sasaran inovasi dalam bidang pendidikan juga pembelajaran *on-line*, atau pembelajaran berbasis jaringan. Dari uraian dan contoh-contoh di atas, para guru dan perancang pendidikan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bidang pendidikan sehingga mutu pendidikan baik secara lokal maupun secara nasional bertambah. Jangan lupakan pula faktor-faktor mempengaruhi pembaruan pendidikan sebagai penunjang suksesnya inovasi yang diterapkan ataupun ciptakan.

BAB IV

IMPLEMENTASI

MANAJEMEN BERBASIS

SEKOLAH

A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Meminjam pendapat Prihatin (2011:153:154) bahwa manajemen berbasis sekolah (MBS) pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.

Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.

Kemudian menurut Sujanto (2007:30) manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah dan masyarakat (*stakeholders*) yang dilayani, dengan tetap selaras dengan kebijakan nasional tentang pendidikan.

Berdasarkan penapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas personil sekolah.

Sesungguhnya indikator keberhasilan MBS yang harus dapat diukur dan dirasakan oleh para *stakeholders* pendidikan, adalah adanya peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara berkelanjutan. Dalam hal ini MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efesiensi serta manajemen yang bermutu di tingkat sekolah. Sekolah dalam hal ini menjadi lembaga mandiri dalam menetapkan kebijakannya, tetapi memiliki jaringan kerja dengan berbagai pihak yang dapat meningkatkan mutu kinerja manajemen.

Pada awal tahun 2000, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) diperkenalkan dan kebijakan inovatif ini dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Dirjen Dikdasmen, Depdiknas diungkapkan beberapa indikator yang menjadi karakteristik dari konsep MBS sekaligus merefleksikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak antara lain dikemukakan oleh Siahaan, (2006:32), yaitu:

- a. Lingkungan di sekolah yang aman dan tertib
- b. Sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai
- c. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat
- d. Adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya, termasuk siswa) untuk berprestasi
- e. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan
- f. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan dan atau perbaikan mutu
- g. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua siswa dan masyarakat lainnya.

Sesungguhnya asumsi dasar untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai alternatif pemberdayaan sekolah adalah dikarenakan model ini merupakan wujud reformasi atau inovasi pedi-

dikan. Pada prinsipnya MBS bertumpu pada kolaborasi sekolah dan masyarakat yang mengeliminasi birokrasi yang sentralistik. Artinya model ini berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi dan manajemen yang bertumpu pada pendayagunaan maksimal sumberdaya pendidikan pada tingkat sekolah, guru dan administrator yang profesional.

Manajemen yang bertumpu pada pendayagunaan sumberdaya sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan:

- a. Kebijakan dan wewenang sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru
- b. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal
- c. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tindak pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah
- d. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan.

Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa dalam manajemen kesiswaan, untuk penentuan daya tampung dan perencanaan penerimaan siswa baru kepala sekolah sudah membuat usulan daya tampung siswa yang ditujukan ke dinas Pendidikan setempat untuk mendapat persetujuan agar dapat dilaksanakan.

Begitu pula praktik manajemen sarana prasarana, pengadaan sumber belajar siswa seperti buku pelajaran, sekolah-sekolah dilingkungan dinas setempat sudah menggunakan buku pelajaran atau sumber belajar yang telah ditetapkan.

B. Eksisten Manajemen Berbasis Sekolah

Sesungguhnya di Amerika Serikat, perjuangan Guru untuk memperbaiki nasibnya dianggap sebagai cikal bakal MBS atau desentralisasi pengelolaan sekolah. Perjalanannya sudah berlangsung cukup panjang,

yaitu dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional, pada tahun 1857. Pada tahun 1887 itu, guru-guru di New York membentuk sebuah asosiasi kepentingan besama dan asosiasi yang sama didirikan di Chicago, dipimpin oleh Margarette Harley. Pada Tahun 1903 guru-guru Philadelphia membentuk organisasi asosiasi guru-guru Philadelphia. Melalui asosiasi inilah guru-guru bangkit untuk meningkatkan martabat hidupnya, yang hasilnya antara lain guru-guru memperoleh gaji lebih baik.

Di Atlanta, guru-guru membentuk Pesatuan Guru-guru Sekolah Publik Atlanta. Persatuan ini dibentuk untuk menghadapi tekanan dari dewan kota. Akhirnya, dewan kota memberikan dana lebih untuk pendidikan. Kemudian, guru-guru League, yang dipelopori oleh Tokoh Sosialis, Henry Linville, Jhon Dewey dan Suffrajist Charlotte pekins Gilman, Membentuk sebuah Asosiasi ang berbicara lebih dari sekedar masalah-masalah Ekonomi. Tujuanya memberi pilihan bagi guru dalam menentukan kebijakan sekolah untuk memperoleh wakil di pentas pendidikan di New York, membantu masalah-masalah sekolah membersihkan politik Amerika Serikat dari penyimpangan keputusan, dan meningkatkan kebebasan diskusi Publik dari masalah-masalah pendidikan (Danim, 2006:26).

Berkaitan langsung dengan prakarsa MBS, di negara maju reformasi pendidikan, khususnya reformasi pendidikan, selama lebih dari empat puluh tahun terakhir terus berporos pada desentralisasi. Menurut Bailey (1991) di Amerika Serikat, misalnya, sejak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, secara prinsip telah berjalan” empat generasi” gerakan reformasi manajemen pendidikan. Dari “empat generasi” gerakan reformasi tersebut, semuanya menjurus kepada desentralisasi hingga sampai kepada istilah sebagai MBS.

Seperti disebutkan terdahulu, MBS merupakan pengindonesiaan dari *school-based management* (SBM). Referensi yang dipakai kearah desentralisasi itu disajikan sebagai berikut ini.

Pertama, The New Progressive Era atau Era Progresif Baru yang lahir pada tahun 1960-an digagas oleh Neale, Rand Corporation, Fullman, McLaughlin, Bruce Joyce, dan sebagainya. Titik tekannya adalah pada pengembangan kemampuan individu pada ujung tombak perubahan. Kedua, *School Effectiveness* atau studi-studi keefektifan sekolah pada tahun 1970-an, digagas oleh Edmunds, Brookover, Cohen, Cuban, Austin,

dengan titik tekan pada etos sekolah. Ketiga, National Report atau laporan Nasional pada Tahun 1980-an digagas oleh Bell, Wood dan Sizer. Titik tekannya adalah pada Pemberdayaan sekolah, termasuk pemberdayaan pendidikan pada anak-anak berisiko (*Nation at Risk*). Sesungguhnya *Nation at Risk* adalah anak-anak yang berisiko dalam kerangka menempuh pendidikan, seperti gelandangan dan pengemis, anak-anak dari keluarga sangat miskin, anak-anak yang melakukan pemutusan hubungan kerja, anak-anak yang bermukim secara terisolasi dan Lain-lain. Keempat, *Public School by Choice* atau Sekolah Negeri dengan pilihan merupakan produk pemikiran para pakar dari Universitas Minnesota dan Iowa (Danim, 2007:26).

Bagaimana dengan Perjalanan sejarah MBS di Indonesia? Dilihat dari perjalanannya, kebijakan MBS di Indonesia secara relatif sungguh-sungguh baru dimulai sejak tahun 1999/2000, yaitu dengan peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). Dana bantuan ini disetor langsung ke sekolah langsung kerekening sekolah, tidak melalui alur birokrasi pendidikan di atasnya (Dinas Diknas). Memasuki tahun anggaran 2003, dana BOMM itu diubah namanya Dana Rintisan untuk MPMBS, khususnya untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Program ini sejalan dengan dengan Implemenasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dibidang pendidikan dan Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Berangkat dari pengalaman di Amerika Serikat, sesungguhnya diperlukan cukup lama bagi manajemen sekolah di Indonesia untuk secara sungguh-sungguh dilaksanakan secara berbasis keperluan sekolah dengan fokus pada pendekatan MBS.

Dalam praktiknya ada dua istilah populer yang menjelaskan fungsi manajemen yang memandirikan sekolah, yaitu MBS dan MPMBS. Terminologi manajemen berbasis sekolah (MBS) atau pendidikan berbasis masyarakat (PBM) juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 Propenas. Menurut Undang-Undang ini, MBS dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Perwujudan *school/community-based education* ini ditandai dengan pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.

Di lingkungan Depdiknas dan Dinas Diknas, terminologi yang populer adalah MPMBS. Keberadaan MPMBS pada intinya adalah otonomi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Titik tekan MPMBS adalah perbaikan mutu masukan, proses, keluaran pendidikan, serta sepanjang memungkinkan juga menjangkau para lulusan. Dengan demikian, meski MBS dan MPMBS memiliki kaitan yang sangat erat, namun MBS memiliki cakupan yang sangat luas. Jika MBS benar-benar diterapkan, kewenangan untuk merekrut tenaga guru, merekrut dan mengangkat kepala sekolah, sistem pembayaran gaji, penetapan kalender sekolah, penetapan biaya pendidikan sekolah, bahkan juga kurikulum, semuanya menjadi kewenangan sekolah yang dikelola kepala sekolah efektif dengan melibatkan semua pihak berkepentingan.

C. Kebijakan MBS sebagai Inovasi Pendidikan

Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu jawaban pemberian otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Karena itu, manajemen berbasis sekolah merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Dengan MBS dihadapkan para kepala sekolah, guru dan personil lain di sekolah serta masyarakat setempat dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan tuntutan global (Dally, 2010:24). Penerapan MBS dijamin oleh peraturan Perundang-Undangan Berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 “Pengelolaan satuan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah madrasah”.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional tahun 2000-2004 pada Bab VII Tentang Bagian Program pembangunan bidang pendidikan, khususnya sasaran (3), yaitu “Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (*School Community Based Management*)”.

- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.
- d. Kepmendiknas Nomor 87 tahun 2004 tentang Standar Akreditasi Sekolah, khususnya tentang Manajemen berbasis sekolah; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah yaitu manajemen berbasis sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru dan pengelola sistem pendidikan (administrator profesional). Untuk lebih kreatif dalam mengelola sekolah.

Keberhasilan dalam mencapai kinerja unggul akan sangat ditentukan oleh faktor informasi, pengetahuan, keterampilan dan insentif yang berorientasi pada mutu, efisiensi dan kemandirian sekolah.

Dalam kerangka implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, manajemen pendidikan berbasis sekolah merupakan alternatif pendekatan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

Desentralisasi sistem pemerintahan daerah memberikan kebebasan yang luas bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengelolaan pendidikan akan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan umum dari pemerintah pusat. Ada beberapa dimensi-dimensi perubahan pola manajemen pendidikan dari pola lama kepada pola baru. Selain itu, ada beberapa alasan untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di antaranya :

Dengan diberikannya otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka Sekolah akan lebih memiliki inisiatif dan kreativitas dalam meningkatkan mutu sekolah. Dalam hal ini sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan tantangan bagi sekolah, sehingga dapat mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Begitu pula, sekolah dapat meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat terhadap peningkatan mutu sekolah.

Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua, pemerintah tentang mutu sekolah. Karakteristik Sekolah Yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah mengindikasikan pada suatu sistem yang

terdiri dari komponen konteks, input, proses, output dan outcome. Kesemuanya ini satu sama lainnya saling berhubungan dan berpengaruh dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah.

Konteks adalah eksternalitas yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan karenanya harus diinternalisasikan ke dalam penyelenggaraan sekolah. Konteks ini meliputi kemajuan ipteks, kemajuan yang diharapkan oleh masyarakat, dukungan pemerintah dan masyarakat, kebijakan pemerintah, landasan yuridis, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi dan tuntutan pengembangan diri. Semua ini harus diinternalisasi ke dalam sekolah sehingga sekolah menjadi milik masyarakat. Input sekolah adalah sesuatu yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Input ini adalah siswa, visi, misi tujuan, sasaran, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana, administrasi sekolah. Proses adalah kejadian berubahnya sesuatu menjadi yang lain. Dalam pendidikan proses adalah terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik. Proses ini sangatlah menentukan terhadap kualitas pendidikan yang dihasilkan. Oleh karena itu perilaku guru sebagai harus menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya.

Output pendidikan adalah hasil belajar yang merefleksikan seberapa besar efektifnya proses belajar mengajar diselenggarakan. Outcome adalah dampak jangka panjang dari output hasil belajar, baik dampak bagi individu tamatan maupun bagi masyarakat.

Bagi sekolah yang sudah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah semua komponen tersebut di atas akan dikelola secara baik sehingga berhasil guna dan berdaya guna, menyebutkan bahwa sekolah yang menerapkan MBS adalah sebagai berikut: (1) Memiliki output (prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah efektif), (2) Efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi.

Sejatinya, peran kepala sekolah yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan mendayagunakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Lingkungan dan iklim belajar yang aman, tertib dan nyaman (*enjoyable learning*) sehingga manajemen sekolah berjalan dengan efektif. Analisis kebutuhan perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja dan imbal jasa tenaga kependidikan dan guru sehingga

mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Pertanggungjawaban sekolah kepada publik terhadap keberhasilan sekolah yang telah dilakukan Pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan nyata. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengolahan yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dari perspektif ini maka penerapan MBS dipandang strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini sekolah dapat menciptakan program-programnya yang lebih baik karena pemikiran dan sumber daya sekolah dapat diolah secara langsung sesuai dengan kebutuhan murid yang dilayani yang pada gilirannya akan lahir sekolah yang bermutu.

Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah, khususnya prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) Prestasi akademik, (2) Memiliki nilai-nilai kataqwaan, kesopanan, (3) Memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam keterampilan dasar sesuai dengan ilmu yang diterima di sekolahnya.

D. Implementasi MBS

Masalah- masalah pendidikan nasional semakin kompleks sesuai dengan makin meningkatnya kecerdasan rakyat Indonesia serta kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang semakin ditingkatkan. Dalam kaitan ini, ada empat kelompok permasalahan yaitu: (1) Peranan pendidikan di dalam pembangunan nasional memasuki abad 21 dalam masyarakat yang serba terbuka. Masalah penting yang mengemuka antara lain mengenai pentingnya reformasi pendidikan nasional, (2) pentingnya manajemen pendidikan agar dapat dibangun sistem nasional yang kuat dan dinamis menuju kepada kualitas output yang tinggi mutunya, (3) Kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi proses pendidikan dalam masyarakat ilmu, (4) Otonomi daerah yang menuntut penyelenggaraan pendidikan nasional yang memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah sebagai dasar pembangunan nasional dan kerjasama regional.

Hal-hal di atas sampai saat ini menjadi masalah dalam menentukan

kebijakan pengorganisasian sistem pendidikan nasional. Perencanaan pendidikan nasional perlu mengidentifikasi masalah secara akurat dengan tingkat prestasi yang tinggi, agar dalam menentukan kebijakan sebisa mungkin dapat memperkecil kekeliruan dengan risiko kecil. Perencanaan merupakan kata kunci dan memiliki kedudukan strategis dalam mencapai tujuan. Kemampuan perencanaan yang tepat yang dilandasi oleh data dan kebutuhan yang merupakan tuntutan dalam memenuhi kriteria manajemen modern.

Pendidikan memerlukan perencanaan, perencanaan merupakan salah satu aspek dalam manajemen, dan perencanaan dalam manajemen nasional menenukan keberhasilan pencapaian tujuan nasional, yaitu mencerdaskan manusia Indonesia (salah satunya). Upaya pencapaian tujuan nasional akan berhasil dengan baik jika perencanaan pendidikan saat ini memperhatikan perkembangan domestik global.

Perkembangan domestik saat ini telah mengancam ketahanan nasional, ancaman itu adalah: (1) ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, (2) Arogansi kekuasaan, arogansi kekayaan dan arogansi intelektual, (3) Keberingasan sosial, (4) Perilaku sosial menyimpang, (5) Perubahan tata nilai, dan (6) Perubahan gaya hidup sosial.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab berbagai persoalan yang mengemuka merupakan bagian dari perkembangan yang terjadi saat ini dan telah menjadi fenomena sebagai implikasi tersebut sebenarnya dapat diatasi jika semua pihak memegang teguh visi nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tanah tumpah daah Indonesia serta turut dalam menciptakan perdamaian dunia.

Sistem pendidikan sebagai suatu organisasi haruslah bersifat dinamis, fleksibel, sehingga dapat menyerap perubahan-perubahan yang cepat antara lain karena perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan masyarakat menuju kepada masyarakat yang semakin demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia. Menghadapi berbagai situasi yang tidak kondusif saat ini harus dilakukan dengan perubahan orientasi. Perubahan orientasi yang dilakukan adlah dengan merubah orientasi dari pendekatan birokratif dan sentralistik kearah pendekatan demokratik dan mengubah pula manajemen pendidikan dan metodologi perencanaan.

Perubahan yang harus dilakukan tersebut ternyata saat ini tidak hanya sebagai sebatas wacana saja, tetapi telah sampai pada tahap implementasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pembaharuan program yang telah disiapkan, ini dapat dilihat dari paradigma dalam menjalankan pemerintahan, yaitu dari sentralistik menuju desentralisasi. Sentralisasi yang dilaksanakan selama ini berdasarkan hasil evaluasi, ternyata telah mendatangkan bencana dan musibah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Perlunya melakukan perubahan dari sentralisasi menuju desentralisasi merupakan amanah dari reformasi yang telah digulirkan sejak Mei 1998 yang lalu. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari sistem lama menuju sistem baru. Melalui sistem baru (Reformasi) ini, berbagai dimensi kehidupan, yang didalamnya antara lain adalah dimensi Ideologi, Politik, Teknikal dan pembangunan berupaya disinerjikan secara sistematis.

Dalam konteks ini seluruh dimensi yang terkait dengan tercapainya tujuan di sektor pendidikan untuk mendukung pembangunan nasional, harus bersinergi sehingga prioritasnya tidak lagi bersifat parsial. Dimensi ideologi harus berkembang ketika proses pendidikan di persekolahan berlangsung, demikian juga dengan dimensi strategis lainnya seperti politik, teknikalnya Dimensi-dimensi ini adalah yang seharusnya terinternalisasi ke dalam proses pendidikan. Namun proses internalisasi itu, tidak dilakukan secara terpisah. Ia harus dilakukan secara terkait sehingga tidak akan ditemukan celah kelemahan yang akan mengganggu tercapainya tujuan pembangunan pendidikan baik secara ideografik maupun nomotetik. Hal inilah yang akan menjadikan pencapaian tujuan pendidikan efektif.

Bagaimana pelaksanaannya agar tercapai sesuai dengan rencana? Tentu saja diperlukan reformasi dalam mengkomunikasikan ide dan gagasan pembaruan pendidikan. Untuk itu telah ditemukan format baru manajemen pendidikan, yaitu manajemen berbasis sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah sebagai paradigma baru dalam menata ulang organisasi pendidikan dijadikan sebagai tema dasar perubahan pendidikan. Hal ini dilakukan agar efektivitas upaya memanusiaikan manusia melalui sistem sekolah dengan berbagai kebijakannya, akan menghasilkan pola baru dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang sebelumnya banyak diabaikan.

Dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan pada saat ini masyarakat masih merasakan kenyataan bahwa mutu pendidikan kurang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh belum sepakatnya para penyelenggara pendidikan menetapkan standar mutu yang harus dicapai serta beberapa departemen penyelenggara pendidikan, yang ternyata tidak mudah untuk mencapai kesepakatan tentang standar mutu.

Salah satu indikasi bahwa mutu pendidikan nasional yang masih rendah, yakni sangat kecilnya jumlah lulusan yang mampu memperoleh nilai yang baik, minimnya jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Belajar dari pengelolaan sekolah-sekolah yang sukses, maka nilai-nilai dasar, serta standarisasi mutu harus dapat diterapkan secara ketat (Sujanto, 2007:24). Untuk meningkatkan kualitas proses dan lulusan sekolah, maka kontribusi manajemen yang berfokus atas sumberdaya sekolah menjadi faktor penentu sehingga MBS menjadi pilihan yang relevan dalam memajukan sekolah.

Menurut Zabadi (2011:35) ada sembilan syarat dalam pelaksanaan MBS, yaitu:

- a. Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu: memiliki kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan yang berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian, dan pemberian penghargaan kepada setiap orang yang berhasil.
- b. Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non instruksional.
- c. Adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumberdaya sekolah secara efektif.
- d. Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif.
- e. Semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh.
- f. Adanya petunjuk (*guidelines*) dari departemen terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Petunjuk itu jangan sampai merupakan peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah.

- g. Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.
- h. Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa.
- i. Implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya. Implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.

Sekolah yang demikian itu adalah sekolah efektif dengan suasana yang terbentuk dalam iklim kerja profesional dengan pengembangan staf, perencanaan kolaboratif, pengajaran unggul, dan rendahnya pemberhentian staf. Iklim sekolah efektif juga ditandai dengan pembagian sasaran secara luas, dan harapan tinggi terhadap prestasi siswa (Mohrman, 1994:84). Dengan penerapan MBS, perwujudan sekolah-sekolah efektif semakin cepat berkembang dengan iklim kondusif peningkatan mutu akademik, dan non akademik sesuai harapan *stakeholders* pendidikan.

E. Penerapan Model MBS di Sekolah

1. Pemberian Otonomi Daerah

Pemberiaan otonomi membuat sekolah memiliki kemampuan dan terbiasa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau tantangan yang sedang dan akan dialaminya. Dengan pemberian otonomi sekolah, maka sekolah lebih dinamis dalam merencanakan dan melaksanakan program. Dinamisnya perencanaan dan pelaksanaan program, mengakibatkan terjadinya perubahan dinamika kepemimpinan sekolah.

Implementasi dari pemberian otonomi itu, jika ditelaah masih bersifat administratif. Sekolah-sekolah hanya berusaha untuk membuat program dan berusaha untuk merealisirnya. Namun jika berkaitan dengan sistem pendanaan atau pembiayaan, setiap sekolah masih sulit

untuk mencari dana sendiri dan masih sangat membutuhkan dana dari satuan atasan. Inilah salah satu dilema yang dihadapi oleh sekolah.

Pemberian otonomi yang diberikan ke sekolah setidaknya-tidaknya telah memberikan kesadaran kepada personil sekolah untuk lebih bersifat partisipatif dalam mengelola program sekolah. Selama ini, berbagai kebijakan dan inisiatif masih cenderung dikendalikan oleh kepala sekolah. Tetapi, sekolah-sekolah yang menyadari bahwa pemberian otonomi adalah sebuah peluang

Pemberian otonomi yang diberikan dalam rangka menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah, memang masih dalam taraf permulaan yang masih perlu dikembangkan polanya. Pemberian otonomi yang diberikan di sekolah-sekolah merupakan awal dari penerapan baru manajemen persekolahan, yang diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi sekolah sehingga mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.

Pada pasal 2 ayat (3) kewenangan tersebut dikelompokkan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut:

- 1) Penetapan standar kompetensi siswa dan belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar serta nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- 2) Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- 3) Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- 4) Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan (Kamars, 2005).

2. Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat

Dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah, terdapat berbagai cara melibatkan masyarakat baik secara aktif maupun proaktif. Cara-cara yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat antara lain melalui.

- 1) Menghimpun masyarakat yang peduli dengan pendidikan melalui komite sekolah

- 2) Memilih dan menentukan anggota komite sekolah yang memiliki pandangan yang luas tentang pendidikan
- 3) Menjadikan komite sekolah sebagai tempat masyarakat berhimpun, memberikan masukan dan bantuan baik yang bersifat material atau apa saja yang memungkinkan semakin efektifnya manajemen sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan
- 4) Setiap keputusan yang diambil manajemen sekolah dalam konteks pelibatan masyarakat, dilakukan secara bersama-sama dengan pengurus komite sekolah.

Melibatkan masyarakat yang dimaksud disini adalah pelibatan yang bersifat proporsional, dalam rangka menjamin proses akuntabilitas sekolah sebagai lembaga public yang wajib memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan berorientasi kepada perilaku manajemen yang transparan.

Pelibatan masyarakat melalui komite sekolah merupakan salah satu aspek yang terus dipelihara sekolah-sekolah. Dengan adanya keterlibatan ini, beban sekolah diharapkan akan semakin ringan sehingga memungkinkan sekolah lebih konsentrasi dalam melaksanakan manajemen sekolah terutama dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Sekolah harus dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat melalui karya nyata. Karya nyata itu dapat dilihat dari program sekolah yang menghasilkan lulusan bermutu, yaitu lulusan yang memiliki kemampuan dalam menyerap proses pembelajaran sehingga lulusan itu sesuai dengan standar pencapaian tujuan pendidikan.

Orang tua, masyarakat, dan dunia usaha yang merasa ikut membiayai pendidikan tidak lagi rela menerima pendidikan yang diurus asal jadi atau tidak bermutu. Peningkatan harapan masyarakat tersebut mamberikan tantangan baru bagi dunia pendidikan, yaitu bagi pemerintah dan yayasan penyelenggaraan pendidikan, tidak bisa lagi hanya didasari asal sekolah itu berjalan apapun keadaannya, tetapi pendidikan itu harus bermutu dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Artinya, sekolah harus diurus atas dasar profesionalisme, bukan jadi asal jadi

Pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya adalah konsep pendidikan yang lebih banyak menggunakan masyarakat itu sendiri

sebagai wahana pendidikannya. Pendidikan berbasis masyarakat hanya dapat berlangsung efektif apabila diawali dari kebutuhan-kebutuhan produk-produk pendidikan tertentu yang memang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Produk pendidikan kita saat ini ternyata tidak dapat diserap oleh masyarakat dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tentunya akan menciptakan beban ekonomi bagi masyarakat. Produk pendidikan akan memberikan mafaat ekonomi yang lebih besar oleh masyarakat dilihat dari mutu atau kemampuan lulusan untuk mampu bersaing sesuai ilmu pengetahuan yang diterimanya di sekolah (Sagala, 2004:162). Lulusan berkualitas sekaligus sebagai bukti akuntabilitas tinggi yang dimunculkan para pengelola lembaga pendidikan.

3. Mendorong kepemimpinan Kepala Sekolah yang kuat

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan MBS, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan begitu, MBS sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan MSB adalah segala upaya yang dilakukan dengan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah, terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui kepala sekolah, antara lain:

- 1) Kepala sekolah haruslah diangkat dan dipilih oleh masyarakat melalui komite sekolah
- 2) Adanya penghargaan terhadap kepala sekolah sesuai dengan prestasi yang dicapainya
- 3) Kepala sekolah yang tidak berprestasi, diberhentikan melalui prosedur baku.
- 4) Kepala sekolah harus mendapat pelatihan yang terus-menerus, agar kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan untuk dapat diterapkan secara aplikatif.

Kelemahan kepala sekolah dalam melaksanakan kepemimpinan selama ini antara disebabkan oleh karena mereka tidak memiliki dasar pelatihan yang kuat tentang kepemimpinan sebelum mereka dipercayakan sebagai kepala sekolah di

Satuan pendidikan, Kepala sekolah memiliki otonomi yang terbatas tidak sistematis menerima latihan kepemimpinan, dan kecil atau terbatasnya peran masyarakat dalam membantu kepala sekolah mengelola sekolahnya. Kriteria yang harus dimiliki kepala sekolah antara lain:

- 1) Memiliki kemampuan untuk mengarahkan personil sekolah, terutama guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan materi pembelajaran
- 2) Memiliki kesadaran tentang efisiensi waktu sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu
- 3) Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan stakeholders pendidikan, sehingga stakeholders berpartisipasi aktif dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah.
- 4) Memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan siapapun, terutama personil sekolah, sehingga hubungan antara personil sekolah harmonis dan dinamis dalam mencapai tujuan sekolah.
- 5) Mampu menciptakan kerjasama, baik dengan internal maupun pihak eksternal sekolah.
- 6) Berorientasi pada pencapaian tujuan dengan melibatkan personil sekolah secara aktif.
- 7) Memahami secara mendasar latar belakang peserta didik, sehingga dapat memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran.
- 8) Mempersiapkan diri untuk dapat melakukan perubahan dan mengikuti perubahan agar tidak tertinggal dengan perubahan melalui belajar sendiri, gemar membaca, seminar, diskusi dan lainnya.
- 9) Setiap saat menambah kompetensi kepemimpinannya baik secara formal maupun informal, dengan tujuan agar dapat

mengarahkan personil sekolah mencapai tujuan secara bersama-sama.

- 10) Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi sehingga dapat mempengaruhi siapa saja secara positif dalam mendukung pencapaian kinerja sekolah.

Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan mengerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa dan pihak terkait untuk bekerja atau berperan guna mencapai tujuan yang di tetapkan. Cara kepala sekolah untuk membuat orang lain bekerja untuk mencapai tujuan sekolah merupakan inti kepemimpinan kepala sekolah.

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam MBS dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut:

1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif.
2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Mampu menjalin hubungan yang harmmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan.
4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah.
5. Bekerja dengan tim manajemen.
6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah. Dalam panduan manajemen sekolah dikemukakan yang mempengaruhi keberhasilan kepala sekolah yaitu: (1) kepribadian yang kuat, yaitu pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial, (2) Memahami tujuan pendidikan dengan baik, (3) Memiliki pengetahuan yang luas, (4) Memiliki keterampilan profesional.

Kepala sekolah harus dapat memahami semua situasi yang ada di sekolah agar dia dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi sekolahnya (Syafaruddin, 2005:164-165). Di sini pentingnya manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah yang transformatif dan kolaboratif ada pada setiap sekolah sehingga memungkinkan penerapan manajemen berbasis sekolah yang efektif dalam rangka peningkatan mutu lulusan dan pelayanan sekolah. Mohrman (1994:83) menjelaskan bahwa kepemimpinan sekolah adalah satu aspek sekolah efektif. Kekuasaan yang terpusat pada kepala sekolah sebagai orang yang melayani kepemimpinan pembelajaran di sekolah, tetapi kepemimpinan juga tercakup para guru dan warga sekolah. Pimpinan pendidikan mengkomunikasikan sasaran, seperti pencapaian hasil belajar yang tinggi sebagai kinerja siswa, staf mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah dan memotivasi guru dan siswa.

4. Proses Pengambilan Keputusan yang Demokratis

Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang diambil setelah melakukan analisis terhadap mudarat dan manfaat sebuah kebijakan. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai proses untuk memilih satu diantara dua alternatif yang tersedia.

Menurut Robbins, langkah-langkah membuat keputusan itu adalah: Memastikan perlunya membuat keputusan, Mengidentifikasi criteria keputusan, menentukan bobot atau criteria keputusan, membangun beberapa alternatif, mengevaluasi atau menilai setiap alternatif, dan memilih alternatif yang terbaik. Proses pengambilan keputusan yang demokratis ini seharusnya lebih dititikberatkan kepada pencapaian tujuan organisasi dan manajemen pembelajaran. Upaya untuk mendapatkan keputusan yang demokratis tidaklah terlalu mudah dilaksanakan karena pada umumnya kepala sekolah ingin mengambil keputusan yang cepat pada saat itu juga. Hal inilah yang menjadi kendala. Oleh karena itu, keputusan kepala sekolah bukan berarti otoriter. Kepala sekolah adakalanya sering menghadapi keadaan yang harus mengambil keputusan yang cepat. Adakalanya keputusan ini efektif namun tidak jarang juga tidak efektif bahkan menjadi permasalahan baru di sekolah.

5. Bimbingan Proporsional dari Satuan Atasan

Pelaksanaan atau penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah memerlukan bimbingan secara terus menerus oleh satuan atasan sekolah (Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten dan Kota serta Kecamatan). Bimbingan ini dilakukan untuk memudahkan persekolahan melakukan perubahan dalam manajemennya. Sekolah-sekolah itu walau bagaimanapun masih mengalami masa perubahan dari pola atau sistem yang bersifat hirarkis birokratis menuju sistem demokratis.

Bimbingan atau pembinaan yang diberikan oleh satuan atasan antara lain adalah agar tidak terjadi lagi kesungkapan pihak persekolahan terhadap satuan atasan sebagaimana yang terjadi selama ini, dengan diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah, seharusnya satuan atasan menganggap persekolahan sebagai unit terpenting dalam mencapai atau merealisasikan tujuan pendidikan. Satuan atasan jangan lagi menganggap persekolahan sebagai pelaksana kegiatan dinas pendidikan.

Prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah yang belum secara komprehensif terealisasi itu antara lain:

- 1) Bersikap terbuka, tidak memaksakan kehendak, bertindak sebagai fasilitator dan menciptakan suasana demokratis dan kekeluargaan.
 - 2) Menjadikan sekolah sebagai organisasi terbuka, sehingga stakeholders dapat mengakses sekolah secara proporsional.
 - 3) Mengembangkan kebiasaan berdiskusi secara terbuka dikalangan personil sekolah, mendidik sumberdaya manusia sekolah untuk mau mendengarkan pendapat masyarakat secara terbuka.
 - 4) Mendorong para guru untuk mengambil keputusan yang baik dan mentaati keputusan yang telah ditetapkan secara bersama.
 - 5) Tenaga kependidikan masih belum utuh untuk menyadari bahwa peserta didik memiliki keunikan antara satu dengan lainnya.
 - 6) Menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam mencapai tujuan pendidikan persekolahan.
- e. Sekolah Didorong untuk Memiliki Transparansi dan Akuntabilitas

Bentuk transparansi yang dilakukan manajemen sekolah adalah sikap sekolah yang terbuka dalam melaporkan program sekolah dan sistem penilaian atau evaluasi yang dilakukan secara objektif. Sedangkan

bentuk akuntabilitas sekolah kepada masyarakat, dilakukan melalui usaha sekolah agar tujuan pembelajaran baik berdasarkan tujuan nasional, tujuan lembaga dan tujuan kurikuler, tercapai dengan sebaik-baiknya.

Makna transparansi itu sebagai upaya sekolah untuk lebih terbuka dalam memecahkan masalah dan dengan terpecahkannya masalah itu, maka berbagai pihak memiliki kepercayaan terhadap sekolah. Sedangkan akuntabilitas cenderung dimaknai sebagai upaya sekolah untuk dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan sekolah, dan dengan efektifnya kinerja sekolah, maka sekolah.

Otonomi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan harus disertai dengan tanggung jawab atau akuntabilitas, yaitu suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab untuk memenuhi kepuasan dari pihak lain sesuai kualitas performa dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akuntabilitas membuka peluang untuk melakukan diskusi dan komunikasi sebagai upaya gaya menemukan kesepakatan tentang hal yang terbaik untuk dilaksanakan. Akuntabilitas membutuhkan aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan dalam akuntabilitas terkandung rasa puas dari pihak lain.

Sejalan dengan itu, dapat ditegaskan bahwa akuntabilitas memiliki prinsip-prinsip yang tidak memberi peluang untuk merubah konsep dan implementasi perencanaan, baik perubahan terhadap program kerja, maupun pasilitas. Akuntabilitas mampu membatasi ruang gerak terjadinya perubahan dan pengulangan, serta revisi perencanaan. Sebagai alat kontrol, akuntabilitas memberi kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan, yaitu tujuan atau performan yang dicapai, program atau tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan cara atau performansi pelaksanaan dalam mengerjakan tugas, alat dan metode yang jelas maupun dana yang dipakai, lingkungan tertentu tempat program dilaksanakan, dan insentif terhadap pelaksana yang sudah ditentukan secara pasti (Sagala, 2004:247). Perencanaan dalam MBS sangat kolaboratif, sehingga mempertimbangkan kebutuhan dari bawah yang diakomodir dalam memperkuat komitmen personil dalam organisasi sekolah.

6. Diarahkan untuk Pencapaian Kinerja Sekolah

Kinerja sekolah adalah kinerja pendidikan, kinerja pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan yang berlangsung di sekolah. Kinerja sekolah akan tercapai jika seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya yang tersedia. Maupun sumber daya yang belum menjadi bagian integral dari kepelilikan sekolah. Tujuan pencapaian sekolah merupakan tujuan akhir dalam serangkaian tujuan pendidikan, yaitu menciptakan manajemen pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat adalah tuntutan pelanggan yang harus terpenuhi apa yang diinginkan dari sekolah.

Kinerja sekolah dalam konteks manajemen sekolah secara umum meliputi hal-hal berikut:

- 1) Kinerja kurikulum dan program pengajaran
- 2) Kinerja tenaga kependidikan
- 3) Kinerja kesiswaan
- 4) Kinerja keuangan dan pembiayaan
- 5) Kinerja sarana dan prasarana pendidikan
- 6) Kinerja hubungan sekolah dengan masyarakat
- 7) Dan kinerja layanan khusus

Keenam kinerja diatas adalah kinerja yang lazim dilaksanakan oleh sekolah. Keenamnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sekolah. Seluruh sekolah dalam operasional manajemennya melaksanakan kinerja itu sesuai dengan prosedur tetap yang telah dibakukan.

7. Sosialisasi Secara Terus Menerus

Sosialisasi yang dilakukan dalam menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah dapat dilaksanakan melalui diskusi, rapat, pertemuan informal, pengarahan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala tanpa memberikan tekanan yang dapat membuat sekolah-sekolah akan melakukan penolakan. Sosialisasi ini diusahakan secara aktif dan terukur sehingga terjadi perubahan yang signifikan dalam manajemen persekolahan.

Sosialisasi akan efektif jika dilakukan ketika ada rapat, pengarahan,

pertemuan informal dengan menghadirkan satuan atasan. Walaupun harus diakui bahwa sosialisasi ini akan berhasil jika sekolah menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah mendapatkan reward yang bermanfaat bagi sekolah itu.

Sosialisasi sepertinya adalah kata kunci bagi keberhasilan penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah secara utuh di sekolah-sekolah. Sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah sudah memadai. Hanya saja sekolah-sekolah masih melihat bahwa manajemen pendidikan berbasis sekolah yang akan diterapkan itu masih belum utuh wujudnya. Sekolah masih mencari format efektif dalam menerapkan MBS dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

MBS pada intinya adalah upaya terus-menerus untuk memperbaiki kinerja sekolah dengan memposisikan sekolah sebagai institusi yang relatif otonom. Sejalan dengan pemikiran sebelumnya, perbaikan kinerja sekolah secara terus-menerus ini relevan dengan filosofi *Kaizen* bahwa selalu tersedia ruang gerak, waktu, dan tenaga untuk melakukan perbaikan.

Memang, tidak ada kepastian bentuk muara setiap usaha perubahan, kecuali perubahan itu sendiri dan harapan yang menyertainya. Harapan yang diimpikan dari sebuah usaha perubahan adalah sebuah metamorfosis menuju kesempurnaan atau perbaikan yang bersifat terus-menerus (*continuous improvement*). Di Jepang, istilah perbaikan yang terus-menerus ini sarat dengan muatan kultural, yang disebut dengan *Kaizen*. *Kai* berarti perubahan dan *zen* berarti baik. Tony Barnes (1998) menulis bahwa tidak ada yang berdiam diri atau *status quo* dalam skema *Kaizen*. Dalam hal ini *Kaizen* selalu berusaha melakukan perubahan karena tidak pernah ada capaian yang bersifat sempurna dan permanen. keberadaan *Kaizen* selalu berusaha meningkatkan mutu atas apa yang telah dicapai. Konsep dasarnya, selalu ada hari lain atau orang lain yang menemukan ruang dan waktu untuk membangun inisiatif peningkatan. Sekolah yang menganut konsep *Kaizen* tidak mengenal istilah kuota atau target, tetapi standar. Ketika kuota atau target telah dicapai, hampir dipastikan usaha akan melemah. Sebaliknya, jika yang ditetapkan adalah standar, akan terus tumbuh motivasi orang untuk memenuhi standar itu. Jika standar yang dikehendaki telah dipenuhi, akan ditetapkan standar baru atau awal baru untuk memenuhi capaian atas standar lain yang dikehendaki.

Istilah *Kaizen* baru sering kita dengar dan baca akhir-akhir ini, itu pun masih terbatas wahananya. Jadi, sangat mungkin masih banyak orang yang belum pernah mendengar tentang *Kaizen*, meski sudah pernah mendengar atau mungkin secara pribadi sudah memahami cukup mendalam tentang Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau *Total Quality Management* (TQM). Buku-buku tentang MMT atau TQM telah banyak dipublikasikan, demikian juga artikelnya. Akan tetapi, buku-buku tentang *Kaizen* apalagi sekolah *Kaizen*, masih amat langka.

Jika seseorang telah memahami konsep tentang MMT atau TQM sebenarnya dia pun telah mulai memahami tentang *Kaizen*. Hal-hal yang kita dengar di dunia Barat dan di banyak belahan dunia sebagai TQM, sebenarnya berasal dari *Kaizen*. Bagaimana prinsip *Kaizen* itu? Tony Barnes (1998) mengemukakan sepuluh prinsip *Kaizen*, yaitu berikut ini: (1) Berfokus pada pelanggan, (2) Melakukan peningkatan secara terus-menerus, (3) Mengakui masalah secara terbuka, (4) Mempromosikan keterbukaan, (5) Menciptakan tim kerja, (6) Memanajemen proyek melalui tim fungsional silang, (7) Memelihara proses hubungan yang benar, (8) mengembangkan disiplin pribadi, (9) Memberikan informasi pada semua karyawan, (10) Memberikan wewenang kepada setiap karyawan (Danim, 2007:19).

F. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

Prihatin (2011:153:154) menjelaskan bahwa penerapan MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MBS sebagai berikut:

- a. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
- b. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
- c. mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
- d. Mengarahkan kembali sumber-daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.

- e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
- f. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.

Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola MBS, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal berikut.

- a. Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut.
- b. Mengetahui sumberdaya yang dimiliki dan “input” pendidikan yang akan dikembangkan.
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya.
- d. Bertanggungjawab terhadap orang tua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah.
- e. Persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.

Dengan model MBS yang efektif dapat memberi keuntungan, seperti:

- a. Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada siswa, orang tua siswa dan guru
- b. Membawa manfaat sumber daya lokal secara optimal
- c. Keefektifan melakukan pembinaan peserta didik, seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru dan iklim sekolah
- d. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulangan sekolah dan perbuatan perencanaan.

Untuk itu ada empat aspek yang perlu mendapat perhatian dalam merancang strategi pemberdayaan MBS, sebagaimana dikemukakan Dally (2010:27), yaitu:

- 1) Membangun visi bersama,
- 2) Kemandirian kepada sekolah mutlak harus dimiliki,
- 3) Pelibatan komite sekolah berorientasi pada pemberdayaan sekolah,
- 4) Manajemen kinerja dengan *Balancard ScordCard* dalam memberdayakan implementasi kebijakan MBS

Keefektifan MBS akan terwujud jika saja pengelola pendidikan mampu memberdayakan *stakeholders* dalam menentukan kebijakan, pengadministrasian dan inovasi kurikulum yang dilakukan sekolah. Selain memiliki keterlibatan yang tinggi dari *stakeholders* pendidikan, maka diperlukan pula evaluasi kinerja organisasi sekolah untuk memastikan bahwa mutu yang dicapai sekolah benar-benar sesuai visi, misi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan.

BAB V

KEBIJAKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Kurikulum

Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteksnya dengan dunia pendidikan, memberinya pengertian sebagai “*circle of instruction*” yaitu suatu lingkaran pengajaran dimana guru dan murid terlibat di dalamnya (Nizar, 2002:56).

Pendapat lain menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka mencapai pendidikan (Hamalik, 1995:18).

Dalam bahasa Arab istilah kurikulum disebut dengan *manhaj ad-dirasat* yang bermakna jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan, *manhaj* adalah sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau pelatih dengan orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Dengan kata lain, kurikulum adalah sejumlah kekuatan, faktor-faktor pada alam sekitar pengajaran dan pendidikan yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luarnya, dan sejumlah pengalaman-

pengalaman yang lahir dari interaksi dengan kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor ini (Al-Syaibani, 1979:478).

Selanjutnya Zais (1976:7) mengemukakan kurikulum dapat dipahami sebagai program mata pelajaran, seperti halnya bahasa Inggris, Aljabar, sejarah, ekonomi dan lainnya. Dengan kata lain kurikulum mencakup suatu daftar atau judul mata pelajaran yang disampaikan oleh sekolah. Pandangan lain menyebutkan bahwa kurikulum adalah isi mata pelajaran tertentu dalam program atau data dan informasi yang terekam dalam membimbing pelajar melalui buku catatan yang diperlukan dan disediakan dalam rencana pembelajaran. Selain itu kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang direncanakan sekolah. Belakangan ini definisi kurikulum sudah berubah dari isi mata pelajaran dan daftar mata pelajaran atau mata kuliah kepada semua pengalaman yang diberikan kepada pelajar dibawah pengawasan dan pengaturan sekolah”.

Kemudian Ornstein dan Hunkins (1978:6) mengajukan definisi yang lebih luas tentang kurikulum berkenaan dengan pengalaman pelajar. Tegasnya kurikulum adalah semua pengalaman anak di bawah bimbingan guru-guru.

Dalam pendapat lain dikemukakan bahwa kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup dan urutan materi, serta proses pendidikan. Jika dikaitkan dengan Pendidikan Islam maka kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Islam dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan manusia muslim seutuhnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hamalik, 1995:19). Tujuan yang hendak dicapai harus teruraikan dalam program yang termuat dalam kurikulum, bahkan program itulah yang mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran.

Kurikulum merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran pada suatu lembaga Pendidikan Islam. Segala hal yang harus diketahui, dipahami, dihayati, diamalkan, dan dialami peserta didik harus ditetapkan dalam kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum menguraikan secara berencana bagaimana dan apa saja yang harus terjadi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Dengan

demikian kurikulum Pendidikan Islam tidak hanya penjabaran mengenai serangkaian ilmu pengetahuan yang harus diajarkan oleh pendidik atau guru kepada anak didik dan anak didik mempelajarinya, akan tetapi juga segala kegiatan yang bersifat kependidikan yang dianggap perlu karena memiliki pengaruh terhadap anak didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Islam (Arifin, 2000:85).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah rencana pembelajaran yang dirancang, dilaksanakan dan diawasi oleh sekolah untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan.

B. Komponen Kurikulum

Kurikulum menjadi panduan utama melaksanakan kegiatan pendidikan dalam wujud pembelajaran di sekolah dan kegiatan pelatihan lainnya. Para guru dan pelatih harus mempersiapkan kurikulum lebih awal sebelum melaksanakan pendidikan dan latihan dalam dunia pendidikan. Untuk itu, sebagai suatu sistem, kurikulum pendidikan harus dirancang secara lebih terencana untuk memaksimalkan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Kurikulum sebagai suatu sistem terdiri dari keseluruhan terpadu memiliki komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni: (1) tujuan, (2) materi, (3) metode, (4) organisasi, dan (5) evaluasi (Hamalik, 2008:95). Komponen-komponen tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran.

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar-mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar-mengajar (Hamalik, 2008:184).

Dalam pengembangan kurikulum terkait dengan empat dimensi kurikulum. Menurut Hasan (2007:479) keempat dimensi ini saling berkaitan dan yang memerlukan perhatian khusus, yaitu:

1. Kurikulum dalam dimensi ide
2. Kurikulum dalam dimensi dokumen
3. Kurikulum dalam dimensi proses
4. Kurikulum dalam dimensi hasil

Lebih jauh dijelaskannya, bahwa kurikulum dalam dimensi ide berkenaan dengan landasan filosofis dan teoritis kurikulum. Landasan filosofis kurikulum berkenaan dengan filosofis pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan arah dan orientasi kurikulum. Aspek filosofis menentukan permasalahan kurikulum yang diidentifikasi dan merumuskan jawabannya. Dari aspek filosofis ini terlihat apakah kurikulum tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pengembangan disiplin ilmu, teknologi, agama, permasalahan sosial budaya, ekonomi, kebangsaan, hukum dan sebagainya.

Sedangkan dalam dimensi sebagai dokumen maka kurikulum berisikan komponen seperti tujuan, konten, proses dan assesment. Berbagai literatur kurikulum menyebutkan bahwa dimensi dokumen ini dengan istilah *intentional/intended* atau *planned*.

Dalam dimensi proses adalah implementasi dari apa yang direncanakan dalam dimensi dokumen. Pelaksanaan atau implementasi itu mungkin sama akan tetapi mungkin juga berbeda dari apa yang direncanakan dalam dokumen. Dimensi proses terkadang disebut dengan istilah *implemented*, *observed*, atau *reality*. Dapat dipastikan bahwa pengertian kurikulum dalam UU Nomor 20 tahun 2003 berkenaan dengan dimensi kurikulum dalam pengertian dokumen dan proses. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.

Kurikulum dalam dimensi hasil adalah apa yang dimiliki oleh peserta didik. Dimensi ini merupakan suatu pembuktian apakah tujuan kurikulum tercapai. Dimensi ini sangat kritikal dalam menentukan

keberhasilan suatu kurikulum. Oleh karena itu alat evaluasi hasil yang digunakan haruslah memiliki tingkat validitas kurikulum (*curriculum validity*) yang tinggi bukan validitas konten. Validitas kurikulum menunjukkan tingkat kesesuaian ruang lingkup tujuan kurikulum (pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai, kebiasaan) dengan ruang lingkup alat evaluasi yang digunakan. Validitas konten menunjukkan tingkat kesesuaian ruang lingkup suatu konten (konsep, teori, nilai, kebiasaan) dengan ruang lingkup butir-butir pertanyaan dari suatu tes.

C. Landasan legal KTSP

Sejak Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diresmikan maka kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan mendasar. Perubahan mendasar tersebut adalah dalam wewenang mengembangkan, mengelola dan melaksanakan pendidikan. Setelah UU nomor 20 tahun 2003 berlaku, wewenang mengembangkan, mengelola dan melaksanakan pendidikan tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat tetapi sudah berbagi dengan pemerintah daerah. Sistem pendidikan yang dibangun oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan konsekuensi dari perubahan sistem pemerintahan dari pemerintahan sentralistis ke otonomi daerah dan pendidikan adalah aspek pelayanan pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah.

Dalam bidang kurikulum, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menetapkan adanya berbagai ketentuan berkenaan dengan baebagai hal yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan menjadi wewenang pemerintah daerah. Pasal 35 menetapkan bahwa pemerintah pusat menetapkan berbagai standar nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Standar adalah suatu persyaratan, kualitas, atau kondisi minimal yang harus ada dan meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Pemerintah telah menetapkan dua dari delapan standar lain belum ditentukan walaupun sewajarnya harus ditetapkan segera karena satu standar berkaitan dengan standar

lainnya dan implementasi mengenai keenan standar tersebut menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 36 menetapkan berbagai persyaratan pengembangan kurikulum. Dalam hal ini kurikulum yang dikembangkan harus mengacu kepada standar nasional, diarahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski pun demikian, kurikulum yang dikembangkan harus memperhatikan kepentingan peserta didik, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, agama, dan kehidupan bangsa dalam dunia internasional. Lebih lanjut, pasal 37 UU nomor 20 Tahun 2003 menetapkan isi kurikulum yang harus ada pada setiap kurikulum dikembangkan sekolah.

Pelaksanaan UU nomor 20 tahun 2003 ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen). Untuk kurikulum Mendiknas telah menetapkan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan Permen tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional, lembaga yang dibentuk berdasarkan pasal 35 ayat(4) UU nomor 20 tahun 2003. Pada saat sekarang baru satu PP dan tiga Permen yang dihasilkan sebagai peraturan pelaksana dalam pengembangan kurikulum di Indonesia.

D. Landasan Filosofis dan Teoritis KTSP

Sebagai suatu kebijakan dalam pembaharuan kurikulum, memiliki landasan filosofis dan teoritis. Mengacu kepada Hasan (2007:482) KTSP dikembangkan dengan mengacu kepada landasan filosofis dan teoritis sehingga pelaksanaan memiliki landasan yang kuat.

1. Kurikulum harus dimulai dari lingkungan terdekat. Sebuah kurikulum tidak boleh memisahkan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya, fisik, ekonomi, agama, masyarakat yang dilayani kurikulum. Kurikulum sebuah satuan pendidikan di suatu lingkungan pertanian berbeda dengan kurikulum untuk masyarakat nelayan, kota, atau industry pada tiga tahun pertama. Peserta

didik harus mengenal lingkungan dengan baik dan belajar dari lingkungan tersebut kepada lingkungan yang lebih luas

2. Kurikulum harus mampu melayani pencapaian tujuan pendidikan nasional dan tujuan satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan memiliki tanggungjawab yang lebih besar terhadap bangsa dan harus mengembangkan semangat kebangsaan melalui pemahaman terhadap masyarakat sekitarnya. KTSP harus mampu mengorganisasikan kepentingan peserta didik, masyarakat terdekat dan bangsa dalam satu dimensi (*unidimensional objectives*)
3. Model kurikulum harus sesuai dengan ide kurikulum. Literatur kurikulum mengenal adanya berbagai model kurikulum seperti *knowledge-base model (disciplinary-based model)*, *society-oriented*, *child-centered*, *technology-based*, *competency-based*, *skill-based*, dan *value-based*. Model-model ini harus sesuai dengan desain kurikulum.
4. Proses pengembangan kurikulum harus bersifat fleksibel dan komprehensif. KTSP harus selalu terbuka untuk penyempurnaan. Implementasi kurikulum pada tahun pertama sangat menentukan apakah kurikulum memerlukan revisi dan berapa besar dimensi revisi yang harus dilakukan.

Menurut Kunandar (2011:121) ada beberapa alasan mengapa KTSP menjadi pilihan dalam upaya perbaikan kondisi pendidikan di tanah air, antara lain: (1) potensi siswa itu berbeda-beda dan potensi tersebut akan berkembang jika stimulusnya tepat, (2) mutu hasil pendidikan yang masih rendah serta mengabaikan aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni dan olah raga serta *life skill*, (3) persaingan global sehingga menyebabkan siswa/anak yang mampu akan berhasil/eksis dan yang kurang mampu akan gagal, (4) persaingan pada kemampuan SDM produk lembaga pendidikan, serta (5) persaingan terjadi pada lembaga pendidikan sehingga perlu rumusan yang jelas mengenai standar kompetensi lulusan, dan selanjutnya standar kompetensi mata pelajaran perlu dijabarkan menjadi sejumlah kompetensi dasar.

E. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan salah satu hasil dari reformasi pendidikan, khususnya dalam bidang kurikulum. Kunandar (2011:112) menjelaskan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan revisi dan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi atau ada yang menyebut kurikulum 2004. KTSP lahir karena dianggap bahwa KBK masih sarat dengan beban belajar dan pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru, dan komite sekolah) diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum seperti membuat indikator, silabus dan beberapa komponen kurikulum lainnya.

Dalam konteks ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau lebih dikenal di kalangan guru dengan sebutan KTSP, lahir sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kedua perundang-undangan ini mengamanatkan bahwa perlu tersusunnya kurikulum pada tingkat suatu pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Menurut konsep yang tertuang dalam buku panduannya, KTSP tersebut diartikan sebagai kurikulum operasional, yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP sebagai perwujudan dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah berpedoman pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. Penyusunan KTSP khusus, dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi,

dan berpedoman pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

Mengacu kepada pendapat Irianto (2011:170), bahwa prinsip-prinsip dalam penyusunan KTSP ini, antara lain:

1. berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya;
2. beragam dan terpadu;
3. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
4. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
5. menyeluruh dan berkesinambungan;
6. belajar sepanjang hayat;
7. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Untuk memahami tentang KTSP ini lebih jauh, dapat dikemukakan hakikat penyusunan KTSP sesuai Panduan yang disusun BNSP sebagai berikut:

1. Komponen dan Acuan Operasional Penyusunan KTSP

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan, yaitu:

- a. Tujuan Pendidikan Dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- b. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- c. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya.

Sementara acuan operasional penyusunan KTSP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia. Keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia.
- b. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- c. Keragaman potensi dan kinestetik daerah dan lingkungan, daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan, oleh karena itu kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat berkontribusi bagi pengembangan daerah.
- d. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- e. Tuntutan dunia kerja. Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. Agama. Kurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Dan memperhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan sekolah.
- h. Dinamika perkembangan global; kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat berdampingan dengan bangsa lain.

- i. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum harus mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam negara, kesatuan republik Indonesia.
- j. Kondisi sosial budaya, masyarakat setempat. Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan, karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya.
- k. Kesetaraan gender. Kurikulum harus diarahkan kepada pendidik berkeadilan dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender.
- l. Karakteristik satuan pendidikan. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan.

2. Struktur dan Muatan KTSP

Struktur KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi yang dikembangkan dari kelompok mata pelajaran, antara lain:

- a. Kelompok mata pelajaran dan akhlak mulia
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Kelompok mata pelajaran estetika
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam pasal 7 PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Selain itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam kurikulum.

a. Mata pelajaran.

Adapun mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan tertera pada struktur kurikulum yang tercantum dalam standar isi.

b. Muatan lokal.

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

c. Kegiatan pengembangan diri.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karir. Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

d. Pengaturan beban belajar, antara lain:

1) beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB/MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri dan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem Kredit Semester (SKS) digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.

- 2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
- 3) Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0 % - 40 % , SMP/MTs/SMPLB 0 % - 50 % , dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0 % - 60 % , dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
- 4) Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.
- 5) Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem kredit semester (SKS) mengikuti aturan: (a) Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, (b) Satu SKS pada SMA/MA/MAK terdiri atas 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Menurut Kunandar (2011:138) sebagai sebuah konsep, sekaligus sebagai sebuah program KTSP memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara kurikulum tingkat satuan pendidikan individual maupun klasikal. Dalam KTSP peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi, yang terampil dan mandiri.
- 2) KTSP berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.

- 3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
- 4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
- 5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan, atau pencapaian suatu kompetensi.

e. Basis Pendidikan

Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan /atau kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan semua mata pelajaran. Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari satuan pendidikan formal lainnya, dan/atau non formal yang sudah memperoleh akreditasi.

Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau non formal yang sudah memperoleh akreditasi.

f. Pengembangan Silabus Mata Pelajaran

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Prinsip pengembangan silabus, antara lain:

1. Ilmiah, dalam arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan;
2. Relevan, dalam arti cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dan silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik;

3. Sistematis, dalam arti komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi;
4. Konsisten, dalam arti adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas), antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.
5. Memadai, dalam arti cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar,
6. Aktual dan kontekstual, dalam arti cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi.
7. Fleksibel, dalam arti keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.
8. Menyeluruh, dalam arti komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).

Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penyusunan silabus dilaksanakan bersama-sama oleh guru kelas/guru yang mengajarkan mata pelajaran yang sama pada tingkat satuan pendidikan untuk satu sekolah atau kelompok sekolah dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sekolah. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Khusus untuk SMKA/MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi.

Prosedur pengembangan silabus setiap mata pelajaran dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi, dengan memperhatikan:

- (1) Urutan berdasarkan hirarki konsep disiplin ilmu, dan/ atau tingkat kesulitan materi, (2) keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, (3) keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.
- b. Mengidentifikasi materi pokok. Proses mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan mempertimbangkan: (1) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik; (2) kebermanfaatan bagi peserta didik, (3) struktur keilmuan, (4) kedalaman dan keluasan materi, (5) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, (6) alokasi waktu.
 - c. Mengembangkan pengalaman belajar. Sesungguhnya pengalaman belajar merupakan kegiatan mental dan fisik yang dilakukan peserta didik dalam berinteraksi dengan sumber belajar melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Rumusan pengalaman belajar juga mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik.
 - d. Merumuskan indikator keberhasilan belajar. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan dan/atau respons yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur, dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.
 - e. Penentuan jenis penilaian. Sesungguhnya penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio dan penilaian diri.

- f. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar.
- g. Menentukan sumber belajar. Dalam hal ini sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak, dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi, hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan evaluasi rencana pembelajaran.

- g. Pelaksanaan KTSP

Dalam pelaksanaannya, KTSP diimplementasikan berdasarkan analisis kontekstual yang didasarkan pada analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di sekolah, termasuk pada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya dan program-program yang ada di sekolah. Di samping itu, analisis peluang dan tantangan, yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar yang meliputi komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumberdaya alam, dan sosial budaya. Dan mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan

dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Tim penyusun KTSP SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan narasumber, dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota dan disupervisi oleh dinas kabupaten/kota dan provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Tim penyusun KTSP MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas guru, konselor, kepala madrasah, komite madrasah dan narasumber dengan kepala madrasah sebagai ketua dan merangkap anggota dan disupervisi oleh departemen yang mengurus pemerintahan di bidang agama. Tim penyusun KTSP khusus (SDLB, SMPLB, SMALB) terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan narasumber dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draft, revisi dan revisi, serta finalisasi. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun.

Dokumen KTSP SD, SMP, SMA dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Dokumen KTSP MI, MTs, MA dan MAK dinyatakan berlaku oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Dokumen KTSP SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Sesungguhnya bentuk otonomi lain yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas adalah penyusunan kurikulum pendidikan oleh satuan pendidikan. Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi (*Competency Based Curriculum*), bukan berbasis mata pelajaran

(*Subject Matter Based Curriculum*). Beda antara kedua pendekatan kurikulum tersebut adalah, pada kurikulum berbasis kompetensi (KBK) kurikulum disusun berdasarkan tingkat-tingkat kompetensi, dan ujiannya dalam bentuk uji kompetensi. Sedangkan kurikulum berbasis mata pelajaran disusun berdasarkan kelompok disiplin ilmu (bidang studi), dan ujiannya berbasis mata pelajaran.

UU Sisdiknas dalam Pasal 38 mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah, yang memuat standar isi, standar kompetensi dasar, dan standar kompetensi lulusan.

Perubahan yang paling mendasar dalam aspek manajemen kurikulum bahwa pendidikan harus mampu mengoptimalkan semua potensi kelembagaan yang ada dalam masyarakat, baik pada pendidikan yang dikelola pemerintah, masyarakat atau swasta. Persyaratan dasar penetapan jenis kurikulum antara lain:

- a. Kurikulum dikembangkan berdasarkan minat dan bakat peserta didik
- b. Kurikulum berkaitan dengan karakteristik potensi wilayah setempat misalnya sumberdaya alam, ekonomi, pariwisata dan sosial budaya yang dapat dikembangkan secara nyata sebagai dasar penguatan sektor usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat,
- c. Pembelajaran berorientasi pada peningkatan kompetensi keterampilan untuk belajar dan bekerja, lebih bersifat aplikatif, dan operasional
- d. Jenis keterampilan ditetapkan oleh pengelola program bersama-sama dengan peserta didik, orang tua, tokoh masyarakat dan mitra kerja (Irianto, 2011:103).

Berdasarkan paparan di atas dapat ditegaskan bahwa pengembangan

KTS harus memperhatikan kebutuhan peserta didik, lingkungan sosial, kompetensi yang diinginkan dan keperluan pengembangan sumberdaya manusia secara komprehensif dan berkelanjutan.

F. SK/KD PAI di SD/MI

Dalam pelaksanaan kebijakan KTSP SD/MI, maka semua rencana dan kegiatan serta evaluasi pembelajaran dikembangkan dari KTSP yang ditetapkan sebagai kebijakan pendidikan nasional, khususnya manifestasi dari pembaharuan/inovasi pendidikan.

Selanjutnya Pemerintah mengatur struktur kurikulum Pendidikan Umum khususnya pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dimana kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai dengan kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI ini disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Sedangkan pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajari oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan social, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

2. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA terpadu” dan “IPS terpadu”.
3. Pembelajaran pada kelas I sampai III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan kepada kelas IV sampai VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.
4. Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pelajaran per minggu secara keseluruhan.
5. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
6. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

Struktur kurikulum SD/MI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Struktur Kurikulum SD/MI

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
	I	II	III	IV, V, dan VI
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama				3
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni Budaya dan Keterampilan				4
8. PENJASKES				4
B. Muatan Lokal				2
C. Pengembangan Diri				2*
Jumlah	26	27	28	32

* Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Sebagai rangkaian tindak lanjut dari UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Nasional

mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk di dalamnya mengenai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam lampirannya sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengalaman nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan jenjang persekolahan yang secara nasional ditandai dengan ciri-ciri:

- a. Lebih menitik-beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain penguasaan materi;

- b. Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia;
- c. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk mengembangkan strategi dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan.

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam.

2. Tujuan

Pendidikan Agama Islam di SD/MI bertujuan untuk:

- a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.;
- b. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Alquran dan Hadis
- b. Aqidah
- c. Akhlak
- d. Fiqih
- e. Tarikh dan Kebudayaan Islam

Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Itu artinya pendidikan Agama Islam menjadi kebutuhan pribadi sosial dan bangsa dalam rangka membangun bangsa yang religius, beradab, maju dan sejahtera.

BAB VI

KEBIJAKAN STANDARISASI PENDIDIKAN

A. Standarisasi dan Pendidikan

Pendidikan yang mampu memberdayakan akan menjawab secara proaktif dinamika perubahan guna mempercepat kemajuan di masyarakat. Pendidikan yang antisipatif dan proaktif akan melahirkan manusia berkualitas tinggi untuk memajukan masyarakat menuju kehidupan masyarakat madani (*civil society*) .

Keberadaan masyarakat yang semakin maju memerlukan terpenuhinya kebutuhan yang terukur dan perwujudannya dengan syarat berbagai kompetensi di dalam berbagai dimensi kehidupan. Menurut Tilaar (2006:34), masyarakat modern pada abad ke-21 yang merupakan abad ilmu pengetahuan, era informasi, menuntut kehidupan bermasyarakat yang terbuka dan efisien. Kehidupan bersama semakin dipermudah dengan adanya produk-produk industri secara massal sehingga lebih terjangkau oleh rakyat banyak. Demikian pula lahirnya konsumen yang semakin cerdas sehingga menuntut produk-produk serta pelayanan yang tepat dan cepat. Bahkan nilai-nilai dalam masyarakat semakin kompleks dalam masyarakat liberal yang semakin lama semakin komersialistik dan hedonistik.

Pendidikan untuk mengetahui, pendidikan untuk berbuat/bekerja, pendidikan untuk memiliki pribadi dan pendidikan untuk hidup bersama sebenarnya sejalan dengan tuntutan pemberdayaan manusia melalui pembinaan potensi setiap pribadi melalui respon terhadap stimulus kurikulum yang disampaikan oleh guru. Keempat pilar pendidikan harus menjadi acuan pembaruan pendidikan yang mengakar pada empat

pilar pendidikan agar supaya tercapai cita-cita pendidikan nasional yang mampu menjawab tantangan global.

Menurut Irianto (2011:1) pembaharuan dan perkembangan zaman di mana pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks, kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai diformalkan dalam bentuk apa yang sekarang dikenal dengan persekolahan. Proses pendidikan terjadi menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilai yang hakiki tentang harkat dan martabat kemanusiaan.

Namun zaman terus berubah dengan segala manifestasi kebudayaan baru, sehingga diperlukan inovasi, pembaharuan, atau reformasi pendidikan menuju masyarakat yang lebih maju, sejahtera dan beradab. Reformasi pendidikan diorientasikan kepada respon proaktif terhadap perubahan eksternal yang disebabkan dinamika global. Dalam menghadapi masa depan, maka pendidikan perlu diarahkan dan menjawab empat pilar pendidikan sebagaimana ditawarkan UNESCO (1996). Adapun pilar pertama ialah belajar mengetahui (*learning to know*) yakni mendapatkan instrumen atau pemahaman, (2) belajar berbuat (*learning to do*) sehingga mampu bertindak kreatif di lingkungannya, (3) belajar hidup bersama (*learning life together*) yakni melalui pendidikan anak mampu berperanserta dan bekerjasama dengan orang lain di dalam semua kegiatan manusia dan, (4) belajar menjadi seseorang (*learning to be*) yakni suatu kemajuan penting yang merupakan kelanjutan dari ketiga sendi di atas (UNESCO, 1996:63). Keempat pilar tersebut merupakan satu kesatuan, karena banyak titik temu diantaranya dalam memberdayakan setiap pribadi anak yang tengah mengalami perkembangan dan mendapatkan bimbingan.

Di dalam belajar untuk mengetahui ditunjukkan bahwa arus informasi yang begitu cepat berubah dan semakin lama semakin banyak tidak mungkin lagi dikuasai oleh manusia karena kemampuan otaknya yang terbatas. Oleh sebab itu proses belajar mengajar seumur hidup ialah belajar bagaimana untuk berpikir (*learning to think*). Dengan sendirinya belajar yang hanya membeo tidak mempunyai tempat lagi dalam era globalisasi. Selanjutnya dunia abad ke-21 menuntut manusia Indoensia bukan hanya sekedar berpikir tetapi harus dapat berbuat (*to do*). Manusia berbuat adalah manusia yang ingin memperbaiki kualitas kehidupannya.

Standar dipahami sebagai satu ukuran. Produk-produk yang dihasilkan mesin atau industri memiliki standar yang diharapkan. Demikian pula dengan penghasil jasa juga menetapkan standar bagi manusia. Sejatinya kehidupan masyarakat yang demikian mengakomodir adanya standar dan kompetensi merupakan tuntutan-tuntutan yang mutlak. Selanjutnya Tilaar (2006:34) menjelaskan bahwa masyarakat konsumen menuntut produksi dan pelayan yang menyenangkan dengan kualitas tertentu yang semakin lama semakin meningkat karena persaingan dalam perdagangan bebas. Siapa yang tidak dapat bersaing, yang tidak secara terus-menerus meningkatkan mutu produksinya atau pelayanannya akan kalah dan mati karena tidak dihargai oleh konsumennya. Di dalam masyarakat demikian, diperlukan standar yang semakin lama semakin disempurnakan, demikian pula kemampuan-kemampuan dari para manajer serta pekerja di dalam produksi dan pelayanan, dituntut semakin terampil dan canggih agar supaya dapat menghasilkan barang-barang produksi dan layanan (*service*) dengan lebih efisien, cepat, memenuhi selera konsumen dan memenuhi harapan serta kemampuan daya beli masyarakat.

Teknologi menjadi instrumen penting dalam memudahkan kehidupan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kemudian Uno (2010:98) menjelaskan bahwa teknologi merupakan suatu kawasan yang dapat membantu memecahkan masalah kehidupan umat manusia dari masa ke masa secara efektif dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik banyak dihadapkan pada aneka ragam jenis dan produk teknologi baik yang dijumpai, dimanfaatkan, dialami, maupun yang dinikmati. Tegasnya, mutu pelayanan dan produk yang dihasilkan dan mengiringi teknologi menjadi penting di dalam mengantisipasi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya secara komprehensif.

Dengan tegas Tilaar (2006:35) berpendapat bahwa dalam rangka menghasilkan produk-produk yang tinggi mutunya dan sesuai dengan selera konsumen diperlukan standar-standar yang disepakati bersama. Standar-standar tersebut bukan hanya berlaku untuk memenuhi tuntutan pabrik tetapi juga pada berbagai pemasok yang memberikan bahan-bahan yang akan diolah lebih lanjut oleh pabrik. Maka lahirlah kesepakatan-kesepakatan internasional yang diatur di dalam *Inter-*

national Standardization Organization (ISO). Perdagangan dunia yang serba terbuka dewasa ini tentunya memerlukan standar yang disepakati agar dapat diikuti oleh para produsen dan pemasok. Dengan demikian dapat terjadi persaingan antar produsen, antar negara, antar lembaga yang mengeluarkan *service*, termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Dewan perdagangan dunia (WTO) dewasa ini berupaya untuk memasukkan *service* pendidikan di dalam komoditi perdagangan bebas. Upaya ini bukan tidak mendapatkan tantangan dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, pemasukan pendidikan sebagai salah satu komoditi yang dapat diperdagangkan, diajukan oleh Departemen Perdagangan. Upaya ini di Amerika Serikat sendiri mendapat tantangan dari dunia pendidikan.

Lebih jauh dijelaskan Tilaar (2006:35) lahirnya standarisasi dalam dunia industri merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Standar akan memudahkan proses produksi demikian pula dalam distribusi serta layanan purna jual dari suatu produk. Dalam dunia industri kebutuhan standarisasi pertama-tama diterapkan didalam pabrik mobil Ford pada permulaan abad ke-20. Adalah *Henry ford* yang pertama-tama menerapkan standarisasi ini di dalam produksi mobil Ford model T yang sangat populer pada permulaan abad ke-20 yang telah menyebabkan industri mobil berkembang dengan sangat pesat. Prinsip ban berjalan dari Hendry Ford telah menyebabkan produksi mobil secara masal, *uniform*, cepat dan harga mobil yang terjangkau sehingga para buruh sendiri dapat memiliki hasil produksinya.

Untuk itu Ford memberikan gaji yang lumayan besarnya bagi para buruhnya sehingga penjualan mobil Ford menjadi sangat populer sampai ke masyarakat luas. Prinsip produksi mobil Ford seperti itu memerlukan standar-standar tertentu sehingga waktu dan tenaga yang diperlukan untuk membuat sebuah mobil sangat dipersingkat. Efisiensi-efisiensi dalam proses produksi mobil Ford tersebut terkenal dengan Fordisme yang dipopulerkan oleh Antonio Gramsci. Fordisme merupakan anak dari revolusi industri abad ke 21 yang bukan saja melahirkan produk-produk murah dan bermutu dengan serba cepat dan efisien, tetapi juga telah melahirkan kelompok kaum buruh yang ternyata dapat diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidup sendiri.

Fordisme telah lahir dari pandangan perlu adanya efisiensi dalam manajemen produksi. Konsep ini dilahirkan oleh ahli manajemen F. W. Taylor dengan *scientific management*-nya. Padangan *scientific modern* pada akhirnya bukan hanya diberlakukan di dalam dunia industri tetapi juga dalam bidang-bidang kehidupan lainnya termasuk dalam pengelolaan sistem pendidikan. Di dalam *scientific management* bukan hanya memerlukan pengolahan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, tetapi juga memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang khusus dari para pengelola.

Menurut Kunandar (2007:11) pemicu perubahan dalam lingkungan pendidikan dan respons atas perubahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Globalisasi menyebabkan informasi bergerak amat cepat dan tanpa batas. Materi pembelajaran yang selama ini menjadi otoritas dan penguasaan guru kini dapat diakses siapa saja termasuk para siswa melalui internet. Sumber belajar pun tersedia amat luas tidak hanya terbatas pada buku teks. Hal ini menuntut peningkatan kemampuan kompetensi sumberdaya pendidikan.
2. Kemajuan iptek yang sangat cepat dan massif menuntut kemampuan sumberdaya pendidikan melakukan penyesuaian yang sangat signifikan.
3. Mobilitas tenaga kerja baik yang profesional maupun pekerja teknis pada tataran internasional yang gerakannya melintasi batas-batas negara menuntut pendidikan semakin dikelola secara bermutu.
4. Krisis multidimensional mendorong dunia pendidikan untuk dapat semakin memperkuat diri, dikelola secara lebih baik dan efisien dengan akuntabilitas tinggi sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa dengan mendorong terbukanya mobilitas vertikal SDM.
5. Desentralisasi pendidikan sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan mendesak dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini menuntut peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan komunikasi kepala sekolah

dengan pihak-pihak lain seperti Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya.

6. Pendanaan dan komitmen peningkatan anggaran pendidikan dari pemerintah yang masih rendah, demikian pula partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang masih belum memadai mendorong warga sekolah tak henti-hentinya mengupayakan lahirnya kreativitas dan inovasi dalam ketercapaian program-program sekolah yang terus berkembang.
7. Etos kerja tenaga kependidikan masih rendah sehingga menghambat percepatan penguasaan kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan iptek dan kurikulum baru.
8. Prestasi belajar siswa masih rendah dengan indikator nilai UN dan kemampuan masuk perguruan tinggi masih rendah.

Dengan perkembangan tersebut, maka penetapan standarisasi pendidikan dan kompetensi guru merupakan kebijakan pendidikan nasional. Dengan kebijakan 8 standar nasional pendidikan, berarti pendidikan nasional sudah memperhatikan secara manajerial tentang pentingnya pendidikan bermutu dalam konteks eksistensi bangsa Indonesia yang memiliki keunggulan pada masa yang akan datang.

Standar nasional pendidikan adalah pernyataan mengenai kualitas hasil dan komponen-komponen sistem yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah hukum RI. Pada jenjang, jenis atau jalur pendidikan tertentu (Hamalik, 2008:91).

Dengan terpenuhi 8 standar nasional pendidikan sesuai dengan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan, yang mencakup: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar proses, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan (Kumpulan Permendiknas tentang Standar Nasional Pendidikan, 2010). Kedelapan standar nasional pendidikan ini yang wajib dicapai oleh masing-masing satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

B. Kualitas dan Standarisasi Pendidikan

Mutu sudah menjadi faktor penting dalam dunia maju. Menurut Sukmadinata, Dkk (2006:6) mutu pendidikan atau mutu sekolah tertuju kepada mutu lulusan. Merupakan sesuatu yang mustahil, pendidikan atau sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu, jika tidak melalui proses pendidikan bermutu pula. Merupakan suatu yang mustahil pula terjadi proses pendidikan yang bermutu, jika tidak didukung faktor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu pula. Proses pendidikan yang bermutu harus didukung oleh personalia, seperti administrator, guru, konselor, dan tatausaha yang bermutu dan profesional.

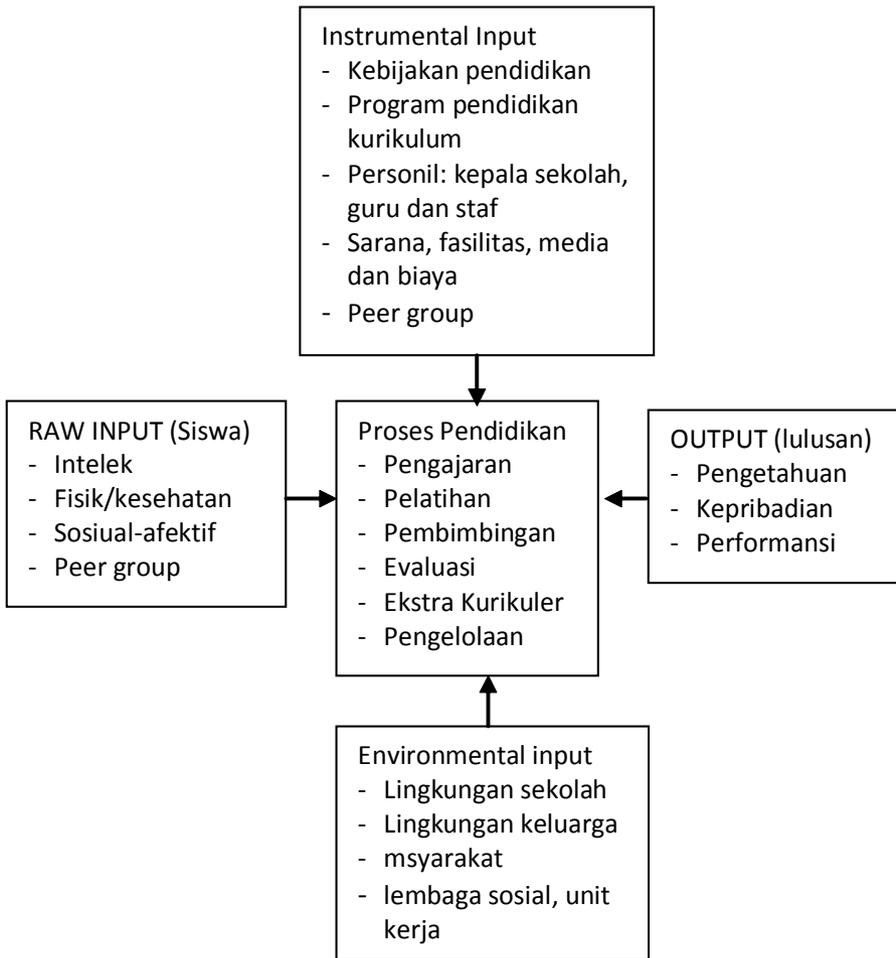
Mempedomani kepada pendapat Tilaar (2006:35) bahwa istilah kualitas mempunyai banyak arti. Kualitas dapat berarti *a degree of action*, sesuatu produk, bebas dari kekurangan –kekurangan (*freedom from defect*), pengertian ini dalam konteks ISO – 9000 berarti totalitas dari karakteristik yang memuaskan kebutuhan. Atau dengan singkat secara operasional berarti *fitness for use*. Suatu produk yang memiliki sifat-sifat yang memuaskan pelanggan adalah suatu produk yang berkualitas. Jadi pelanggan adalah satu-satunya yang menentukan apakah suatu produk atau servis berkualitas. Kepuasan ini dapat dilihat secara sadar apakah produk tersebut memberikan keuntungan atau kerugian di dalam penjualan, berkurangnya *market share* yang pada akhirnya menghasilkan kerugian. Inilah inti dari kualitas.

Mutu secara tradisional adalah suatu produk bermutu atau produk yang memenuhi spesifikasi internal (Plenert, 1999:115), jika dari sudut produsen-mutu berarti produk akhir memenuhi spesifikasi teknik. Sedangkan dalam organisasi jasa- mutu berarti melakukan pekerjaan dengan cara yang diinginkan atasan anda”. Perubahan selanjutnya untuk saat ini mutu adalah kepuasan pelanggan”.

Hal tersebut didukung pula oleh Gasperz (2002:5) sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media, serta sumber belajar yang memadai, baik mutu maupun jumlahnya, dan biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat, serta lingkungan yang mendukung. Mutu pendidikan bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen, pelaksana dan kegiatan pendidikan atau disebut sebagai mutu total “total quality”. Adalah suatu yang tidak mungkin hasil pendidikan yang bermutu dapat dicapai hanya

dengan satu komponen, atau kegiatan yang bermutu. Kegiatan pendidikan cukup kompleks, satu kegiatan, komponen, pelaku, waktu, terkait dan membutuhkan dukungan dari kegiatan, komponen, pelaku, serta waktu lainnya.

Adapun faktor-faktor yang terlibat dalam pengembangan mutu pendidikan secara sistemik dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar : Faktor-faktor Pengembangan Mutu Pendidikan

Dapat dipahami betapa berbagai komponen terkait secara sistemik dalam pendidikan akan menentukan pencapaian derajat mutu atau standar yang ditetapkan, tak terkecuali pencapaian mutu pendidikan pada tingkat lokal, regional maupun global.

Kemudian Plenert (1999:69) menambahkan bahwa mutu kelas dunia terletak pada kepuasan pelanggan, bukan pada teknisi. Suatu produk yang mampu menciptakan pernyataan “pelanggan sangat puas”, dengan produk anda sehingga mereka tidak akan berpikir untuk beralih kepada orang lain untuk mendapatkan produk tersebut”.

Terdapat tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu :

1. Dimensi kualitas bisnis.
Artinya sejauh mana bisnis tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Dimensi produk. Sejauh mana produk dan servis memenuhi pelanggan tertentu (*specific customer*)
3. Dimensi organisasi. Sejauh mana organisasi mempunyai efisiensi secara maksimal dan efektif, mempunyai *waste* yang minimum, manajemen yang efisien dan mempunyai *good human relation*.

Tilaar (2006) menjelaskan di dalam memproduksi suatu produk yang berkualitas, diperlukan tiga komponen di dalam segi tiga : *quality insurance*, *quality improvement*, dan *quality control*. Ketiga jenis kegiatan ini menentukan apa yang disebut *quality management*.

Itu artinya konsep mutu di sini berkenaan dengan manajemen mutu, atau manajemen peningkatan mutu. Dalam konteks ini diartikan oleh Mohammad Ali (2007:621), pada hakikatnya manajemen mutu adalah semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian hingga kepemimpinan yang menentukan kebijakan mutu, tujuan dan tanggung jawab serta implementasinya melalui alat-alat manajemen, seperti perencanaan, pengendalian, penjaminan dan peningkatan mutu.

Lebih lanjut Muhammad Ali (2007) menegaskan bahwa dalam memproduksi barang atau jasa, maka produsen membuat standar atau kriteria baku yang didasarkan atas hasil pengkajian harapan-harapan pelanggan terhadap keadaan atau kondisi produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan. Implikasi dari penggunaan konsep ini pada praktik manajemen adalah dalam rangka memproduksi barang atau jasa, pertimbangan, aspirasi dan keinginan pelanggan harus diperhitungkan dan menjadi fokus perhatian. Selain itu, semua faktor yang terkait dengan

proses produksi harus dikelola sedemikian rupa sehingga menjamin produk yang dihasilkan memenuhi bahkan melebihi keinginan dan harapan pelanggan.

Dalam praktiknya, mutu suatu barang atau jasa yang diproduksi itu tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan komitmen dan budaya kerja dari setiap orang yang terlibat dalam organisasi itu sendiri serta penerapan filosofi bahwa untuk menghasilkan produk yang bermutu maka segalanya harus baik dan bermutu sejak dari awal hingga proses berakhir. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan untuk membuat semua yang terlibat dalam organisasi itu memiliki komitmen dan budaya kerja yang menuntun ke arah dihasilkannya produk bermutu dan merekapun harus menerapkan filosofi yang kuat tentang mutu yang unggul. Dengan demikian yang bermutu itu adalah selain sesuatu produk atau jasa memberikan kepuasan kepada pelanggan juga harus diupayakan *zero defect* (kerusakan nihil) dapat terwujud.

Tilaar (2006) menjelaskan di dalam *proses quality control* seperti yang dikemukakan oleh David Hoyle ditunjukkan beberapa standar memerlukan implementasi dan verifikasi, maka diadakan suatu upaya perbaikan. Jadi standar bukan merupakan suatu yang statis tetapi merupakan suatu yang dinamis yang memerlukan *action* atau implementasi.

Menurut Ali (2007) dalam bidang industri *manufactur* maupun jasa, pembakuan mutu telah dilakukan secara internasional. Pembakuan mutu ini adalah untuk kepentingan penerapan manajemen mutu yang bersifat formal melalui evaluasi yang bersifat eksternal, seperti halnya yang dilakukan melalui sertifikasi yang dilakukan oleh ISO (*International Standard organization*).

Dalam konteks ini, Tilaar (2006) menjelaskan lebih lanjut ISO merupakan suatu segi dari *International standard for quality system*. Sistem tersebut membuat rincian mengenai tuntutan dan dari kombinasi untuk disain serta *assesment* dari sistem manajemen. Tujuan ialah produk dari servis yang dihasilkan memenuhi tuntutan-tuntutan yang spesifik. Dengan defenisi ini produk tidak memenuhi ISO-9000, yang memenuhi ISO- 9000 adalah organisasi. ISO – 9002 berisi dua tipe standar yaitu *quality insurance* dan *quality management*. *Quality standard* manajemen diatur oleh ISO – 9004-4 *Guideline for Quality Improvement*. ISO- 9004-5

Guideline for Quality Brands, ISO-900-6 Guideline to Quality Insurance for Project Management.

Menurut Tilaar (2006:36) asal-usul dari ISO – 9000 tidak diketahui dengan pasti. Orang Mesir ternyata telah mempraktekkan sistem kualitas di dalam membangun piramida. Sedangkan *Quality control* sebagai elemen dari *Quality Management* baru lahir sesudah perang Dunia II dengan lahirnya buku J.M. Juran, *Quality Control Handbook* pada tahun 1951.

Apakah sertifikasi ISO-9000 merupakan akhir dari kualitas ? Ternyata memperoleh sertifikat ISO-9000 bukan merupakan akhir dari kualitas ? Tentu saja tidak, karena memperoleh sertifikat ISO-9000 baru merupakan langkah pertama dalam membina budaya kualitas. Dengan memperoleh sertifikat ISO-9000 sebenarnya merupakan suatu ujian akhir. Lulusnya seorang dari ujian akhir belum berarti akhir dari perkembangan seseorang. Kelulusan tersebut hanya menyatakan bahwa telah dicapai minimum standar, tetapi bukan berarti bahwa hasil atau produk yang dicapai dapat memenangkan persaingan dengan kompetitor.

Menurut Gaspersz (2005 : 5) ada tiga kategori produk, yang mencakup: (1) barang (*goods*) misalnya: ban, mobil, telepon, komputer, dan lain-lain, (2) perangkat lunak (*soft ware*) misalnya program komputer, laporan keuangan, prosedur dan instruksi, (3) jasa (*services*) misalnya, perbankan, asuransi, transportasi, pendidikan, dan lain-lain.

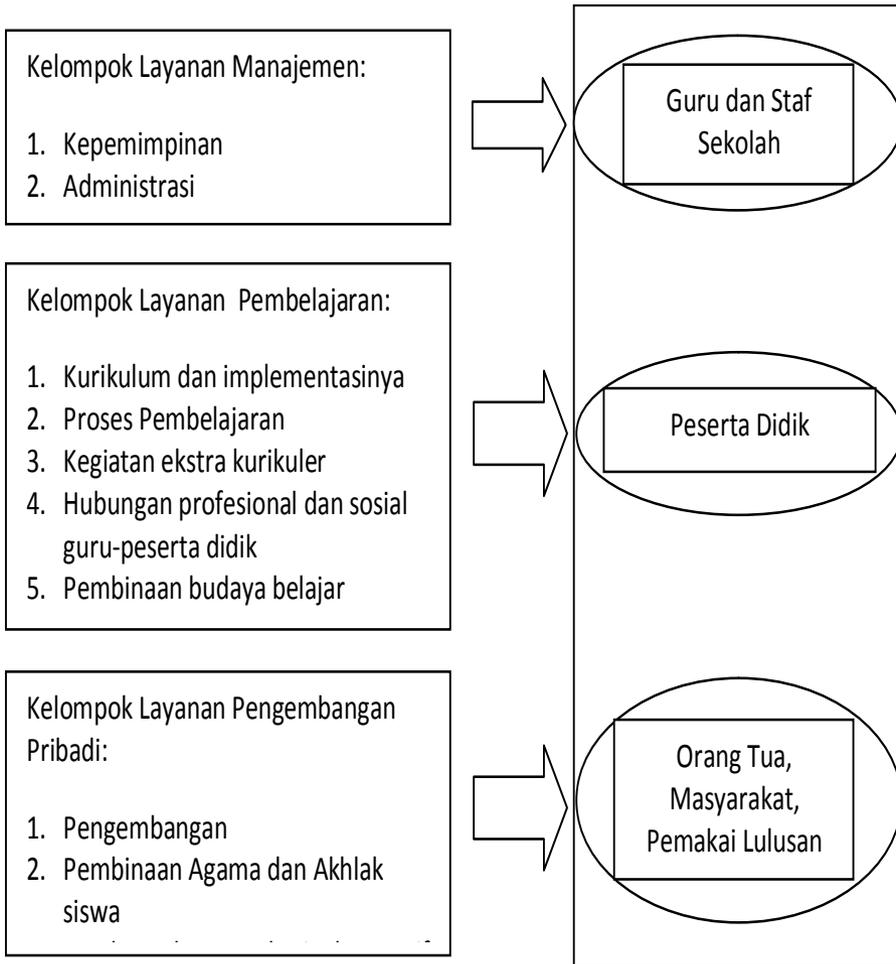
Dr. W. Edward Deming seorang ahli manajemen Amerika mengajarkan kepada Jepang tentang konsep kualitas. Menurut Deming konsep pengendalian kualitas secara terus-menerus (*Continuous Quality Improvement*) inilah yang merupakan proses industri. Bermula dari ide untuk menghasilkan suatu produk pengembangan produk, proses produksi sampai kepada distribusi kepada pelanggan, berdasarkan informasi sebagai umpan-balik yang dikumpulkan dari pengguna produk kemudian dikembangkan ide-ide baru dalam meningkatkan kualitas produk. Inilah yang terkenal dengan ‘siklus Deming’ yaitu merencanakan (*plan*), melaksanakan (*do*), mempelajari (*study*) dan bertindak (*atc*).

C. Standarisasi Pendidikan: Suatu Keniscayaan

Dalam perkembangan terkini bahwa pendidikan berkualitas semakin diperlukan masyarakat, dengan formulasi pelayanan akademik, manajemen, dan lulusan yang unggul. Tilaar (2006) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan. Setiap proses yang bertujuan tentunya mempunyai ukuran atau *yardstick* sudah sampai dimana perjalanan kita di dalam mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan tujuan fisik seperti jarak suatu tempat atau suatu target produksi, tujuan pendidikan merupakan suatu yang *intangibile* dan terus menerus berubah dan meningkat. Tujuan pendidikan selalu bersifat atau “tujuan yang berlari”. Hal ini berarti tujuan pendidikan setiap saat perlu direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia diperlukan standard yang perlu dicapai di dalam kurun waktu tertentu di dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Hal ini berarti perlu perumusan yang jelas dan terarah dan fisible mengenai tujuan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan dapat berupa tujuan ideal, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan rencana strategis yang terlihat dengan keadaan dan waktu tertentu. Apabila sebagai syarat utama didalam proses pendidikan adanya rumusan tujuan yang jelas, maka didalam pencapaian tujuan sementara atau rencana strategis perlu dirumuskan langkah-langkah strategis dalam mencapainya. Langkah-langkah strategis ini dapat dicapai melalui berbagai kegiatan didalam proses pendidikan. Apabila tidak ada patokan atau *yardstick* yang dijadikan pedoman untuk dicapai, maka sudah barang tentu proses pendidikan akan kacau balau karena tanpa arah yang jelas dalam praktiknya.

Muhammad Ali (2007:625) menjelaskan keberadaan sekolah sebagai penyedia jasa layanan pembelajaran memiliki kelompok layanan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar : Kelompok Layanan dalam Pembelajaran

Bagaimanapun, harus dilihat bahwa pendidikan tidak sama dengan penjinakan binatang Karena kita berhadapan dengan manusia yang mempunyai harkat sendiri, kemampuan dan potensi sendiri yang berjenis-jenis. Di dalam kaitan inilah makna pendidikan yang sebenarnya yaitu bagaimana membawa anggota-anggota dari suatu kelompok manusia yang memerlukan pendidikan diarahkan oleh suatu tujuan yang sama. Di sinilah letak fungsi dari suatu Negara yaitu membantu warganya untuk mencapai tujuan yang disepakati di dalam negaranya. Dalam hal ini UUD 1945 telah merumuskan suatu tujuan yang ideal yaitu mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Sistem pendidikan nasional merupakan suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita ideal tersebut ialah warga Negara

Indonesia yang cerdas. Untuk mengetahui sejauh mana tercapainya manusia Indonesia yang cerdas itu dapat dilihat dalam kenyataan sehari-hari dalam kehidupan bersama masyarakat Indonesia. Manusia Indonesia yang cerdas adalah manusia Indonesia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan berprestasi sebagai seorang yang bermoral. Moral yang dimiliki manusia Indonesia cerdas pertama-tama adalah sebagai warga Negara Indonesia yang bersatu. Moral tersebut disinari oleh Pancasila yaitu suatu ikrar bersama dari bangsa Indonesia untuk hidup bersama mencapai cita-cita nasional mengantisipasi perubahan.

Untuk menerapkan model penjaminan mutu dalam bidang pendidikan, maka perlu adanya hal-hal berikut:

- 1) Komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan. Komitmen tersebut terutama dicerminkan dari kinerja yang semaksimal mungkin diarahkan untuk memberikan jasa pendidikan kepada pelanggan, terutama pelanggan eksternal primer yang sesuai dengan atau melebihi kebutuhannya.
- 2) Penilaian kebutuhan (*need assesment*). Agar diketahui kebutuhan yang sebenarnya dari pelanggan dalam rangka menyeleraskan semua aktivitas dan sumberdaya yang digunakan dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan perlu dilakukan identifikasi dan penilaian kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui survei kebutuhan.
- 3) Penerencanaan strategik. Apabila kebutuhan pelanggan telah dapat dikenali dan spesifikasi mutu telah ditetapkan, selanjutnya disusun perencanaan strategik. Langkah-langkah penyusunan rencana strategik ini meliputi perumusan visi, misi, identifikasi pelanggan dan kebutuhannya, analisis K2PA (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dan identifikasi faktor-faktor tertentu keberhasilan penyusunan rencana strategik perumusan kebijakan dan rencana mutu, penyusunan rencana biaya dan evaluasi serta umpan balik.
- 4) Penyusunan rencana taktis. Rencana taktis ini berkaitan dengan bagaimana melaksanakan segala apa yang sudah ditetapkan dalam rencana strategik, terutama menyangkut siapa akan melakukan apa, cara melaksanakan tugas-tugas, waktu penye-

lesaian setiap tugas dan sumberdaya yang memungkinkan untuk digunakan.

- 5) Penilaian kemajuan. Salah satu kegiatan penting dalam kegiatan perbaikan mutu adalah penilaian kemajuan. Hal ini mencakup semua langkah yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan kemajuan yang telah dicapai dalam setiap langkah di atas (Ali, 2007:632).

Mencermati fenomena eksternal yang berkembang, maka sistem pendidikan nasional memerlukan standar. Suatu standarisasi mutu pendidikan yang dapat diterima dan diusakan oleh semua komponen pendidikan di sekolah dan daya dukung dari masyarakat. Dalam konteks ini standar tersebut bukan dipahami sebagai sesuatu yang kaku, tetapi standar yang terus menerus meningkat dengan kata lain kualitas pendidikan nasional semakin lama semakin meningkat sesuai dengan keperluan perubahan zaman. Menurut Tilaar (2006) standarisasi pendidikan nasional, diperlukan dengan beberapa alasan, yaitu:

- 1) *Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan politik.* Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia kita memerlukan *yardstick* untuk menilai sejauh mana warga Negara Indonesia itu mempunyai visi yang sama, pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan Negara kesatuan tersebut.
- 2) *Standard pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan globalisasi.* Dunia dewasa ini telah merupakan suatu kampung global sehingga satu Negara tidak dapat bersembunyi lagi. Didalam kehidupan global terjadi persaingan yang semakin lama semakin tajam, oleh sebab itu setiap warga Negara perlu mengangkat dirinya sendiri didalam kehidupan yang penuh persaingan. Kehidupan yang penuh persaingan bukan berarti kehidupan yang penuh permusuhan tetapi terus menerus memperbaiki dirinya dengan meningkatkan kemampuan diri agar supaya tidak menjadi budak dari bangsa-bangsa yang lain.
- 3) *Standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan (progress).* Setiap Negara tidak menginginkan negaranya tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain. Apabila dewasa ini Indonesia masih tergolong kedalam Negara berkembang seperti

kelompok D-8 yang mengadakan konferensinya di Bali (Mei 2006), tetapi tentunya mempunyai cita-cita untuk meningkatkan martabatnya sebagai Negara maju. Untuk menjadi anggota dari Negara maju tentunya diperlukan kualitas sumber daya manusia yang tinggi bukan hanya menjadi *consumer* dari produk-produk Negara maju lainnya tetapi juga dapat berpartisipasi didalam meningkatkan mutu kehidupan manusia.

Lebih lanjut Tilaar (2006) mempertanyakan bagaimanakah profil pendidikan nasional di Indonesia dewasa ini? Didalam berbagai survey dan penelitian menunjukkan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia tergolong rendah. Tidak ada satupun juga universitas di Indonesia yang masuk kelompok 100 universitas terbaik di Asia, apalagi ditingkat dunia. Apabila kualitas pendidikan tingginya sudah demikian rendahnya apalagi pendidikan dasar dan menengahnya, tentunya kualitas tidak lebih baik. Memang seperti yang telah dijelaskan, bukan berarti bahwa kualitas manusia Indonesia lebih buruk dibandingkan dengan kualitas bangsa yang lain. Kemenangan-kemenangan pada tingkat olimpiade fisika misalnya menunjukkan bagaimana siswa-siswa Indonesia dapat menggondol medali emas. Demikian pula beberapa sarjana tamatan universitas-universitas di Indonesia dapat membuat prestasi di Negara asing namun secara keseluruhan kualitas pendidikannya belum termasuk berkualitas Internasional.

D. Pendidikan Nasional : Perlu Pembaharuan

Pembaharuan pendidikan dirancang melalui kebijakan pendidikan. Menurut Tilaar (2006) dalam teori perencanaan pendidikan dikenal tiga komponen besar yang menentukan standar pendidikan, yaitu:

1. Komponen standar kurikulum atau dikenal pula sebagai standar isi. Didalam kurikulum ditentukan mata-mata pelajaran untuk masing-masing jenjang pendidikan serta pengaturan mengenai alokasi jamnya setiap minggu, bulan dan tahun. Selain itu kurikulum disusun berdasarkan sudut pandang seperti kurikulum yang berorientasi kepada mata pelajaran (*subject matter curriculum*), kurikulum yang berorientasi kepada kebutuhan anak

(*child centered curriculum*) dan kurikulum yang berdasarkan kepada kebutuhan kehidupan nyata (*life-skill curriculum*).

2. Standarisasi *performance* (unjuk kerja). Standard isi baru merupakan tuntutan yang dimajukan kepada peserta didik untuk dikuasai. Tingkat penguasaan materi yang disodorkan kepada peserta didik bahkan yang sangat menentukan standard proses pendidikan. Seperti telah dijelaskan *performance* tersebut merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Suatu ujian yang dilaksanakan sewaktu-waktu merupakan profil sekejap dari kompetensi isi. oleh sebab itu didalam proses pendidikan, seorang guru merupakan seorang ayah yang mengetahui dengan lebih tepat proses pencapaian kompetensi. Pekerjaan seorang guru sehari-hari disebut suatu pekerjaan evaluasi. Antara ujian dan evaluasi terdapat perbedaan yang sangat besar.
3. Kesempatan belajar (*opportunity to learn-OTL*). Didalam OTL tersebut termasuk biaya yang tersedia untuk melaksanakan tugas-tugas rutin dan tugas-tugas inovatif didalam lingkungan sekolah. Termasuk didalamnya fasilitas fisik gedung yang menyenangkan, dana rutin dan dana untuk aktivitas.

Tilaar (2006) menjelaskan bahwa reformasi pendidikan melalui berbagai standard yang disusun tentunya mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan standard nasional dirasakan bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan demokrasi. Seperti diketahui wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan terletak di Negara Bagian (*State*) dan bukan berada pada pemerintah federal. Standarisasi akan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
2. Nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh masyarakat Amerika melalui konstitusinya melarang adanya standard nasional yang dipaksakan dari atas, dri pemerintah federal. Tidak ada standard nasional.
3. Masyarakat demokrasi Amerika adalah masyarakat yang disusun berdasarkan system merit (*merit system*). Masyarakat yang berdasarkan system merit tidak didasarkan kepada garis keturunan

atau feodalisme dalam berbagai bentuk tetapi kepada berbagai kemampuan pribadi. Seperti yang telah kita lihat kemampuan pribadi ditentukan oleh perbedaan-perbedaan intelegensi. Perbedaan intelegensi diberikan kesempatan yang sama untuk dikembangkan. Inilah salah satu prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi. Seperti yang telah diuraikan, pengakuan terhadap inteligensi inilah yang merupakan pintu masuk dari budaya tes inteligensi.

4. Standard dunia. Dipacu oleh kenyataan bahwa Amerika merasa terancam didalam dunia yang semakin terbuka lebar akan saingan dengan bangsa-bangsa yang lain dan menyadari bahwa perbedaan tersebut harus segera diperbaiki melalui perbaikan pendidikan.

Menurut Tilaar (2006) gerakan reformasi melalui standarisasi diterima secara antusias oleh masyarakat Amerika. Golongan kelompok yang pro terhadap standarisasi menyimpulkan adanya hal-hal yang positif yang telah dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat harapan dari para siswa untuk berprestasi lebih baik.
2. Para siswa menemui tantangan yang akan diatasi sebagai memotivasi proses belajarnya.
3. Terjadinya pengelompokan yang lebih heterogen dari para siswa karena terarah kepada standard yang sama.
4. Para siswa lebih responsif atas kebutuhan keragaman kebutuhannya.
5. Para siswa lebih aktif belajar
6. Terbentuknya kelompok-kelompok belajar siswa (*small group learning*)
7. *Performance* para siswa lebih baik dari hanya menggunakan tes *multiple choice*
8. Perkembangan berfikir kritis para siswa
9. Siswa belajar untuk pengertian dan bukan sekedar untuk meningkatkan nilai.
10. Siswa mempelajari hal-hal yang esensial
11. Waktu di sekolah banyak yang tersita untuk organisasi belajar
12. Terjadi variasi didalam proses belajar mengajar.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kelompok yang kontra terhadap standarisasi memberikan hasil-hasil penelitian yang berlawanan dengan apa yang telah dicapai menurut kelompok yang pro. Padahal, standarisasi pendidikan menjadi syarat bagi menata ulang sistem pendidikan yang lebih maju dan mencerdaskan masyarakat dan bangsa.

E. Standarisasi dan Profesionalisme Guru

Profesi guru saat ini semakin menarik bagi generasi muda. Apalagi setelah dilaksanakannya sertifikasi guru sebagai standarisasi bagi guru agar semakin menjamin bahwa guru yang mengajar di sekolah-sekolah adalah guru yang profesional. Guru profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing (Yamin dan Maisah, 2010:28).

Ternyata peranan guru didalam reformasi sangat menentukan. Namun demikian didalam berbagai penelitian menunjukkan afiliasi guru didalam gerakan reformasi tersebut terutama diarahkan kepada afiliasinya terhadap disiplin ilmu dan politik, dan bukan terhadap guru sebagai agen yang memfasilitasi proses pendidikan.

Dalam hal ini timbul masalah didalam program-program pembinaan profesional guru. Menurut Tilaar (2006) di dalam berbagai penelitian ternyata hasil-hasilnya sebagai berikut:

1. Terdapat kontradiksi didalam persepsi guru atas program-program peningkatan profesional guru. Para guru cenderung ingin melihat hasil yang cepat sedangkan pembinaan tersebut harus melalui pelaksanaan dilapangan sehingga meminta waktu yang cukup.
2. Terdapat kontradiksi didalam program pembinaan yang ingin mengumpulkan guru sebanyak mungkin dan oleh sebab itu program-program tersebut bersifat sangat dangkal (*supervisial*).
3. Program-program pembinaan guru terasa kurang adanya tindak lanjut.

4. Program-program biasanya terbentuk “*telling and discussion*” yang sangat dangkal (*supervisial*).

Hasil-hasil penelitian program pembinaan profesi guru tersebut di atas sangat mirip dengan apa yang terjadi pada lembaga-lembaga atau balai pendidikan guru (BPG) yang dibentuk di Indonesia di setiap provinsi pada masa orde baru. Program-program yang dilaksanakan bersifat sangat rutin dan tidak ada *follow up*.

Standarisasi juga berkenaan dengan cara mengajar dari para guru. Menentukan standarisasi proses mengajar ternyata sangat sulit. Standard mengajar ternyata ditentukan oleh faktor-faktor kepribadian seorang guru disamping kompetensinya dalam menguasai metodologi mengajar. Sifat-sifat individual seperti sifat-sifat yang humoristik, kehangatan seorang pribadi dan kepemimpinan didalam memotivasi para siswa sangat menentukan didalam keberhasilan belajar siswa. Guru sebagai pemimpin belajar dalam arti guru sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana dan pengontrol kegiatan belajar peserta didik (Uno, 2007:27).

Sungguhpun demikian di dalam mata pelajaran tertentu memang diperlukan keterampilan tertentu dari seorang guru profesional. *National Research Council* (NRC) merekomendasikan untuk guru sains dan matematika di dalam pembinaannya harus aktif dalam penelitian. Bagaimana mungkin seorang guru sains dan matematika dapat membangkitkan minat para siswanya untuk meneliti kalau guru itu sendiri tidak pernah turun ke lapangan untuk meneliti dalam kerangka mendidik secara profesional. Di sini dapat ditegaskan bahwa standarisasi banyak ditentukan oleh kualitas profesional seorang guru.

Menurut Sulung Nofrianto (2008:42) bagi guru yang diharapkan diperlukan beberapa kecerdasan komprehensif, yang mencakup:

1. Aspek Kecerdasan Spiritual

Aspek kecerdasan spiritual, ada beberapa hal yang sebaiknya dimiliki oleh guru pematik hati, di antaranya:

- a. Teladan kehidupan spiritualitas sang guru
 - 1) Senantiasa mendirikan shalat lima waktu
 - 2) Pandai membaca Al-Qur'an
 - 3) Rajin puasa sunnah

- b. Mendoakan muridnya dunia akhirat
 - 1) Memohon ampunan dan memaafkan
 - 2) Memohonkan kecerdasan dan rahmat
- c. Ikhlas
- d. Menasihati kebaikan
- e. Di atas orang yang berilmu ada Yang Maha Mulia
- f. Itqan

2. Aspek Kecerdasan Emosi

Kecerdasan emosi adalah pengetahuan mengenai diri sendiri, kesadaran diri kepekaan sosial, empati, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain. Menurut penelitian, aspek ini merupakan penentu yang lebih akurat dalam keberhasilan komunikasi, hubungan sosial, dan kepemimpinan dari pada kecerdasan intelektual.

Melihat peran penting aspek kecerdasan emosi dalam pembentukan karakter siswa di dunia pendidikan, karenanya guru hendaknya memiliki beberapa resep jitu untuk memikat hati muridnya dengan bersikap:

- a. Sabar
- b. Adil
- c. Jujur
- d. Berani
- e. Penuh perhatian
- f. Percaya diri
- g. Konsisten
- h. Memahami kejiwaan murid
- i. Menghargai perbedaan antar individu
 - 1) Penerimaan
 - 2) Harapan

3. Aspek Kecerdasan Intelektual

Guru yang memikat hati harus cerdas secara intelektual. Selain tugas utama mendidik, guru juga memiliki kewajiban lain yaitu mengajar. Memang, sebaiknya seorang guru harus memahami materi pelajaran yang akan diajarkan sebelum mengajar pada murid.

Kecerdasan yang dipahami disini tidak dimaksud seperti orang yang jenius. Setidaknya apa yang akan dipelajari oleh murid, sudah dipahami oleh guru. Dengan begitu para murid akan lebih nyaman berinteraksi dengan guru yang cerdas dan memiliki wawasan luas. Aspek kecerdasan intelektual akan dibahas melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Cerdas dan berwawasan luas
 2. *well-prepared*
 3. Menguasai teknologi
 4. Pandai berkomunikasi dalam bahasa asing, minimal dalam bahasa internasional atau bahasa Inggris
4. Aspek kecerdasan Sosial
- Secara umum kecerdasan sosial dapat diidentikkan dengan kecerdasan emosi. Pada satu sisi, sebuah perilaku dapat dikatakan sebagai kecerdasan emosi, disisi lain disebut sebagai kecerdasan sosial. Untuk membina hubungan sosial (*hablum minannas*) secara lebih hangat melalui perilaku sebagai berikut:
- a. Bertutur baik, benar, dan lembut
 - b. Bersahabat dengan murid
 - c. Berkolaborasi dengan teman sejawat dan karyawan lingkungan sekolah
 - d. Murah senyum dan humoris
 - e. *Problem solver*
 - f. Menjalankan semboyan Ki Hajar Dewantara
 - 1) *Ing ngarso sung tulodo*
 - 2) *Ing madya mangun karso*
 - 3) *Tut wuri handayani*
 - g. Suka memberi hadiah
5. Aspek Kecerdasan Kebugaran Fisik
- Aspek kecerdasan/kebugaran fisik adalah sekedar menawarkan anjuran untuk melakukan tahapan-tahapan berikut ini sebagai jalan mensyukuri nikmat Allah Swt. Dan agar para guru dapat memikat hati para muridnya dengan cara membentuk karakter dalam diri yang:

- a. Cinta kebersihan
- b. Giat dalam olahraga
- c. Cekatan
- d. Tampan/menawan

Selain memiliki aspek-aspek kecerdasan yang sudah disebutkan sebelumnya untuk menjadi guru pemikat hati kiranya perlu mempertajam keterampilan penunjang lain, meliputi:

- a. Keterampilan bercerita dan *acting*
- b. Keterampilan melukis
- c. Keterampilan bermain tebak-tebakan dan berpantun
- d. Keterampilan bersenandung dan memainkan alat musik
- e. Keterampilan melukis

Guru yang memikat hati juga harus menghindari hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi dagang ketika mengajar
- b. Gosip ketika mengajar
- c. Pelecehan seksual
- d. Sering bolos, tanpa alasan yang baik

BAB VII

KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU

A. Dinamika Pendidikan Masa Kini

Dalam abad ke-21 penggunaan teknologi baru dapat diharapkan menghasilkan pengaruh besar atas kehidupan sosial. Pendidikan tidak akan dan tidak mungkin kebal dari perubahan ini. Saat ini banyak ditemukan implikasi teknologi informasi baru bagi profesi pengajaran (Delors, 1998:281)”. Secara faktual, teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan saat ini sudah menjadi kecenderungan dan isu global, regional dan nasional. Itu artinya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mulai diadopsi dalam dunia pendidikan sejatinya merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari. Maka secara akademik, kemampuan guru perlu ditingkatkan dalam mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pengintegrasian pedagogik dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Apalagi dalam konteks profesi guru yang eksistensinya sangat menentukan tingkat mobilitas masyarakat dan bangsa dalam pentas kebudayaan global, maka para pemegang profesi guru juga harus dinamis merespon dan mengantisipasi dinamika eksternal. Kehadiran UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, yang mengharuskan kualifikasi pendidikan guru minimal strata satu (S1) dengan menguasai empat kompetensi inti, perlu semakin dimantapkan. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru nampak semakin diperhatikan. Sebagai pemegang jabatan profesional, maka seorang guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi sosial (Kepmendiknas, nomor 16/2007)”.

Sertifikasi guru merupakan kebijakan strategis bagi memajukan pendidikan nasional. Di satu sisi, sertifikasi merupakan standarisasi guru dari segi standarisasi kualifikasi akademik, sekaligus menilai kemampuan profesional dan peningkatan kualitas kompetensi guru sesuai dengan tuntutan. Bahkan dengan memperoleh sertifikat pendidik profesional, maka guru akan mendapatkan tunjangan profesi yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan guru. Sejatinya, pendidikan nasional sudah jauh tertinggal dalam hal kebijakan peningkatan kualitas dan pemberdayaan guru. Padahal bagi negara-negara maju seperti USA, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan, sertifikasi bukanlah hal baru.

Menurut Danim (2006:189) apresiasi guru terhadap profesinya dan peningkatan citra masyarakat terhadap guru dan profesi yang disandangnya tidak akan lepas dari fungsi perbaikan taraf hidup mereka. Karenanya, adalah tugas para pembuat keputusan juga untuk membenahi kesejahteraan guru, antara lain dengan menaikkan gaji atau tunjangan jabatan pendidikannya. Agenda kerja pejabat pemerintah atau pimpinan yayasan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru melalui perbaikan atas penghasilan mereka adalah wajar adanya, oleh karena kebutuhan hidup keluarga gurupun makin meningkat sejalan dengan pergeseran nilai uang. Sudah selayaknya para pendidik anak-anak Indonesia tidak terlalu dibebani masalah-masalah kebutuhan hidup primer keseharian. Tidak mungkin mereka dapat bekerja dengan baik, tanpa gizi, kesehatan dan rumah yang wajar untuk ukuran guru.

Dunia pendidikan sedang diguncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat. Perubahan dan permasalahan tersebut mencakup *social change, turbulence, complexity, and chaos*; seperti pasar bebas (*free trade*), tenaga kerja bebas (*free labour*), perkembangan masyarakat informasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang sangat dahsyat. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada fenomena yang sangat dramatis, yakni rendahnya daya saing sebagai indikator bahwa pendidikan belum mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP melaporkan bahwa Indonesia berada pada rangking 108 tahun 1998, rangking 109 pada tahun 1999,

dan ranking 111 tahun 2004 dari 174 negara yang diteliti. Rendahnya peringkat daya saing Indonesia di pasar global juga digambarkan pada permasalahan produktivitas sektor industri dan perdagangan.

Peningkatan kemampuan profesional guru dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Kemampuan, kematangan mengelola sendiri, pemenuhan kualifikasi, merupakan ciri-ciri profesional. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan profesional guru dapat juga diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum profesional menjadi profesional (Bafadal, 2004:66).

Menjawab tuntutan menjadi Guru profesional di era teknologi informasi boleh jadi merupakan perubahan guru yang mendesak. Ketika saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi begitu mempengaruhi tatanan kehidupan secara lebih imperatif. Maka di satu sisi era teknologi informasi memberikan peluang bagi guru untuk mempersiapkan dan mengembangkan kemampuan diri dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam memudahkan pembelajaran di sekolah. Itu artinya, adalah suatu keniscayaan bahwa guru perlu melakukan penambahan pengetahuan dan keterampilan melalui layanan *in-service training* atau *in-service education*. Diperlukan berbarengan dengan penyelenggaraan peningkatan kualifikasi pendidikan para guru yang belum berstandar S1, maka perlu ada gerakan melek komputer bagi para guru, baik bagi guru yang sudah tersertifikasi, maupun yang belum S1. Karena itu, makna pendidikan sepanjang hayat (PSH) memang harus dijalankan oleh para guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional dalam merespon pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat berkenaan dengan pekerjaan mengajar. Jangan sampai ada guru yang sudah tersertifikasi berada dalam kebingungan, atau tidak mau tahu karena tidak mampu lagi melejitkan kemampuannya sesuai tuntutan era informasi.

Selain itu, tentu saja pemerintah juga berkewajiban menyediakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi penyediaan pelatihan guru dan penyediaan sarana pembelajaran modern bagi percepatan pembelajaran bermakna sehingga dapat memaksimalkan potensi anak dengan meman-

faatkan sumberdaya pembelajaran yang semakin maju dan menantang. Konsep-konsep pendidikan yang dilaksanakan dengan didukung teknologi informasi adalah pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran elektrokik, multi media, *e-learning*, dan pengembangan strategi pembelajaran baru. Di sinilah pentingnya peningkatan kualitas guru, baik karena dorongan motivasi berprestasi, maupun respon terhadap fasilitas yang diberikan pemerintah. Maka kunci perubahan tersebut terletak pada guru. Para guru yang penguasaan bahasa digitalnya masih sangat rendah namun rendah pula motivasi meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, maka tergilas oleh zaman.

Untuk itu diperlukan penataran guru besar-besaran oleh pemerintah, dan lembaga terkait membumikan idealisme mempercepat guru profesional sesuai era informasi. Jadi tidak sekedar impian, atau profesional semu. Setidaknya dengan pelaksanaan sertifikasi guru yang dibarengi peningkatan penghargaan dengan perbaikan kesejahteraan segera sepenuhnya berjalan, maka program penataran TIK bagi guru, dan strategi-strategi baru pembelajaran berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi/ ICT, menjadi kebutuhan layanan profesional mendesak bagi para guru kita. Bagaimanapun, lahirnya *n-generation* menuntut komunitas guru yang berkualitas dan menguasai bahasa digital (Tilaar, 143).

Di sisi lain, pembangunan Indonesia sedang berfokus pada otonomi, dengan menyerahkan sebagian wewenang pusat kepada daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Otonomi daerah-pun, dalam pelaksanaannya telah memunculkan berbagai isu sentral, seperti diidentifikasi Kuncoro (2004) sebagai berikut.

- 1) Bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah. Sehingga pelaku pembangunan lebih mengutamakan putra daerah, yang terkadang mengabaikan kualitas.
- 2) Adanya tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah);
- 3) Lemahnya kordinasi antar sektor dan antar daerah, paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakarsa, dan aspirasi masyarakat daerah.

Dalam konteks ini, guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diseleng-garakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keber-hasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.

B. Standar Kompetensi Guru

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut menempatkan pentingnya upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dilakukan terus menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana dalam membangun watak bangsa (*nation character building*). Untuk itu, guru sebagai pribadi utama harus ditingkatkan kompetensinya dan diadakan sertifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Dalam kerangka inilah pemerintah merasa perlu mengembangkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, sebagai bagian dari standar pendidikan nasional (SPN) dan standar nasional Indonesia (SNI).

Pada hakikatnya, standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Apakah anda termasuk guru yang baik dan profesional? Dari berbagai sumber, dapat diidentifikasi beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional, yaitu:

- 1) Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik.
- 2) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat.
- 3) Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah.
- 4) Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas.

Karakteristik tersebut dapat dideskripsikan dan dijabarkan sebagai berikut.

1. Tanggungjawab Guru

Menurut Mulyasa (2007) setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga menjadi proses konservasi nilai, karena melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru.

Tanggung jawab guru dapat dijabarkan kedalam sejumlah kompetensi yang lebih khusus, berikut ini.

- a. Tanggung jawab moral; bahwa setiap guru harus mampu menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam pergaulan hidup sehari-hari.
- b. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah; bahwa setiap guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu mengembangkan kurikulum (KTSP), silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran yang efektif, menjadi model bagi peserta didik, memberi nasihat, melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik.
- c. Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan; bahwa setiap guru harus turut serta mensukseskan pembangunan, yang

harus kompeten dalam membimbing, mengabdikan dan melayani masyarakat.

- d. Tanggung jawab dalam bidang keilmuan; bahwa setiap guru harus turut serta memajukan ilmu, terutama yang menjadi spesifikasinya, dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan.

2. Peran dan Fungsi Guru

Lebih lanjut Mulyasa (2007) menjelaskan peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan sekolah. Di antara peran dan fungsi guru tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai pendidik dan pengajar; bahwa setiap guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur, dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran.
- b. Sebagai anggota masyarakat ; bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, harus menguasai psikologi sosial, mengetahui pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok.
- c. Sebagai pemimpin; bahwa setiap guru adalah pemimpin, yang harus memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, tehnik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi sekolah.
- d. Sebagai administrator; bahwa setiap guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan di sekolah, sehingga harus memiliki pribadi yang jujur, teliti, rajin, serta memahami strategi dan manajemen pendidikan.
- e. Sebagai pengelola pembelajaran; bahwa setiap guru harus mampu

dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Kemampuan untuk peningkatan diri; antara lain: menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, memperluas dan menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran, memanfaatkan kelompok kerja guru (KKG) untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan.

Perlu ditegaskan disini, bahwa dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan manapun, khususnya di sekolah dasar, guru memiliki peran yang penting dan strategis, dan tidak dapat digantikan oleh makhluk apapun, termasuk teknologi. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru perlu dilakukan secara terus menerus,

dan berkesinambungan, termasuk pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi guru.

Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab secara proporsional kepada para guru. Satu prinsip penting dalam pemberdayaan ini adalah melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Melalui proses pemberdayaan itu diharapkan para guru memiliki kepercayaan diri (*self-reliance*).

Dalam standart kompetensi dan sertifikasi guru, pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah melalui kinerja guru agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif dan efisien. Pada sisi lain, untuk memberdayakan sekolah harus pula ditempuh upaya-upaya memberdayakan peserta didik dan masyarakat setempat, di samping mengubah paradigma pendidikan yang dimiliki oleh para guru dan kepala sekolah. Para guru dan kepala sekolah perlu lebih dahulu tahu, memahami akan hakikat, manfaat, dan proses pemberdayaan peserta didik. Standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk membangkitkan kemauan dan potensi guru agar memiliki kemampuan mengontrol diri dan lingkungannya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan.

Pada dasarnya pemberdayaan guru melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru terjadi melalui beberapa tahapan. Pertama, guru-guru mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja lebih baik. Melalui upaya tersebut, pada tahap kedua, mereka akan mengalami pengurangan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri. Akhirnya, ketiga, seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, pada guru bekerja sama untuk berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan.

Dari uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan; kompetensi guru menunjuk kepada *performance* dan pembuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu didalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan *performance* merupakan perilaku nyata dalam arti tidak dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Pengembangan pribadi dan profesionalisme mencakup pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap terbuka, kritis, dan skeptis untuk mengaktualisasi penguasaan isi bidang studi, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, dan melakokan pembelajaran yang mendidik. Disamping itu, guru perlu dilandasi sifat ikhlas dan bertanggung jawab atas profesi pilihannya, sehingga berpotensi menumbuhkan kepribadian yang tangguh dan memiliki jati diri.

Pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Tugas guru adalah menetapkan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan latar belakang dan kemampuannya, serta kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam mencapai tujuan. Untuk merumuskan tujuan, guru perlu melihat dan memahami seluruh aspek perjalanan. Sebagai contoh, kualitas hidup seseorang sangat bergantung pada kemampuan membaca dan menyatakan pikiran-pikirannya secara jelas.

Kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Dengan kata lain, peserta didik harus dibimbing untuk mendapatkan pengalaman, dan membentuk kompetensi yang akan mengantar mereka mencapai tujuan. Dalam setiap hal peserta didik harus belajar, untuk itu mereka harus memiliki pengalaman dan kompetensi yang dapat menimbulkan kegiatan belajar.

Ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini mungkin merupakan tugas yang paling sukar tetapi penting karena guru harus

memberikan kehidupan dan arti terhadap kegiatan belajar. Bisa jadi pembelajaran direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara tuntas dan rinci, tetapi kurang relevan, kurang hidup, kurang bermakna, kurang menantang rasa ingin tahu, dan kurang imajinatif.

Keempat, guru harus melaksanakan penilaian. Dalam hal ini diharapkan guru dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut; bagaimana peserta didik dalam pembelajaran? Bagaimana peserta didik mencapai kompetensi? Bagaimana peserta didik mencapai tujuan? Jika berhasil, mengapa, dan jika tidak berhasil mengapa? Apa yang bisa dilakukan di masa mendatang agar pembelajaran menjadi sebuah perjalanan yang lebih baik? Apakah peserta didik dilibatkan dalam menilai kemajuan dan keberhasilan, sehingga mereka dapat mengarahkan dirinya (*self directing*)? Seluruh aspek pertanyaan tersebut merupakan kegiatan penilaian yang harus dilakukan guru terhadap kegiatan pembelajaran, yang hasilnya sangat bermanfaat terutama untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

C. Sertifikasi Guru

Menurut Trianto dan Tutik (2004:11) istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti keterangan (sertifikasi) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap laik dalam mengemban tugas profesi mendidik maka ia harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diseleng-

garakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Menurut Yamin dan Maisyah (2012:150), secara garis besar program sertifikasi guru dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Program sertifikasi guru untuk guru yang telah ada (guru dalam jabatan), (2) Program sertifikasi guru untuk calon guru.

Program sertifikasi guru dalam jabatannya dialamatkan kepada guru negeri dan swasta. Program ini dapat diikuti oleh para guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga atau pemerintah, kemudian mereka akan mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. Program sertifikasi dapat diperoleh melalui:

1. Proses pendidikan profesi terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan uji sertifikasi (bila lulus dalam uji kompetensi)
2. Uji sertifikasi langsung sebagai bentuk peningkatan kompetensi ke profesional guru sebagai agen pelajaran oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah (bila lulus dalam ujian sertifikasi).

Mulyasa (2007) mengemukakan pendapat Wibowo (2004), bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
4. membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Lebih lanjut Mulyasa (2007) mengemukakan bahwa sertifikasi

pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Pengawasan mutu
 - a. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
 - b. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
 - c. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.
 - d. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

2. Penjaminan mutu
 - a. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya para pelanggan/ pengguna akan makin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan/pengguna.
 - b. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Melengkapi uraian di atas, Jalal (2001: 221-225); dan Tilaar (2003: 382-391), mengungkapkan bahwa proses sertifikasi guru menuju profesionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya harus dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan guru, sistem rekrutmen guru, pembinaan, dan peningkatan karir guru.

1. Kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan insentif yang diperoleh. Gaji guru di Indonesia ini masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Rendahnya kesejahteraan guru bisa mempengaruhi kinerja guru, semangat pengabdianya, dan juga upaya mengembangkan profesionalismenya. Kenaikan gaji dilakukan bersamaan

dengan perbaikan pada aspek-aspek kesejahteraan lain yaitu prosedur kenaikan pangkat, jaminan rasa aman, kondisi kerja, kepastian karir, penghargaan terhadap tugas atau peran keguruan (Jalal, 2001:221). Kesejahteraan guru sebaiknya selain berasal dari pemerintah pusat, juga didukung oleh pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

2. Tunjangan fungsional yang merupakan insentif bagi guru sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan : (a) kesulitan tempat bertugas, (b) kemampuan, keterampilan, dan kreatifitas guru, (c) fungsi, tugas, dan peranan guru di sekolah, (c) prestasi guru dalam mengajar, menyiapkan bahan ajar, menulis, meneliti, dan membimbing, serta berhubungan dengan *stakeholder*. Dalam hal ini, guru perlu diberikan kesempatan bersaing untuk memperoleh penghargaan berbentuk insentif.

3. Sistem rekrutmen guru dan penempatannya memerlukan kebijakan yang tepat mengingat banyak calon guru yang sering memilih tugas yang diinginkannya. Ada kasus, guru yang ditempatkan di desa tertentu tidak pernah muncul, atau kalau datang bertugas selalu berhalangan untuk hadir, yang akhirnya minta dipindahkan ketempat yang diinginkannya. Untuk menghilangkan masalah seperti itu, maka dalam rekrutmen dan penempatan perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut.
 - a. asal tempat calon guru;
 - b. memperketat persyaratan calon guru yang diangkat dengan melihat hasil pendidikan dan seleksi;
 - c. menetapkan batas waktu tugas untuk bisa mengajukan mutasi atau pindah;
 - d. memberikan insentif dan jaminan lagi bagi calon guru yang ditempatkan di daerah terpencil;
 - e. memperkuat disiplin di tempat tugas dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar;
 - f. memintakan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat untuk menjamin kesejahteraan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan guru, terutama guru yang berasal dari daerah lain;

- g. untuk mengisi kekurangan guru di SD, SLTP, atau SLTA yang jauh dari kota, sebaiknya memberdayakan lulusan yang ada di tempat dengan legimitasi dari pemerintah daerah. Mereka yang bukan berasal dari LPTK dapat mengambil akta mengajar atau program PGSD.
4. Pendidikan dan pembinaan tenaga guru dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, dan pendidikan akta mengajar.
- a. pembinaan calon guru melalui pendidikan prajabatan memerlukan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan mutu pelayanan akademik pada LPTK yang meliputi sarana prasarana dan SDM-nya.
 - 2) Seleksi calon yang ketat dalam hal intelegensi, latar belakang, sifat dan sikap pribadi;
 - 3) Pendidikan guru yang dapat menjamin mutu penguasaan ilmu-ilmu pendidikan, keguruan, psikologi, dan ilmu bidang khusus yang menjadi spesialisasinya, serta penguasaan praktek mengajar;
 - 4) Calon guru harus pula menguasai ilmu dan keterampilan meneliti, menulis, membaca, sosial, budaya, dan bahasa, Indonesia yang baik dan benar;
 - 5) Untuk mampu mengikuti perkembangan maka calon guru harus terampil menggunakan komputer, mengelola perpustakaan, olahraga, dan kesenian;
 - (6) Calon guru minimal satu tahun mengalami hidup dalam asrama untuk membina pemahaman kerjasama, sikap hidup bersama, dan terutama mampu menyelami dan menghargai sifat dan watak yang berbeda-beda.
 - b. Pembinaan melalui program dalam jabatan biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga pelatihan yang dilaksanakan oleh diknas, pemerintah daerah, organisasi profesi (PGRI), kelompok masyarakat, juga oleh pihak luar negeri. Untuk membina karir guru melalui pelatihan dalam jabatan ini perlu dikembangkan :

- 1) Program yang yang tidak mengganggu tugas guru
 - 2) Pelatihan-pelatihan jangka pendek yang baik dan praktis mengenai metode, manajemen sekolah, dan kepemimpinan, pengembangan bidang ilmu, keterampilan baru yang perlu dikuasai guru, penelitian dan penulisan.
 - 3) Sebaiknya tiap enam bulan atau satu tahun diadakan evaluasi kerja guru, dan hasil evaluasi itu ditindak lanjuti dengan mengembangkan pelatihan dalam jabatan, dengan menerapkan peningkatan mutu berbasis sekolah.
 - 4) Setiap kegiatan peningkatan mutu selayaknya mendapat dukungan dana dari pusat, daerah, dan *stakeholder*. Oleh sebab itu, perlu digalakkan program pembinaan dalam jabatan yang kontinu baik di sekolah, luar sekolah, antar sekolah, antar bidang studi, dan dalam bidang studi.
 - 5) Khusus pembinaan peningkatan guru SD melalui PGSD yang belajar jarak jauh perlu ada biaya dari pusat dan daerah.
- c. Pembinaan tenaga guru melalui akta mengajar bagi lulusan diploma dan sarjana non keguruan. Dalam hal ini perlu dilakukan seleksi sebelum mereka mengikuti akta mengajar, sehingga profesi guru bukan tempat pelarian untuk mencari kerja.
- d. Pengembangan karir guru terkait dengan profesionalisme dan daya tarik jabatan guru memerlukan kebijakkan sebagai berikut.
- 1) Menumbuh-kembangkan kesadaran guru terhadap kode etik sebagai guru yang profesional, serta mencintai tugasnya, dan bertanggung jawab untuk mencapai hasil sebaik-baiknya.
 - 2) Menyederhanakan prosedur dan penilaian kenaikan jabatan fungsional guru, dan sedapat mungkin masyarakat dapat dimintai pendapatnya, agar hasilnya lebih objektif.
 - 3) Beban yang tidak terkait dengan fungsi dan tugas guru sebaiknya dihilangkan, karena akan mengganggu perhatian guru pada tugas pokoknya.
 - 4) Pegangkatan kepala sekolah perlu dilakukan melalui seleksi yang ketat dan adil, mempertimbangkan latar belakang mental dan prestasi kerja, serta melibatkan orang tua murid dan

masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah/madrasah.

- 5) Pengawasan kepada semua jenjang pendidikan harus dilaksanakan secara teratur, terkendali, dan terus menerus dengan menggunakan paradigma penilaian yang akademik. Tenaga pengawas sebaiknya orang yang khusus dipersiapkan melalui sistem pendidikan/pelatihan yang intensif.

Sertifikasi guru merupakan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin memasuki profesi guru.

Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, pasal 2 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Imas Kurniasih, 2012:3). Kompetensi yang dimaksud adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru bersifat holistik yang mencakup; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi guru.

Keempat kompetensi ini memiliki indikator-indikator tertentu yang memberikan jaminan bahwa keempatnya dapat dilaksanakan dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif, baik melalui pendidikan pra jabatan, *in serving training*, pendidikan dan latihan tertentu, dan lain sebagainya. Keempat kompetensi di atas, memiliki indikator-indikator, yaitu:

1. *Kompetensi pedagogik*: Kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, indikatornya:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
 - b. Pemahaman terhadap peserta didik
 - c. Pengembangan kurikulum/silabus
 - d. Perancangan pembelajaran
 - e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
 - f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
 - g. Evaluasi proses dan hasil elajar, dan
 - h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. *Kompetensi kepribadian*; pemilikan sifat-sifat kepribadian, indikatornya:
- a. Berakhlak mulia
 - b. Arif dan bijaksana
 - c. Mantap
 - d. Berwibawa
 - e. Stabil
 - f. Dewasa
 - g. Jujur
 - h. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - i. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan
 - j. Mau dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
3. *Kompetensi profesional*; kemampuan dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang diampunya, indikatornya:
- a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata peajaran yang akan diampunya
 - b. Konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
4. *Kompetensi sosial*; indikatornya:

- a. Berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat
- b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orangtua/wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta system nilai yang berlaku, dan
- d. Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Keempat kompetensi profesional yang seharusnya melekat dalam diri para guru itu, bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterapkan jika tidak ada kemauan dari berbagai pihak, terutama guru itu sendiri untuk melakukan peningkatan kompetensi dimaksud. Namun, hal itu akan menjadi mudah diterapkan, jika kemauan dari berbagai pihak, terutama guru itu sendiri memiliki komitmen untuk mencapai keprofesionalan, sebagai bagian dari tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada peserta didik, kepada pemangku kepentingan, dan yang tak kalah pentingnya, adalah tanggung jawab kepada Allah SWT yang telah memberikan amanah kepada setiap guru untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih*.

Kerangka pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi guru, baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 non-kependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pertama : lulusan program sarjana kependidikan mengalami pembentukan kompetensi mengajar (PKM). Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kependidikan tinggi yang memiliki PPTK terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti, Depdiknas.
- Kedua : Lulusan program sarjana nonkependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar (PKM) pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PPTK) secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi

mengajar, baru lulusan S1 non-kependidikan boleh mengikuti uji sertifikasi. Sedangkan lulusan program sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

- Ketiga : Penyelenggaraan program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ditjen dikti, Depdiknas (Depdiknas, 2004).
- Keempat : Peserta uji kompetensi yang telah lulus, baik yang bersal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun non-pendidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
- Kelima : Peserta uji kompetensi yang bersal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu (10-15) tahun sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemu-takhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Disamping uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu. Bentuk aktivitas uji kompetensi untuk kelompok ini adalah dalam kategori resertifikasi. Termasuk dipersyaratkan mengikuti resertifikasi bagi guru yang ingin menambah kemampuan dan kewenangan baru. Pembentukan kompetensi mengajar dilakukan melalui PPTK atau melalui program pembentukan lainnya. Uji kompetensi hanya dilakukan oleh PPTK terakreditasi dengan penugasan dari Ditjen dikti.

BAB VIII

IMPLEMENTASI

PENDIDIKAN KARAKTER

A. Fenomena Sosial Kontemporer

Fenomena akhir-akhir ini membuat rasa gusar hati sebagaimana masyarakat. Kerusakan sosial sering terjadi. Silih berganti, merembes dari satu pulau, atau daerah, berpindah ke daerah atau pulau lainnya. Kejadian tersebut tidak hanya pada tataran masyarakat luas, tetapi juga menyentuh spektrum dunia pendidikan nasional. Berbagai peristiwa tawuran pelajar, dan kekerasan kelompok remaja atau mahasiswa juga menjadi tontonan dari waktu ke waktu. Ditambah pula perkelahian antar mahasiswa di beberapa kampus, bahkan perkelahian anggota DPRD mencerminkan betapa rapuhnya karakter bangsa ini. Berbagai bentrokan masal kelompok remaja/pemuda saat pertunjukan musik/band, dan pertandingan bola kaki menjadi tontonan yang sudah biasa, pada hampir keseharian masyarakat.

Sesungguhnya perkembangan terkini cenderung membuat rasa gusar hati kebanyakan orang yang peduli dengan masa depan bangsa karena seringnya terjadi kerusakan sosial. Tidak hanya pada tataran masyarakat luas dalam wujud pelanggaran hukum namun juga pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, masih banyak kecenderungan sifat memperkaya diri sendiri dengan melakukan korupsi (ada banyak kasus korupsi) merupakan gambaran betapa lemahnya karakter pribadi bangsa ini yang dapat mencederai nurani, moral dan karakter yang semestinya menjadi pilar bagi kehidupan generasi muda bangsa yang diharapkan terbina dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yaitu pribadi cerdas, bermartabat, maju, dan sejahtera. Mengapa fenomena yang dikemu-

kakan di atas begitu mudahnya muncul dalam kehidupan sosial saat ini? Apakah pendidikan nasional gagal dalam membangun karakter bangsa yang baik? bagaimana proses pendidikan karakter berperan dalam menjaga nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan kesucian dalam perilaku budaya bangsa?

Dalam perkembangan global, UNESCO juga sangat gigih memperjuangkan persatuan dalam keragaman etnis, bangsa, budaya dan agama. Saat ini sedang diupayakan perwujudan perdamaian dan pemecahan konflik secara global, atau dalam masyarakat tertentu. Hal ini tidak mungkin diwujudkan jika tidak ada pemantapan nilai-nilai kesatuan dan persatuan dalam keragaman. Karena itu harus ada standar nilai universal yang semua budaya masyarakat dan agama dapat mengakui dan menerimanya (Campbell, 2001:17). Setidaknya nilai perdamaian, demokrasi, perdamaian, kejujuran, keadilan dan hak asasi manusia serta pluralisme merupakan nilai yang harus ditegakkan, begitu formulasi organisasi dunia yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya (UNESCO) dalam kebijakan pendidikan internasional.

Secara substantif sebagai usaha sadar, disengaja dan bertujuan dalam mengembangkan potensi anak, maka pendidikan nasional harus benar-benar dijalankan dengan orientasi membangun karakter bangsa. Nilai kejuangan, persatuan, kejujuran, sabar, dan semangat gotong royong harus menjadi nilai dasar karakter bangsa yang perlu terbina terus menerus/berkelanjutan. Pendidikan nasional yang merupakan proses membangun karakter bangsa (*nation character building*) jangan diabaikan sedikitpun. Karena itu, pendidikan karakter menjadi isu krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, serta menjadi kebijakan khusus yang sedang dirumuskan untuk meretas rapuhnya karakter bangsa di tengah derasnya perubahan dalam pergaulan antar bangsa secara berkelanjutan.

Padahal secara imperatif pendidikan karakter bangsa bukanlah hal yang baru dalam sistem pendidikan nasional, karena tujuan pendidikan nasional dalam semua undang-undang yang pernah berlaku (UU Nomor 4/1950; 12/1954; 2/1989, dengan rumusannya yang berbeda secara substantif memuat pendidikan karakter. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, komitmen tentang pendidikan karakter tertuang dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mem-

bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Mencermati semua elemen tujuan tersebut begitu akrabnya dengan hakikat karakter yang menjadi nilai utama dalam kepribadian setiap orang.

Mencermati pentingnya memaksimalkan pendidikan karakter, dalam perkembangan global, UNESCO juga sangat gigih memperjuangkan persatuan dalam keragaman budaya dan agama. Saat ini sedang diupayakan perwujudan perdamaian dan pemecahan konflik secara global, atau masyarakat tertentu tidak mungkin diwujudkan jika tidak ada kesatuan dalam keragaman. Karena itu harus ada standar nilai universal yang semua masyarakat dan pengakuan agama dapat diterima (Campbell, 2001:17). Setidaknya nilai perdamaian, demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia dan pluralisme merupakan nilai yang harus ditegakkan, begitu formulasi UNESCO dalam kebijakan pendidikan internasional. Karena itu, persatuan dalam keragaman budaya dan agama juga menjadi fokus kebijakan pendidikan bangsa-bangsa mengingat karakter bangsa dalam pergaulan global juga harus mendapat perhatian dan praktik pendidikan nasional.

Pendidikan karakter bangsa merupakan satu keniscayaan untuk segera dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program kurikulum pendidikan nasional. Program pendidikan ini menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tegasnya karakter bangsa ibarat kemudi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sulhan, 2010:1). Sejatinnya, kesadaran yang mengemuka tentang pendidikan karakter menggambarkan bahwa masih banyak yang mementingkan nasib dan masa depan bangsa untuk tetap berbudaya, bermartabat dan berkarakter dalam menghadapi perubahan yang massif (besar-besaran) akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan dampak perubahan itu sendiri terhadap krisis kepribadian bangsa.

B. Pembangunan Karakter Bangsa

Pembangunan karakter bangsa memiliki cakupan dan tingkat urgensi yang sangat luas dan bersifat multi dimensional. Ditegaskan dalam kebijakan nasional bahwa secara substantif dan operasional pembangunan karakter bangsa terkait dengan pengembangan seluruh aspek potensi-potensi keunggulan bangsa yang bersifat multi dimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang saat ini sedang dalam proses “menjadi” (U.S. Winataputra, 2010:2).

Membangun karakter adalah proses membentuk karakter seseorang atau kelompok orang sehingga tertanam karakter-karakter baik dalam jiwa seseorang yang dilakukan dengan cara tertentu melalui pendidikan karakter (Nuraida dan Aulia, 2009:9).

Berdasarkan pendapat ini ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa menjadi acuan kebijakan nasional yang menekankan pada pentingnya pendidikan karakter dalam rangka membentuk karakter yang baik sebagai modal bagi eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa di tengah pergaulan dan perubahan global.

Dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa: (1) karakter merupakan hal esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter berperan sebagai “kemudi” dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat.

Selanjutnya ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa harus difokuskan pada: “tiga tataran besar”, yaitu: (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat (U.S. Winataputra, 2010:2).

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat keputusan yang dibuatnya. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 UU SISDIKNAS tahun 2003 menyatakan

bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia (Asmani, 2011;29).

Tegasnya dalam undang-undang pendidikan nasional sebagaimana dimaksud adalah agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Sehingga lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernapas nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas, dan berkarakter kuat menjadi dambaan setiap orang tua dan stakeholders pendidikan.

Tegasnya saat ini perlu pemantapan kebijakan dan proses implementasi pembangunan karakter bangsa dalam semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama nilai ketaqwaan, semangat juang, kejujuran, kesabaran, persatuan, gotong royong, kebaikan bersama, keunggulan, dan penghargaan atas keragaman budaya. Semua nilai ini berakar pada potensi diri, dan diajarkan dalam nilai agama yang dapat dilembagakan melalui pendidikan karakter. Karena itu, melalui proses pendidikan yang sinergetik pada semua satuan dan lingkungan pembangunan karakter bangsa perlu mendapat perhatian yang lebih fokus agar menghasilkan generasi bangsa yang berkarakter baik.

Pendidikan karakter saat ini menjadi kebijakan yang strategis dalam pemantapan pembinaan sumberdaya manusia bangsa Indonesia, terutama dalam menciptakan daya saing global. Oleh karena itu, setiap sekolah dan lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan khusus untuk menghidupkan nilai-nilai keutamaan karakter dalam keseharian siswa di sekolah supaya melembaga dalam kepribadiannya. Nilai karakter dengan kejujuran, keadilan, kerjasama, berpikir positif, kreatif, inovatif, kegigihan, kerjasa keras, mandiri, dan religius harus menjadi fokus utama pendidikan karakter di setiap sekolah.

Indonesia tentu saja tidak mau gagal dalam membangun karakter bangsa. Sekolah jangan terlalu terpesona dengan target-target akademis, dan merupakan melupakan pendidikan karakter. Realitas ini membuat kreativitas, keberanian menghadapi risiko, kemandirian, dan ketahanan dalam melalui berbagai ujian hidup menjadi rendah. Anak mudah frustrasi, menyerah, dan kehilangan semangat juang sampai titik darah penghabisan.

Dengan melihat kenyataan itulah, pendidikan karakter sangat mendesak untuk diberlakukan di negeri ini. Tentu saja perlu dilakukan optimalisasi peran sekolah sebagai pionir. Manajemen sekolah harus bekerjasama dengan keluarga, masyarakat, dan elemen bangsa yang lain demi suksesnya agenda besar menanamkan karakter kuat kepada peserta didik sebagai calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang (Asmani, 2011:26).

Dasar hukum pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter, yaitu:

- 1) Undang-undang dasar 1945
- 2) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
- 3) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- 4) Permediknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan
- 5) Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi
- 6) Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan
- 7) Rencana Pemerintah Jangka Menengah 2010-2014
- 8) Renstra Direktorat pembinaan SMP tahun 2010-2014 (Asmani, 2011:41-42).

Menurut Muslich (2011) pendidikan karakter di sekolah juga terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegaitan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi nilai-nilai yang diperlukan ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah.

C. Pendidikan Karakter

1. Pengertian Karakter dan Pendidikan Karakter

Kata karakter memiliki banyak arti, tapi pada intinya menunjukkan kualitas kepribadian seseorang. Karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain dalam watak dan tabiat. Manusia yang berkarakter adalah yang mempunyai tabiat, kepribadian dan berwatak (Kamus Bahasa Indonesia, 444).

Sebagai konsep akademis, *character* atau diterjemahkan karakter memiliki makna substantif dan proses psikologis yang sangat mendasar. Lickona (1992:50) merujuk kepada konsep *good character* yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai "...*the life of right conduct-right in relation to other persons and in relation to oneself*". Dengan kata lain karakter dapat dimaknai sebagai kehidupan berperilaku baik/penuh kebajikan yakni berperilaku baik terhadap pihak lain (Tuhan Yang Maha Esa, manusia dan alam semesta) dan terhadap diri sendiri".

Tegasnya karakter adalah kualitas pribadi yang baik dalam arti mengetahui dan menghayati kebaikan, mau berbuat baik dan menampilkan kebaikan sebagai manifestasi kesadaran mendalam tentang nilai kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan yang baik.

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar (*basic need*) bagi setiap orang. Hanya dengan pendidikan yang baik potensi individu dapat berkembang secara maksimal. Bahkan transformasi kebudayaan berjalan secara berkesinambungan melalui pendidikan yang dikelola dengan baik dan akuntabel. Seseorang akan mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota masyarakat dan sebagai makhluk Tuhan. Karena itu pendidikan merupakan hal fundamental bagi setiap orang. Dalam "*The Dakar Framework for Action*" sebagaimana dilaporkan UNESCO (2000:8), bahwa:

Education is a fundamental human right. It is the key sustainable development and peace and stability within and among countries, and thus an indispensable means for effective participation in the societies and economies of the twenty- first century".

Pendapat di atas menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi

manusia. Karena itu pendidikan merupakan kunci pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), perdamaian dan stabilitas dalam suatu negeri. Di sini diperlukan partisipasi efektif semua elemen dalam masyarakat dan ekonomi di abad ke-21. Untuk mencapai proses pemenuhan hak dasar dalam bidang pendidikan, berarti harus ada strategi pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga hak semua anak usia sekolah dalam bidang pendidikan dapat dipenuhi. Tentu saja, hanya dengan pendidikan yang efektif, maka integritas pribadi warga negara yang cerdas, terampil, beriman, berbudaya menuju kehidupan sejahtera, dan damai akan dapat dicapai”.

Pencetus pendidikan karakter yang menekankan dimensi etis, spiritual dalam proses pembentukan pribadi ialah pedagog Jerman Foester (1869-1966). Tujuan pendidikan adalah pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Bagi Foester, karakter merupakan sesuatu yang mengaktualisasi seseorang pribadi. Karakter menjadi identitas mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dari kematangan karakter inilah kualitas pribadi dapat diukur (Nuraida dan Aulia, 2009:11-12).

Pendidikan karakter adalah sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, dan pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepuh hati (Elkind dan Sweet, dalam *good character.com*, unduh 2/9/2010).

Dalam konteks pendidikan Islam, maka pendidikan moral/karakter adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak usia dini (Ulwan, 1988:174). Ditegaskannya, bahwa keutamaan moral/perangai/karakter adalah buah dari iman yang mendalam dan perkembangan religius yang benar dalam pribadi anak harus benar-benar terbina dengan baik.

Kemudian Asmani (2011:31) menjelaskan pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu dalam membentuk watak peserta didik dengan cara memberikan keteladanan, cara berbicara atau menyampaikan materi yang baik, toleransi, dan berbagai hal yang terkait lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter/moral/budi pekerti selalu dipertukarkan yang maknanya bermuara kepada pendidikan tentang kebaikan perilaku dalam kehidupan. Pendidikan ini sangat penting atas dasar argumen adanya kebutuhan nyata dan mendesak, proses transmisi nilai sebagai proses peradaban, peranan satuan pendidikan sebagai pendidikan moral yang penting pada saat melemahnya pendidikan nilai dalam masyarakat; tetap adanya kode etik dalam masyarakat yang sarat konflik nilai; kebutuhan demokrasi akan pendidikan moral; kenyataan yang sesungguhnya bahwa tidak ada pendidikan yang bebas nilai; persoalan moral sebagai salah satu persoalan dalam kehidupan, dan adanya landasan yang kuat dan dukungan luas terhadap pendidikan moral di satuan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Menurut Foester, ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter, yaitu:

- 1) Kelenturan interior, di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hirarki nilai. Di sini nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan.
- 2) Koherensi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing oleh situasi baru dan takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Jika tidak koherensi maka akan meruntuhkan kepribadian seseorang.
- 3) Otonomi - seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi, tanpa pengaruh atau desakan dari pihak lain.
- 4) Ketentuan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dianggap baik. Dengan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih (Nuraida dan Aulia, 2009:12).

2. Nilai-Nilai dan Pilar Karakter

Setidaknya pendidikan karakter yang baik menjadi perhatian untuk dihidupkan dengan keteladanan para pendidik dalam keseharian yang mencakup; mengasihi, peduli, menghormati, jujur atau layak dipercaya, bertanggung jawab menegakkan keadilan dan adil. Begitu pula fokus pada perilaku ketaqwaan, keadilan, kearifan, kesetaraan, harga diri, keteraturan, kebersihan, kemandirian, ramah, tolong menolong), kerukunan (kebersamaan, musyawarah, mufakat), kesabaran, kreatifitas, kerja keras, kompetitif, disiplin dan keteladanan. Dengan begitu, pendidikan karakter adalah menanamkan nilai-nilai pribadi yang baik atau mengarahkan seseorang kepada pribadi utama/baik.

Dikemukakan oleh Moh. Said (2011:33) sebagaimana pendapat Ratna Megawangi, bahwa nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada anak-anak adalah nilai universal yang mana seluruh agama, tradisi, dan budaya pasti menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai universal ini harus menjadi perekat bagi seluruh anggota masyarakat, walaupun berbeda latar belakang budaya, suku, dan agama.

Menurut pihak IHF (*Indonesia Heritage Foundation*) ada sembilan pilar karakter, yaitu:

- 1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya
- 2) Kemandirian dan tanggung jawab
- 3) Kejujuran, amanah dan bijaksana
- 4) Hormat dan santun
- 5) Dermawan, suka menolong dan gotong royong
- 6) Percaya diri, kreatif dan pekerja keras
- 7) Kepemimpinan dan keadilan
- 8) Baik dan rendah hati
- 9) Toleransi, kedamaian dan kesatuan (Said, 2011:34).

Pada tataran mikro, pendidikan karakter (Kemdiknas, 2010:13-14), perlu ditata sebagai berikut:

Secara mikro pengembangan nilai/karakter dapat dibagi dalam empat pilar, yakni: kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan (*school culture*); kegiatan

ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah, dan dalam masyarakat.

- 1) Dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas pengembangan nilai/karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran (*embeded approach*). Khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, karena memang misinya adalah mengembangkan nilai dan sikap maka pembangunan nilai/karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi/metode pendidikan nilai (*Value character education*). Untuk kedua mata pelajaran tersebut nilai/karakter dikembangkan sebagai dampak pembelajaran (*instructional effects*) dan juga dampak pengiring (*nurtural effects*). sementara itu untuk mata pelajaran lainnya yang secara formal memiliki misi utama selain pengembangan nilai/karakter, wajib dikembangkan kegiatan yang memiliki dampak pengiring (*nurtural effects*) berkembangnya nilai/karakter dalam diri peserta didik.
- 2) Dalam lingkungan satuan pendidikan dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosial-kultural satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian di satuan pendidikan yang mencerminkan perwujudan nilai/ karakter.
- 3) Dalam kegiatan ko kurikuler, yakni kegiatan belajar di luar kelas yang terkait langsung pada satu materi dari suatu mata pelajaran, atau kegiatan ekstra kurikuler, yakni kegiatan satuan pendidikan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu mata pelajaran, seperti kegiatan dokter kecil, Palang Merah Remaja, Pencinta Alam, dll, perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan (*reinforcement*) dalam rangka pengembangan nilai/karakter.
- 4) Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi proses penguatan dari orang tua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap perilaku karakter mulia yang dikembangkan dalam satuan pendidikan menjadi kegiatan keseharian di rumah dan lingkungan masyarakat masing-masing.

3. Tujuan Pendidikan Karakter

Asmani (2011:42) menjelaskan pendapat Doni Koesoema A, bahwa tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa dan pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Tujuan jangka panjangnya tidak lain adalah mendasarkan diri pada tanggapan aktif kontekstual individu atas impuls natural sosial yang diterimanya yang pada gilirannya semakin mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses pembentukan diri secara terus menerus. Sedangkan jangka panjang ini merupakan pendekatan dialektis yang semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ideal melalui proses refleksi dan interaksi terus menerus antara idealisme, pilihan sarana dan hasil langsung yang dapat dievaluasi secara objektif.

Sebagai kebijakan pemerintah, maka pendidikan karakter memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Membentuk manusia Indonesia yang bermoral
- 2) Membentuk manusia Indonesia yang cerdas
- 3) Membentuk manusia Indonesia yang inovatif dan suka bekerja keras
- 4) Membentuk manusia Indonesia yang optimis dan Percaya diri
- 5) Membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Patriot (Aunillah, 2011:98).

Pendidikan karakter juga bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari (Asmani, 2011:43).

Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Dengan kecerdasan emosi seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan,

termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis (Muslich, 2011:29-30). Dikemukakannya lebih lanjut bahwa pendapat Daniel Goleman menyatakan tentang keberhasilan seseorang di masyarakat, ternyata 80 % dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20 % ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ) menjadi argumentasi bagi urgensi pendidikan karakter.

Dalam konteks ini pendidikan karakter memiliki fungsi-fungsi, yaitu:

- 1) Mengembangkan potensi dasar peserta didik agar ia tumbuh menjadi sosok yang berhati baik, berpikiran baik dan berperilaku baik.
- 2) Memperkuat dan membangun perilaku masyarakat yang multikultural
- 3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia (Aunillah, 2011:107).

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk mendorong anak berkembang secara maksimal dengan pribadi seutuhnya, sehingga sukses dan bahagia kehidupan individu, keluarga, dan bermasyarakat serta berbangsa. Oleh sebab itu, pendidikan karakter menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa untuk mempersiapkan dan membina anak menjadi anak yang dewasa dan cerdas secara intelektual, emosional, spiritual dan sosial.

D. Perspektif Pendidikan Islam

Pendidikan sejatinya proses pembentukan karakter, baik individu maupun sebagai bangsa yang berbudaya. Bagaimanapun, pendidikan adalah fenomena kultural/budaya suatu masyarakat. Perkembangan budaya merupakan produk sistem pendidikan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Sedangkan pengembangan budaya adalah khas manusia. Tak pelak, manusia menjadi satu-satunya makhluk Allah yang berbudaya dan mampu mengembangkan kebudayaannya. Sebagai fenomena kebudayaan, maka pendidikan menjadi faktor yang menjamin pembinaan

potensi secara maksimal guna mencapai kedewasaan individu dan memelihara eksistensi serta perkembangan suatu masyarakat dalam mengisi kehidupan dengan pengabdian dan kekhalifahannya secara berkualitas/unggul sebagai insan shaleh di muka bumi. Insan berkualitas sangat penting untuk memenangkan kompetisi manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Pentingnya kualitas pribadi, karakter, kecerdasan dan akhlak akan menentukan masa depan bangsa. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 249:

... كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

Artinya: ” ...Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar (QS.2:249).

Pendidikan membentuk pribadi yang kuat dan berkarakter. Sabar adalah karakter yang bernilai tinggi dalam kehidupan. Karena sabar berfokus kepada penerimaan yang tinggi atas ketentuan dan hukum Allah.

Dalam perspektif pedagogis Islam, dengan mengacu kepada pendapat Ulwan (1988:24) ada 7 tanggung jawab pendidik (orang tua, guru, dan tokoh nonformal) terhadap anak, yaitu: (1) pendidikan iman, (2) pendidikan akhlak/moral, (3) pendidikan fisik, (4) pendidikan intelektual, (5) pendidikan psikhis, (6) pendidikan sosial, (7) pendidikan seksual”. Tanggung jawab pendidikan yang sangat kompleks tersebut tidak ditangani dalam pendidikan di sekolah, bahkan juga keluarga dan pendidikan luar sekolah.

Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan terhadap fitrah anak secara komprehensif untuk menciptakan pribadi yang taqwa, atau muslim sejati. Menurut Langgulong (1989:22) pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang dididik. Setiap suasana pendidikan mengandung tujuan-tujuan, maklumat-maklumat berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dinyatakan sebagai materi, dan metode yang sesuai untuk mempersembahkan materi itu secara berkesan kepada anak.

Sedangkan tujuan pendidikan Islam ditegaskan Al-Attas (1979:1) bahwa: *"The aim of education in Islam is to produce a good man"*, yang berarti bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan pribadi manusia yang baik. Adapun yang baik itu adalah berkenaan dengan adab, berkenaan esensi budi dalam pencapaian kualitas kebaikan dimensi spiritual dan material manusia". Lebih jauh dijelaskannya bahwa pendidikan membantu dalam menyempurnakan kepribadian seseorang atau kelompok untuk melakukan tugas-tugas secara efisien". Karena itu pendidikan Islam selain sebagai proses pembinaan fitrah/potensi anak sekaligus merupakan transformasi kebudayaan sehingga eksistensi dan pengembangan hidup umat Islam berlangsung berkelanjutan". Tujuan yang ditata Islam dalam pendidikan adalah membuat kepatuhan manusia, dan menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Pendidikan adalah proses pemenuhan keyakinan dan cita-cita pendidikan Islam adalah keagamaan. Pendidikan Islam membuat kesadaran manusia sebagai kenyataan jiwa mempengaruhi kegiatan dan kehidupan tidak sempurna dan hanya melalui pendidikan maka bimbingan jiwa mencapai keunggulannya (Alam, 2003:42).

Secara sistemik, sistem pendidikan Islam terdiri dari dasar dan tujuan, pendidik, anak didik, kurikulum, strategi dan metode, evaluasi dan lingkungan. Semua komponen ini berfungsi, saling berhubungan dan bekerjasama menuju kepada pencapaian tujuan sistem pendidikan yang ideal".

Tegasnya, sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen yang terpadu, saling berhubungan dan berfungsi dalam mencapai tujuan. Sistem pendidikan Islam dibentuk dan ditetaskan dari filosofi pendidikan Islam yang mempertanyakan dan menjawab persoalan hakikat manusia, tujuan penciptaan manusia, fungsi manusia, hakikat pengetahuan (epistemologi), dan hakikat nilai (aksiologi). Secara filosofis, manusia/ anak adalah makhluk *theomorphic*, (manusia berasal dari Tuhan dan kembali Tuhan) yang diberi amanah sebagai *khalifah* (pemimpin/wakil, penguasa), dan *abdun* (hamba) (QS.6:165; QS.51:56).

Dalam kerangka misi menemukan dan mengamalkan *sunnatullah* adalah untuk keselamatan dan kemakmuran kehidupan umat manusia di muka bumi. Dengan memantapkan perpaduan filosofi dan sistem pendidikan Islam sebagaimana mestinya tentu saja memastikan keutuhan idiologi pendidikan Islam yang mengilhami praktik pendidikan yang ideal.

Dengan begitu, sistem pendidikan Islam merupakan upaya mewujudkan sistem pembinaan potensi individu dan umat bagi Islamisasi sebagai penerimaan dan pelaksanaan secara sadar kultur Islam yang ideal oleh orang-orang yang bukan muslim dan orang-orang yang hanya mengaku muslim dalam kehidupan atau segala aspeknya. Itu artinya, dasar pendidikan Islam adalah *sunnatullah* (wahyu dan hukum alam/sosial empiris) yang menegaskan tauhid sebagai nilai tertinggi dari puncak kebenaran realitas (QS.4:48;116) sehingga pengingkaran atas realitas Maha Pencipta (***Al-Khaliq***) dan realitas yang diciptakan (***makhluk***) menempatkan seseorang menjadi musyrik.

Tegasnya tujuan pendidikan Islam berfokus kepada perwujudan *sunnatullah* dalam kehidupan pribadi (muslim sejati) dengan terbinanya seluruh potensi/fitrah anak menjadi pribadi muslim dan masyarakat Islami seutuhnya melalui pendekatan *ta'lim*, *tilawah* dan *tazkiyah*, (QS.2: 128;151), yang memunculkan berbagai metode, media, dan alat pendidikan dengan materi/nilai bersumber dari pengetahuan *qur'aniyah*, dan pengetahuan yang bersumber dari penafsiran terhadap hukum alam/sosial. Bagi Al-Attas (1979:2) selain *al-tarbiyah*, dan *al-ta'lim*, maka *al-ta'dib* merupakan istilah yang juga digunakan dalam pendidikan Islam, karena misi utama Rasulullah adalah membaguskan akhlak/adab individu dan masyarakat sebagai diungkap dalam salah satu hadis: "*Addabany Rabbi, Fa ahsani Ta'diiby*", Tuhanku yang mendidiku dan membaguskan akhlakku".

Sejatinya, sistem pendidikan Islam adalah sistem yang mengacu kepada pemahaman adanya format pendidikan yang berasaskan Islam, dan atau bernuansa Islami untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam *program*, *proses*, dan aktivitas pembelajaran. Dalam wujudnya, ada berbagai lembaga pendidikan Islam, yaitu madrasah, pesantren dan sekolah Islam atau sekolah yang dikelola organisasi/yayasan Islam yang diyakini dalam pengembangannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam, melalui materi/isi, proses, kegiatan, dan metode pendidikan yang Islami dalam rangka meraih kualitas/keunggulan pribadi muslim sejati dan masyarakat Islam terbaik/unggul (Al-Attas, 1979:4).

Pentingnya pendidikan tidak hanya bagi pencapaian tujuannya, tetapi merupakan bagian integral sebagai suatu agama. Istilah pendidikan, "*al-ta'lim*", dan *al-tarbiyah*" dapat diinterpretasikan dalam kenyataannya

sebagai inti dari kehidupan religius, mengarahkan manusia melalui *al-ta'lim* dari proses transformasi pengetahuan, sama halnya dengan *al-tarbiyah* atau pelatihan terhadap jiwa untuk mencapai derajat kesempurnaan lebih besar sampai pada perjumpaan dengan Allah (QS.3: 104;110). Melalui proses *al- ta'lim*, Rasulullah mengajarkan membaca al-qur'an kepada kaum muslimin tidak sekedar dapat membaca saja, melainkan membaca dengan perenungan, berisikan pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan penanaman amanah. Dari terampil membaca, Rasul membawa umat kepada *al-tazkiyah* (pensucian jiwa) yaitu membersihkan jiwa manusia menjadi muslim sejati/taqwa (QS.2:151;17:24;QS.Asy-Syua'ara,18). *Al-tarbiyah* sebagai istilah bagi pendidikan Islam ialah proses persiapan dan pengasuhan pada fase pertama pertumbuhan manusia atau masa kanak-kanak. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tanggung jawab orang tua dengan mendidik sepenuh kasih sayang.

Peran para pendidik dalam mendidik anak tentu saja harus diarahkan untuk mengembangkan potensi/talenta anak secara maksimal dan menyiapkan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran sehingga tercapai kedewasaan yang maksimal (intelektualitas, moralitas, estetika, spiritualitas) sebagaimana pribadi muslim sejati/insan shaleh. Tegasnya, pribadi yang diinginkan sistem pendidikan sekolah Islam adalah yang memiliki kecerdasan intelek, emosi dan spiritual secara terpadu. Suatu perpaduan berpikir Islami (*aqliyah Islamiyah*)-cara berpikir dengan landasan Islam dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya standar pemikiran, dan dengan sikap Islami (*nafsiyah Islamiyah*) – sikap jiwa dan kecenderungan berpedoman kepada Islam dalam standar pemuasan semua keperluan manusia.

Untuk itu epistemologi pendidikan Islam menawarkan bagi sistem pendidikan Islam untuk mengembangkan metodologi dan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam dengan fokus kajian sumber pengetahuan adalah ketundukan kepada Allah, penjelajahan atas alam semesta, dan kedirian manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam konteks ini ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, yaitu :

- a. Pendekatan agama (*religious approach*), yaitu menanamkan ajaran-ajaran agama pada setiap cabang ilmu pengetahuan yang masuk sebagai materi pelajaran.

- b. Materi pelajaran agama yang akan disampaikan kepada siswa harus sesuai dengan daya dan perkembangan kemampuan menerima mereka, dan diberikan secara bertahap, karena bidang pengetahuan agama sangat luas.
- c. Dalam penyusunan kurikulum perlu diperhatikan tiga aspek, yaitu kesinambungan (*continuity*), berurutan (*sequence*) dan aspek keterpaduan (*integration*) (Ashraf, 1989:1).

Pembelajaran dalam pendidikan Islam harus menyediakan lingkungan yang memudahkan anak-anak memahami dimensi Ketuhanan, alam semesta, dan dirinya sehingga anak mampu mengkonstruksi pengetahuannya. Berpijak pada kerangka konseptual sebagaimana diungkap di atas, berarti sistem pendidikan Islam bermakna sebagai suatu keterpaduan komponen pendidikan Islam yang mengarahkan implementasi proses pembinaan fitrah manusia melalui transformasi kebudayaan sebagaimana ada dalam struktur program kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Untuk itu, muncullah berbagai sistem kelembagaan dan pendidikan Islam dalam kehidupan umat Islam, baik berupa madrasah, sekolah agama, maupun pesantren yang turut memberikan kontribusi signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang membina pengembangan sumberdaya manusia. Sistem kelembagaan pendidikan Islam termasuk produk budaya umat dalam spektrum upaya umat menjalankan misi kehidupan Islami sesuai tuntunan dan tuntutan ajaran Islam.

Dalam perspektif individu, fungsi pendidikan Islam adalah sebagai kaderisasi mengarahkan pembinaan potensi anak menuju terbentuknya pribadi muslim seutuhnya meraih bahagia di dunia dan di akhirat. Suatu kepribadian yang menjaga keseimbangan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia (QS.3:112). Dalam perspektif masyarakat, fungsi pendidikan Islam sebagai sosialisasi terbentuknya masyarakat Islam yang adil dan sejahtera. Dalam konteks al-qur'an, masyarakat Islam adalah *ummat washatan* (umat tengah) (QS.2:143), umat terbaik atau *khaira ummah* (QS.3:110) dan umat yang utuh (*ummatan wahidah*).

Al-Djamali (1993:58) berpendapat bahwa pada intinya pendidikan Islam memiliki dua sifat fungsi, yaitu: fungsi menunjukkan, dan fungsi

menangkal. Dijelaskan Al-Djamali, bahwa fungsi pendidikan Islam dalam menunjukkan, yaitu:

1) Hidayah kepada iman

Cara terbaik mendidik anak adalah yang mengandung nilai hidayah. Jadi pendidikan merupakan pergaulan yang mengandung rasa kemanusiaan terhadap anak dan mengarahkan kepada kebaikan serta cinta kasih dengan menyediakan suasana bagi perkembangan bakat anak secara maksimal dan lurus. Jadi pendidik adalah perantara dalam menumbuhkembangkan fitrah anak dalam keimanan (QS.49:17). KeIslaman seseorang adalah nikmat dari Allah, bukan balas jasa kepada Allah.

2) Hidayah kepada penggunaan akal pikiran dan analisis

Allah telah menganugerahkan kepada manusia potensi akal atau kecerdasan. Dengan akal yang dimiliki manusia dapat dijadikan alat membedakan yang baik dan buruk, yang halal dengan yang haram. Demikian pula Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan analisis dan penyelidikan. Pendidikan mengarahkan kemampuan akal dan analisis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalan yang baik dan buruk ditunjukkan Allah kepada manusia untuk memilihnya (QS. 90:10 dan QS.76: 3).

3) Hidayah kepada akhlak mulia

Pendidikan Islam dalam semua aspeknya bermuara kepada terbentuknya akhlak yang mulia. Sebagai pendidik, akhlak adalah alat yang dijadikan mengarahkan anak. Sikap lemah lembut, tegas, jujur, mulia dan adil menjadi alat perilaku yang membentuk perilaku anak. Sifat mulia ini harus ada dalam perilaku pendidik (QS.3:159).

4) Hidayah ke arah perbuatan shaleh

Dalam fitrah manusia ada kecenderungan pada keinginan memelihara diri, kerjasama dan bergaul dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Setiap pribadi wajib dipersiapkan memasuki sistem sosial yang menentukan corak pergaulan sesuai dengan nilai keislaman - jalan lurus untuk melakukan amal shaleh (QS.17:9).

Selain itu, ada pula fungsi pendidikan Islam dalam rangka menangkal berbagai penyimpangan dan kejahatan. Fungsi pendidikan Islam yang bersifat menangkal, yaitu:

- 1) Sebagai penangkal menyekutukan Allah
Hidayah iman merupakan nikmat paling besar. Manusia akan memperoleh keberhasilan dan terhindari dari syirik dengan hidayah tersebut. Fungsi pendidikan Islam adalah menyelamatkan generasi muda atau anak-anak muslim dari syirik. Kisah Luqman mengajarkan akidah tauhid sebagai materi dan fondasi pertama pendidikan Islam (QS. 31:13).
- 2) Penangkal terhadap kesesatan dan kebathilan
Pendidikan Islam berfungsi membina anak-anak agar dapat membedakan yang benar dan salah, serta antara yang halal dan haram. Nilai-nilai kebenaran harus dijunjung tinggi untuk kebaikan bersama (QS.17:18).
- 3) Penangkal terhadap kerusakan jasmaniah
Pendidikan Islam berfungsi untuk menghindarkan orang dari kerusakan diri, karena itu setiap orang dibekali pengetahuan untuk menjadi mandiri dan hidup lebih baik (QS.5:29-30; QS.2:195; QS.17:33).
- 4) Memelihara kesehatan
Pendidikan Islam juga memberikan penekanan kepada kehidupan yang sehat, agar dapat mengabdikan kepada Allah dan berperan sebagai khalifah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hidup tidak boleh merusak lingkungan. Setiap muslim harus memelihara hidup bersih, makan-makanan dan minum yang baik (QS.2:171-172).
- 5) Menjaga diri dari kerusakan hubungan sosial
Pendidikan Islam berfungsi membimbing anak menghormati orang tua, kerabat, pakir-miskin dan *musthad'afin* (orang lemah). Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* harus memberi perlindungan kepada semua orang".
- 6) Menangkal terhadap segala penyakit moral
Membina keutamaan akhlak dalam proses pendidikan Islam

menjadi nilai penting dalam pribadi seutuhnya. Anak-anak harus dibimbing dengan keteladanan dan pembiasaan kepada akhlak yang baik. Sifat dusta, zhalim, mencuri, hasad dan dengki harus dihindari karena berbahaya bagi pribadi anak.

7) Menjaga terhadap segala bahaya dari luar dirinya

Pendidikan Islam mendidik anak-anak muslim untuk mencintai tanah airnya serta mempertahankan keselamatan bangsanya (QS.8:29 dan 60), mempelajari bahaya yang mengancam dari kekuatan militer, ekonomi dan budaya. Pendidikan berfungsi dalam mempersiapkan diri sebagai sumberdaya manusia yang kokoh dan memiliki kemampuan ilmu, teknologi dan ketaqwaan.

E. Strategi Pembelajaran untuk Pendidikan Karakter

Pendidikan yang dilaksanakan jangan sampai menjerumuskan bangsa ini tercabut dari akar budaya bangsa. Karena itu, para penyelenggara pendidikan harus siap membangun dunia pendidikan yang berkarakter untuk menghadapi dunia global. Mengantarkan bangsa supaya eksis dengan nasionalisme dalam kebhinekaan, dan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa merupakan tugas luhur berbangsa. Dengan pendidikan yang tetap konsisten atas upaya membangun karakter bangsa, maka transformasi nilai melalui keluarga (*parenting*), sekolah (*schooling*), dan masyarakat, menempatkan pendidikan karakter bangsa sebagai proses holistik yang menggerakkan potensi anak dalam tatanan nilai kebangsaan.

Pendidikan karakter pada tingkat institusi mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas (Asmani, 2011:43).

Aunillah (2011:108) menjelaskan bahwa sekolah tetap menetapkan landasan filosofis yang tepat dalam membuat pendidikan karakter serta menentukan dan menetapkan tujuan, visi, dan misi maupun

membuat beberapa kebijakan lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi dari kebijakan pendidikan formal atau kebijakan baru.

Secara umum strategi pendidikan karakter mencakup keteladanan, pembiasaan, dan latihan dengan karakter yang baik. Menghargai dan menghormati orang tua, guru dan pranata masyarakat. Pendidikan karakter berusaha membangun karakter dengan perilaku baik, sabar, jujur, bersih, gigih, dan kreatif merupakan manifestasi keimanan yang mendalam.

Perspektif pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai secara utuh. Nilai-nilai Islam secara integral harus diajarkan kepada anak, keimanan, akhlak, ibadah, dan mu'amalah (QS.2:177). Dalam perspektif Islam dijelaskan dalam hadis riwayat Turmuzi: *"Tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pemberian budi pekerti yang baik"*. (Al Hadis) (Lihat Ulwan, 1988:178). Begitu pula hadis riwayat Ibnu Majah: *"Muliakanlah anak-anak kamu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik"* (Al Hadis). Pemantapan keimanan/tauhid merupakan hal krusial untuk diinternalisasikan pada diri anak sejak usia dini, dilanjutkan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam memantapkan karakter keimanan dan ketaqwaan dalam keluarga. Dalam proses ini akan terbina kepribadian muslim sejati (QS.3:102;112), suatu pribadi yang berpikir dan jiwanya konsisten dengan nilai keIslaman dan menjaga keseimbangan hidup untuk dunia dan akhirat, pribadi dan masyarakat (Yusanto dan Jati, 2005). Mendidik anak-anak sejak kecil untuk berkata benar, dapat dipercaya, istiqomah, memperhatikan orang lain, menghargai orang besar, menghormati tamu, berbuat baik kepada tentangga dan mencintai orang lain merupakan totalitas pendidikan budi pekerti dalam Islam (Ulwan, 1988:179).

Secara umum metode yang ditawarkan Al-Jamali (1993:74), dalam pendidikan karakter adalah metode praktik/latihan, repetisi, metode nasihat, perumpamaan, perbandingan, contoh teladan yang baik, pemberian motivasi dan peringatan, dan bimbingan". Metode-metode ini pada pokoknya banyak dipraktikkan dalam pendidikan keluarga dan sekolah. Untuk itu, ada banyak pilihan metode atau strategi dalam pendidikan karakter bagi anak sehingga terbentuk karakter yang baik dan melembaga dalam perilaku masyarakat.

Dengan begitu, masing-masing lembaga harus menjalankan peran memantapkan pendidikan karakter bangsa dengan membiasakan mencontohkan/menampilkan pribadi yang baik. Setiap orang tua, dengan keteladanan, dan pembiasaan membawa anak kepada pribadi yang bersih, jujur, sabar dan mulia. Begitu pula, guru perlu mengemas proses pembelajaran yang memunculkan karakter yang baik melalui berbagai strategi pembelajaran dan iklim kondusif bagi karakter yang baik yang dimanifestasikan pada tataran perilaku akhlakul karimah/akhlak mulia.

Dalam konteks ini Islam sangat memperhatikan upaya menciptakan generasi qur'ani (pandangan dan perilaku berbasis nilai qur'an), pribadi berkarakter, dan berkualitas. Generasi yang diharapkan tampil dengan kekuatan iman dan taqwa, memiliki keterampilan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menuju pembumian nilai Islam secara *kaffah*, (QS.4:9;2:208;3:104 dan 110). Cita ideal ini perlu diwujudkan sebagai upaya memenuhi tugas risalah, menyemai suburnya iman, membangun kekuatan budaya Islami dengan mengamalkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamain*. (QS.21:107). Visi keunggulan dan daya saing umat, sebagai umat terbaik (QS.110;QS.2:143) umat tengah/adil sebagai saksi sejarah yang mendapat petunjuk. Itu artinya pendidikan Islam yang komprehensif menjadi fokus utama yang memberikan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan karakter bangsa.

Pendidikan karakter lebih memfokuskan pada pembentukan sikap/afektif bagi pribadi anak. Ada beberapa strategi pembelajaran sikap/afektif, yaitu:

1. Model Konsiderasi

Model konsiderasi (*the Consideration Model*) dikembangkan oleh Mc. Paul, seorang humanis. Paul menganggap bahwa pembentukan moral tidak sama dengan pengembangan kognitif yang rasional. Implementasi model konsiderasi guru dapat mengikuti tahap-tahapan pembelajaran di bawah ini:

- a. Menghadapkan siswa pada satu masalah yang mengandung konflik, yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ciptakan situasi “seandainya siswa ada dalam masalah tersebut”.

- b. Menyuruh siswa untuk menganalisis masalah dengan melihat bukan hanya yang tampak, tapi juga yang bersifat dalam permasalahan tersebut, misalnya perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain.
- c. Menyuruh siswa untuk menuliskan tanggapannya terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat menelaah perasaannya sendiri sebelum ia mendengar respons orang lain untuk dibandingkan.
- d. Mengajak siswa untuk menganalisis respons orang lain serta membuat kategori dari setiap respons yang diberikan siswa.
- e. Mendorong siswa untuk merumuskan akibat atau konsekuensi dari setiap tindakan yang diusulkan siswa. Dalam tahapan ini siswa diajak berpikir tentang segala kemungkinan yang akan timbul sehubungan dengan tindakannya. Guru perlu menjaga agar siswa dapat menjelaskan argumennya secara terbuka serta dapat saling menghargai pendapat orang lain. Diupayakan agar perbedaan pendapat tumbuh dengan baik sesuai dengan titik pandang yang berbeda.
- f. Mengajak siswa memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang (interdisipliner) untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai dengan nilai yang dimilikinya.
- g. Mendorong siswa agar merumuskan sendiri tindakan yang harus dilakukannya sesuai dengan pilihannya berdasarkan pertimbangannya sendiri. Guru hendaknya tidak menilai benar atau salah atas pilihan siswa. Yang diperlukan adalah guru dapat membimbing mereka menentukan pilihan yang lebih matang sesuai dengan pertimbangannya sendiri.

2. Model Pengembangan Kognitif

Model pengembangan kognitif (*the cognitive development model*) dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Model ini banyak diilhami oleh pemikiran John Dewey dan Jean Piaget yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari *restrukturisasi*

kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Menurut Kohlberg, moral manusia itu berkembang melalui 3 tingkat, dan setiap tingkat terdiri dari dua tahap.

a. Tingkat Prakonvensional

Pada tingkat ini setiap individu memandang moral berdasarkan kepentingannya sendiri. Artinya, pertimbangan moral didasarkan pada pandangannya secara individual tanpa menghiraukan rumusan dan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Pada tingkat prakonvensional ini terdiri dari dua tahap.

Tahap 1 Orientasi hukuman dan kepatuhan

Pada tahap ini perilaku anak didasarkan kepada konsekuensi fisik yang akan terjadi. Artinya, anak hanya berfikir bahwa perilaku yang benar itu adalah perilaku yang tidak akan mengakibatkan hukuman. Dengan demikian, setiap peraturan harus dipatuhi agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif.

Tahap 2 orientasi instrumental-relatif

Pada tahap ini perilaku anak didasarkan kepada rasa “adil” berdasarkan aturan permainan yang telah disepakati. Dikatakan adil manakala orang membalas perilaku kita yang dianggap baik. Dengan demikian perilaku itu didasarkan kepada saling menolong dan saling memberi.

b. Tingkat Konvensional

Pada tahap ini anak mendekati masalah didasarkan pada hubungan individu dengan masyarakat. Kesadaran dalam diri anak mulai tumbuh bahwa perilaku itu harus sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pemecahan masalah bukan hanya didasarkan kepada rasa keadilan belaka, akan tetapi apakah pemecahan masalah itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Tingkat konvensional mempunyai 2 tahap sebagai kelanjutan dari tahap yang ada pada tingkat prakonvensional, yaitu tahap keselarasan interpersonal serta tahap sistem sosial dan kata hati.

Tahap 3 Keselarasan interpersonal

Pada tahap ini ditandai dengan setiap perilaku yang ditampilkan individu didorong oleh keinginan untuk memenuhi harapan orang

lain. Kesadaran individu mulai tumbuh bahwa ada orang lain di luar dirinya untuk berperilaku sesuai harapannya. Artinya, anak sadar bahwa ada hubungan antar dirinya dengan orang lain. Dan hubungan itu tidak boleh mengalami kerusakan.

Tahap 4 Sistem Sosial dan Kata Hati

Pada tahap ini perilaku individu bukan didasarkan pada dorongan untuk memenuhi harapan orang lain yang dihormatinya, akan tetapi didasarkan pada tuntutan dan harapan masyarakat. Ini berarti telah terjadi pergeseran kesadaran individu pada kesadaran sosial. Artinya, anak sudah menerima adanya sistem sosial yang mengatur perilaku individu.

c. Tingkat Postkonvensional

Pada tingkat ini perilaku bukan hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat yang berlaku, akan tetapi didasarkan adanya kesadaran sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya secara individu. Seperti pada tingkat sebelumnya, pada tingkat ini juga terdiri dari dua tahap:

Tahap 5 Kontak Sosial

Pada tahap ini perilaku individu didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang diakui oleh masyarakat. Kesadaran individu untuk berperilaku tumbuh karena kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip sosial. Dengan demikian kewajiban moral dipandang sebagai kontrak sosial yang harus dipatuhi bukan sekedar pemenuhan sistem nilai.

Tahap 6 Prinsip Etis yang Universal

Pada tahap terakhir perilaku manusia didasarkan pada prinsip-prinsip universal. Segala macam tindakan bukan hanya didasarkan sebagai kontrak sosial yang harus dipatuhi akan tetapi didasarkan pada suatu kewajiban sebagai manusia. Setiap individu wajib menolong orang lain, apakah orang itu adalah orang yang kita cintai atau tidak, pertolongan yang diberikan bukan didasarkan pada kesadaran yang bersifat universal.

3. Teknik Mengklarifikasi Nilai

Teknik mengklarifikasi nilai (*Value Clarification Technique*) atau disingkat VCT diartikan sebagai proses membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi satu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.

VCT dalam pembelajaran moral/karakter bertujuan:

- a. Untuk mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai
- b. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatif) untuk dibina ke arah pembinaan dan pembetulan.
- c. Untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa sehingga akhirnya nilai tersebut menjadi milik siswa.
- d. Melatih siswa bagaimana cara menilai, menerima serta mengambil keputusan terhadap suatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat (Masyitoh dan Dewi, 2009:211).

4. *Living Values Education* (LVE)

Salah satu metode yang dapat dipilih untuk diterapkan dalam memantapkan pendidikan karakter bagi mahasiswa pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah *Living Values Education* dari UNESCO.

LVE adalah cara pencarian makna dan hakikat dari pendidikan itu sendiri, yaitu menggali dan menghidupkan nilai. Karena itu LVE menekankan kelayakan dan integritas setiap orang yang terlibat di dalam proses pendidikan, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat.

Untuk menghasilkan pendidikan berkualitas, maka LVE menekankan para pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan membudayakan nilai-nilai positif pada setiap masyarakat dan seluruh dunia. Dengan demikian, LVE meyakini bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang didesain untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan.

LVE mengeksplorasi dan mengembangkan nilai-nilai universal untuk mewujudkan sebuah dunia yang lebih baik. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kedamaian (*peace*), penghargaan (*respect*), cinta (*love*), toleransi (*tolerance*), kejujuran (*honesty*), kerendah-hatian (*humility*), kebahagiaan (*happiness*), tanggung jawab (*responsibility*), kerjasama (*cooperation*), kesederhanaan (*simplicity*), kebebasan (*freedom*), dan persatuan (*unity*). Pengembangan nilai-nilai universal tersebut dikoordinasikan oleh *Association for Living Values Education International*, yaitu sebuah asosiasi guru dari seluruh dunia yang didukung UNESCO dalam pengembangan pendidikan karakter.

Maksud LVE adalah memberikan prinsip-prinsip pokok dan alat untuk mengembangkan pribadi seseorang secara menyeluruh, yaitu mengakui bahwa individu terdiri dari dimensi fisik, intelektual, emosi, dan spiritual. Dalam kaitan ini, ada empat tujuan pokok, LVE sebagaimana dikemukakan Tillman (2004 : x), yaitu:

- 1) Membantu para individu untuk berpikir dan melakukan refleksi tentang nilai-nilai yang berbeda dan berbagai implikasi praktis untuk mengungkapkan nilai tersebut dikaitkan dengan orang lain baik komunitas maupun dunia pada umumnya,
- 2) Memperdalam pemahaman, motivasi dan tanggung jawab untuk membuat pilihan pribadi dan sosial yang positif.
- 3) Menginspirasi individu memilih nilai personal, sosial, moral dan spiritualnya dan sadar tentang metode praktis untuk mengembangkan dan memperdalamnya; dan
- 4) Mendorong para pendidik dan orang tua untuk melihat pendidikan sebagai alat untuk memberikan filosofi tentang kehidupan kepada para peserta didik, dengan cara memberikan fasilitasi terhadap pertumbuhan, perkembangan dan pilihan secara menyeluruh sehingga mereka bisa mengintegrasikan diri ke dalam komunitas dengan penuh penghargaan dan kepercayaan.

Banyak strategi di atas merupakan pilihan bagi sekolah dan guru dalam melaksanakan pendidikan karakter secara terpadu dan efektif. Apalagi pendidikan nasional memang diarahkan untuk membangun karakter bangsa. Di tengah berbagai keresahan terhadap krisis keteladanan

yang mengakibatkan krisis karakter dalam kehidupan berbangsa menyebabkan pendidikan karakter menjadi suatu keniscayaan. Setidaknya keluarga, sekolah dan masyarakat harus mengambil tanggung jawab yang fokus atas pembentukan karakter anak sebagai generasi muda bangsa yang mewarisi nilai ketaqwaan, akhlak, budi pekerti yang baik dalam rangka menjamin eksistensi bangsa sebagai bangsa yang memiliki dalam semangat juang tinggi membela perdamaian, keadilan dan kebenaran.

Sejatinya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus menyiapkan guru yang mampu melaksanakan pendidikan karakter. Dengan pemantapan pembangunan karakter bangsa tidak serta merta harus menambah mata kuliah, atau mata pelajaran baru. Akan tetapi semua mata pelajaran dapat memuat nilai pendidikan karakter. Karena itu, patut ditegaskan bahwa pastikan menetapkan “Pilihan Menjadi Guru yang Baik, atau tidak sama sekali”. Di sini perlu dihadirkan dosen berkarakter, dengan menghadirkan *mindset* baru, mulai dari diri sendiri, dari nilai-nilai dasar, yang menggerakkan semua komponen SDM sekolah, dan kampus, dengan mulai dari yang biasa memberi salam sebagai karakter menghargai, hidup bersih, memberi maaf, jujur, dan sabar perlu ditampilkan dan dilembagakan oleh semua pendidik dan peserta didik dalam keseharian.

Untuk itu perlu dikembangkan tujuan model pendidikan holistik berkarakter adalah membentuk manusia secara utuh (holistik) yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal, serta membentuk manusia yang *life long learners* (pembelajar sejati). Strategi yang dapat diterapkan dijelaskan Muslich (2011:33) sebagai berikut:

- 1) Guru menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid, yaitu: metode yang dapat meningkatkan motivasi murid karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan diberikan materi pelajaran yang konkrit, bermakna, serta relevan dalam konteks kehidupannya (*student active learning, contextual learning, inquiry based learning, integrated learning*).
- 2) Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (*conducive learning community*) sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam suasana yang memberikan rasa aman, penghargaan, tanpa ancaman, dan memberikan semangat.

- 3) Guru memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan terkesinambungan dengan melibatkan aspek *knowing the good, loving the good, and acting the good*.
- 4) Guru menerapkan metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak, yaitu menerapkan kurikulum yang melibatkan juga 9 aspek kecerdasan manusia.

Pendidikan karakter memerlukan strategi yang terpadu dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter yang memungkinkan tercapainya kepribadian siswa yang diharapkan sesuai dengan nilai karakter utama. Dalam kaitan ini, dapat dipastikan selain efektivitas manajemen sekolah dalam menyediakan program pendidikan karakter juga peran strategis guru dalam memfasilitasi siswa menerima nilai-nilai karakter utama yang membuat pribadi yang utuh dan tangguh sebagai makhluk Tuhan, anggota keluarga, masyarakat dan warga bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad, Dkk, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: Pedagogiana Press, 2007.
- Al-Jamali, Muhammad Fadhil, *Filsafat Pendidikan dalam Al-Qur'an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ancok, Djamaluddin, *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*, Surabaya: Erlangga, 2011.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Al-Abrasyi, M. Athiyah, *At-Tarbiyah al-Islamiyah*, terj. Bustaman A. Ghani dan Djohar Bahry, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ali, Mohammad, *Penjaminan Mutu Pendidikan*, dalam Muhammad Ali, Dkk, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: Paedagogiana Press, 2007.
- Al-Syaibany, Omar Mohammad Al-Taumy *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Andriani, Durri, Dkk, *Cakrawala Pendidikan: E-Learning dalam Pendidikan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2003.
- Aunillah, Nuria Isna, *Panduan menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah*, Yogyakarta: Laksana, 2011.
- Bafadal, Ibrahim, *Peningkatan Profesionalisme Guru*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Buchori, Muchtar, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

- Campbell, Jack, *Creating our Common Future*, Paris: UNESCO Publishing, 2001.
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi restu, 1996.
- Daft, Richard, L, *New Era of Management*, New Jersey: South Western Cengage Learning, 2010.
- Dally, Dadang, *Balanced Score Card: Suatu Pendekatan dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remajarosdakarya, 2010.
- Danim, Sudarwan, *Inovasi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Danim, Sudarwan, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Delors Jacques, *Education for the twenty-first century: Issues and Prospects*, Paris: Unesco Publishing, 1998.
- Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Dirjen Binbagis, 2003.
- Drucker, Feter. F Foundations, *Leading For Innovation*, New York:1990.
- Elkind dan Sweet, dalam *goodcharacter.com*, unduh 2/9/2010.
- Fontana, Avanti, *Innovate We Can!*, Jakarta: PT. Gramedia, 2009.
- Langgulong, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992.
- Hamalik, Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hamalik, Oemar, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Havelock, Ronald G dan Steve, Zlotolow, *The Change Agent's Guide*, New Jersey: Second Edition, Educational Technology Publications Englewood Cliffs, 1995.

- Hasan, Said Hamid, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, dalam Muhammad Ali, Dkk, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bandung: Paedagogiana Press, 2007.
- <http://www.livingvalues.net/reference.html>
- Ibrahim, *Inovasi pendidikan*, Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud, 1988.
- Irianto, Yoyon Bahtiar, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Jacques, Delors, *Education for the Twenty-first Century: Issues and Prospects* Paris: Unesco Publishing, 1998.
- Karim, Muhammad Rusli, *Seluk Beluk Perubahan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, tt.
- Kemdiknas, *Desain Induk Pendidikan Karakter*, Jakarta: Republik Indonesia, 2010.
- Kunandar, *Guru profesional*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Lickona, T, *Educating for Character*, New York: Bantam Books, 1991.
- Masyitoh dan Laksmi Dewi, *Strategi Pembelajaran*, Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama, 2009.
- Miles, Mattew B, *Educational Innovation: The Nature of The Problem dalam Innovation in Education*, New York: Teachers College Press Columbia University, 1993.
- M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Mohrm, Susan Albers, *School Based Management*, San Francisco: Jossey Bass Publishers, 1994.
- Mulyasa, E, *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Rosda Karya: Bandung. 2007.
- Munir, *Pendidikan Dunia Maya*, dalam Mohammad Ali, Dkk, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bandung: Paedagogiana Press,
- Muslich, Masnur, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muslich, Masnur, *Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Nofrianto, Sulung, *The Golden Teacher*, Depok: Lingkar Pena Kreativitas, 2008.
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Nuraida dan Rihlah Nur Aulia, *Pendidikan Karakter Untuk Guru*, Ciputat: Islamic Research Publishing, 2009.
- Ornstein, Allan C dan Francis P Hunkins, *Curriculum Foundations, Principles and Issues*, New Jersey: Prentice Hall, 1978.
- Plenert, Gerhard, *World Class Manager*, Jakarta: Interaksara, 1999.
- Prihatin, Eka, *Teori Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ramli, Amir Tengku, *Menjadi Guru Bintang*, Bekasi: Pustaka Inti, 2006.
- Q-Ness, Bambang dan Adang Hambali, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, Bandung: Refika Ofset, 2008.
- Rogers, Everett, dan F Floyd Shoemaker, *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, Terjemahan Abdillah Hanafi, Surabaya: Usaha Nasional, 1987.
- Sagala, Saiful, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Said, Moh, *Pendidikan Karakter di Sekolah*, Jakarta: Jaringpena, 2011.
- Sa'ud, Udin Syaefuddin, *Inovasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Silberman, Melvin L. *Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif*. Penerbit Nusamedia. Bandung. 2006.
- Smaldino, Sharon, E, Dkk, *Instructional Technology and Media for Learning* New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall, 2005.
- Soedijarto, *Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan kehidupan Berbangsa dan Membangun Peradaban negara-Bangsa*, Jakarta: Cinaps, 2000.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*, Bandung: Aditama, 2006.
- Sulhan, Sulhan, *Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa*, Jakarta: Jaring Pena, 2010.

- Surakhmad, Winarno, *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Tilaar, H.A.R, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rinekakipta, 2002.
- Tilaar, H.A.R, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta: Jakarta. 2006.
- Tilaar, H.A.R, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Rinekakipta, 2012.
- Tillman, Diane, *Pendidikan Nilai untuk Kaum Dewasa dan Muda*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Sertifikasi Guru*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Trimo, Soejono, *Pengembangan Pendidikan*, Bandung: Remaja Karya, 1986.
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Asy-Syifa, 1988.
- Uno, Hamzah B, *Profesi Kependidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yamin, Martinis dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Wijaya, Cece, dkk, *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Winataputra, U.S, *Peranan Perguruan Tinggi dalam Implementasi Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Karakter*; Jakarta: Makalah pada seminar Nasional yang dilaksanakan FITK UIN Syarif Hidayatullah dalam rangka Pembentukan Himpunan Sarjana Pendidikan Agama Islam, 2010.
- Wiryokusumo, Iskandar dan J. Mandalika, Ed, *Kumpulan Pikiran-Pikiran dalam pendidikan*, Jakarta: Cv. Rajawali, 1982.
- Zais, Robert S, *Curriculum Principles and Foundations*, New York: Harper & Row Publishers, 1976.

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. Syafaruddin M.Pd, lahir di Asahan-Sumatera Utara, 16 Juli 1962, delapan bersaudara putra kedua dari bapak Mahmud Siahaan dan Ibu Nurhani Siregar. Menyelesaikan Sekolah Dasar tahun 1975, Madrasah Tsanawiyah tahun 1979, Madrasah Aliyah tahun 1982 di Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Kemudian menyelesaikan Strata Satu (S.1) program Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara tahun 1987.

Selanjutnya menyelesaikan strata dua (S.2) program Administrasi pendidikan meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada PPS Universitas Negeri Padang tahun 2000, kemudian tahun 2008 menyelesaikan program Doktor bidang Manajemen Pendidikan pada PPS Universitas Negeri Jakarta.

Menikah dengan Dra.Gusnimar, MA, tahun 1990. Sekarang dianugerahi anak tiga orang, yaitu: Ahmad Taufik Al Afkari (16 tahun), Dina Nadira Amelia (14 tahun), Ahdiana Fadwani Maulafia (11 tahun).

Bertugas pada Fakultas Tarbiyah IAIN SU sejak tahun 1990 sebagai tenaga pengajar, mengasuh mata kuliah Ilmu Pendidikan, Filsafat Pendidikan Islam, dan Manajemen Pendidikan. Pada tahun 2000 menjabat Ketua Progam Studi Diploma II, Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN SU. Pada tahun 2003 bertugas mengajar mata kuliah Metodologi Penelitian pada Akademi Pengajian Dakwah Sungai Patani Kedah Darul Aman Malaysia.

Pernah Latihan Orientasi Kehumasan Departemen Agama di Jakarta tahun 1990, dan pada tahun 1993 mengikuti Pelatihan pengembangan Tenaga Edukatif (PPTE) di IAIN Sumatera Utara. Semasa mahasiswa mengikuti *Basic Training*, dan *Intermediate Training* di HMI Cabang Medan. Kemudian aktif sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam

(HMI) Fakultas Tarbiyah IAIN SU (1985), dan Lembaga Dakwah Islam Divisi Pendidikan HMI Cabang Medan (1986), Pengurus Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Sumatera Utara (1987). Saat ini aktif sebagai Ketua Penyunting Jurnal Tarbiyah IAIN SU (2004), Wakil Sekretaris Jenderal DPP Al-Ittihadiyah (2004 sampai sekarang), Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) Provinsi Sumatera (2005)”, Ketua DPP Al Ittihadiyah, Majelis Pendidikan (2010-2015), dan Ketua Yayasan Pendidikan Al Ittihadiyah Sumatera Utara.

Karya penulis yang diterbitkan, di antaranya: Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan (Grasindo,2002), Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan (Grasindo, 2004), Visi Baru Al-Ittihadiyah (Citapustaka Media, 2004), Pengantar Filsafat Ilmu (Citapustaka Media, 2005), Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Ciputat Press, 2005), Ilmu Pendidikan: Rekonstruksi Budaya Abad XXI (Citapustaka Media, 2005), Manajemen Pembelajaran (Ciputat Press, 2005), Al-Ittihadiyah: Menjalin Kebersamaan, Membangun Bangsa, (Hijri Pustakautama, 2006), Pendidikan Bermutu Unggul (Citapustaka Media, 2006), Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat, (Hijri Pustakautama, 2006), Kepemimpinan Pendidikan (Citapustaka Media, 2007), Efektivitas Kebijakan Pendidikan (Rinekacipta, 2008), Kepemimpinan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah (Quantum Teaching Press, 2010), Pendidikan Pra Sekolah (Media Perintis, 2011), Pengelolaan Pendidikan (Perdana Publishing, 2011).

Drs. Asrul, M.Si, lahir di Mompang Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara, 28 Juni 1967. Anak pertama dari tiga bersaudara dari ayah Asroil Daulay dan ibu Dermawan Hasibuan. Menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri Mompang Julu pada tahun 1981. Sekolah Menengah Pertama Negeri I Panyabungan tahun 1984. Sekolah Menengah Atas Negeri Panyabungan jurusan Ilmu Biologi tahun 1987. Kemudian melanjutkan pendidikan ke program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara (tamat tahun 1992). Sedangkan jenjang pendidikan magister diperoleh dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara program studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (selesai tahun 2001).

Menikah dengan Dra. Zuriani, tahun 1995. Telah dianugerahi tiga orang anak, yaitu: Aulia Putra Daulay (16 tahun), Asni Amelia Daulay (13 tahun), Imada Syaifullah Daulay (11 tahun).

Sejak tahun 1995 ditugaskan sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumetara Utara, mengasuh mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Selain itu, juga mengajar mata kuliah Pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan Agama Islam, Teknik Evaluasi Pendidikan, Statistik Pendidikan, dan Penelitian Pendidikan.

Selain mengajar, juga aktif menjadi pengelola *Miqot Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Direktur Pusat Pengembangan Potensi Profesi Tenaga Kependidikan (P4TK) Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Di luar kampus aktif melibatkan diri di organisasi dunia penerbitan, sebagai wakil sekretaris Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Sumatera Utara. Menjadi salah satu ketua kompartemen di Perhimpunan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Sumatera Utara.

Karya yang pernah dipublikasi antara lain: *Kepemimpinan Pendidikan* (Citapustaka Media, 2007), *Statistik Untuk Penelitian Sosial*, editor (Citapustaka Media Perintis, 2010), *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, editor (Perdana Publishing, 2012).

Mesiono, M.Pd. lahir di Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Kota Pematang Siantar tanggal 27 Juli 1971, menamatkan SD Negeri 091421 di Emplasmen Bah Butong tahun 1985, Madrasah Tsanawiyah Dharma Pertiwi (MTs.S) di Bah Butong tahun 1988, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Pematang Siantar tahun 1991, kemudian melanjutkan Studi ke IAIN SU-Medan Jurusan Pendidikan Agama Islam dan lulus tahun 1995. Pada tahun 2003 lulus Pascasarjana Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Medan dengan gelar Magister Pendidikan. Sekarang sedang menyelesaikan Program Doktor (S3) Universitas Negeri Medan.

Dalam karier pekerjaan yang pernah dijabat adalah sebagai Staf Peneliti dan pengembangan Perguruan/Universitas Al Azhar Jl. Kwala Bekala Padang Bulang dan sebagai Guru tahun 1996 s.d

2003. Pada tahun 2004 Konsultan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Medan, tahun 2005 Konsultan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai. Konsultan Akademis di PT Sinergis Mitramandiri Usaha (Mitra Plus Consultant) tahun 2004, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan. Pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium (Kalab) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan Tahun 2009 s.d 2011 dan 2011 s.d sekarang sebagai Sekretaris Jurusan (Sekjur) pada Prodi yang sama.

Menikah dengan Suridah, S.Pd.I dan dikaruniai tiga orang anak yakni Imas Wihdah Misshuari, Dinda Hafsa Misshuari dan Ahmad Qordhawi Misshuari.

Aktivitas lain yang aktif penulis tekuni adalah sebagai Narasumber dan fasilitator dalam berbagai pendidikan dan latihan (diklat) di antaranya: (1) Pendidikan dan latihan Kepala Sekolah Dasar se-Kota Medan tahun 2006-2007 bersama Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) Kota Medan, (2) Pendidikan dan latihan Kepala Sekolah Dalam Penyusunan RPS di Kota Tanjung Balai, (3) Pendidikan dan latihan Manajemen Pengembangan diri di Medan, (4) Pendidikan dan latihan penyusunan KTSP di SD Islam Azizi Kota Medan. (4) Wrokshop Active Learning in School (ALIS) di American Corner IAIN Sumatera Utara Tahun 2012. (5) Pelatihan Peningkatan Mutu Guru-Guru PAI Al-Azhar Medan Tahun 2012 dan saat ini sebagai tim pelaksana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon LPTK IAIN Sumatera Utara untuk Sertifikasi Guru dan Pengawas Tahun 2012.

Beberapa karya ilmiah (artikel jurnal) yang dipublikasikan antara lain; (1) Eksistensi Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan SDM, (Jurnal Edukasi Tanjungbalai, Januari-Juli-Desember 2008) (2) Manajemen Berbasis Sekolah Tahun 2010 (3) Peran Konsep dan Strategi Sekolah Unggul, (Jurnal Tarbiyah, Juli Desember. 2011) (3) Peran Kepemimpinan Sekolah Dalam Melakukan Perubahan. (Jurnal Al Fikru, Januari-Juni. 2012) (4). Manajemen Sekolah Efekrif. (Jurnal Al Fikru, Juli-Desember. 2012). Penelitian yang pernah dilakukan (1) Ayat-Ayat Manajemen (Penelitian tahun 2009), (2) Participatory Assesment MBM di Madrasah Aliyah Laboratorium (MAL) IAIN SU (Penelitian

Tahun 2011). (3). Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning dalam Pembentukan Pendidikan Akhlak Santri di Pesantren Sumatera Utara (Penelitian Tahun 2011). Sedangkan buku yang telah diterbitkan, yaitu: (1) Pendidikan bermutu Unggul (Editor) dan Kontributor, penerbit Citapustaka Media Bandung, 2006. (2) Manajemen Organisasi penerbit Citapustaka Media Bandung, 2009. (3) kepemimpinan dan Kewirausahaan, Perdana Publishing, Medan, 2010. (4) Manajemen Organisasi, Edisi Revisi penerbit Citapustaka Media Bandung, 2011.